PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA NOMOR
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

BUKU III

- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
- DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
- DINAS PERHUBUNGAN
- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;

7. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

5. Rencana...

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. bab V memuat penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
   b. dinas kesehatan;
   c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. dinas...

d. dinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
f. dinas sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
g. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
h. dinas pangan dan pertanian;
i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
j. dinas perhubungan;
k. dinas komunikasi dan informatika;
l. dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
m. dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
n. dinas perpustakaan dan kearsipan;
o. sekretariat daerah;
p. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
q. Bappeda;
r. badan pengelola keuangan daerah;
s. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
t. inspektorat;
u. kecamatan padang panjang timur;
v. kecamatan padang panjang barat; dan
w. badan penanggulangan bencana daerah, kesatuan bangsa dan politik.

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan.

(2) Dalam hal RKPD berkenaan mengalami perubahan, Renja Perangkat Daerah harus mengikuti perubahan.

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 5...

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 20

NO	JABATAN	NAMA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten		
3.	Kepala Bappeda		


PADANG PANJANG
KOTA SERAMBI MEKAH

PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena curahan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat menyusun salah satu dokumen penting perencanan pembangunan pada perangkat Daerah ini, yakni Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ng Tahun 2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024, sebagai akibat dari adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kota Padang Panjang dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaaan program setiap tahun akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan sesuai indikator dapat terukur.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

WIDYA KUSUMA, ST
NIP.19750901 200501 1 008

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU**	
	2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
	2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
	3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	28
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	30
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	39
BAB V	**PENUTUP**	44

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Hal
Tabel TC.33	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Padang Panjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7
Tabel TC.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16
Tabel TC.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024	20
Tabel TC.32	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Padang Panjang	26
Tabel 3.1	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026	28
Tabel TC.33	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Padang Panjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan disertai indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang definitif.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibagi atas dua tahap, yaitu tahap perumusan rancangan dan tahap penyajian. Proses penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Melalui proses penyusunan secara terintegrasi ini diharapkan akan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, dan semakin terarahnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Renja OPD dan RKPD merupakan bagian proses awal tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, serta pelayananmasyarakat, disusunlah rancangan KUA dan rancangan PPAS. Rancangan KUA dan rancangan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan RKA OPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman kepada RKPD dan bersifat Indikatif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);

12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran dan indikator kinerja yakni memantapkan kemandirian daerah dengan menekankan pada pembangunan sumber daya manusia, lingkungan hidup dan tata ruang, infrastruktur, hukum dan pemerintahan, serta penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 48 Tahun 2016. Dengan disusunnya Renja tahun 2024 diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan kewenangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU
- 2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah pada RPJMD 2018-2023 pada tahun ketiga ini menunjukan angka capaian yang cukup baik dimana terlihat realisasi kinerja pada tahun 2022 memenuhi hampir mencapai target kinerja yang telah ditentukan kecuali pada Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas (53,81%) dan Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat (75,00%) yang disebabkan oleh sebagai berikut:

1. Trotoar jalur utama yang ada dengan panjang 6.313,7 m belum sepenuhnya dibangun dengan kondisi yang ramah disabilitas mengingat kenaikan pembangunan trotoar relatif kecil dimana ditahun 2022 ini terealisasi 586 meter. Hal ini disebabkan tingginya target pencapaian renstra tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
2. Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat tidak mengalami kenaikan disebabkan 2 kali Bimbingan teknis yang dilakukan di tahun 2022 dari 3 kali sosialisasi yang direncanakan tidak langsung melakukan sertifikasi kepada peserta bimbingan teknis

Gambaran lebih lengkap dari hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C.33. berikut ini :

Tabel T-C.33

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kota Padang Panjang

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kodo	Uurusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d n-2			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah s/d n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d n-2 (2022)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=7/6	(9)	10=5+7	11=10/5
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X XX 1 202	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang	47 orang	48 orang	44 orang		47 orang		
X XX 1 206	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT									
X XX 1 206 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	17 paket	17 paket	17 paket	17 paket		17 paket		
X XX 1 206 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	5 paket	6 paket	6 paket		8 paket		
X XX 1 206 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket		9 paket		
X XX 1 206 9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	155 laporan	128 laporan	128 laporan	128 laporan		128 laporan		
X XX 1 208	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		3 jenis							
X XX 1 208 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	350 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		
X XX 1 208 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan		3 laporan		
X XX 1 208 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan		11 laporan		

X XX 1 209	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			0%	0%	0%		0%		
X XX 1 209 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit		
X XX 1 209 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit	32 unit	27 unit		31 unit		
X XX 1 209 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	6 unit	6 unit	6 unit		6 unit		
X XX 1 209 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit		
X XX 1 209 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit		
X XX 1 **207**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**2**	0%	0%	0%		0%		
X XX 1 207 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	2 unit	3 unit	3 unit	2 unit		0 unit		
1 3 2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**	**76,83 %**	%	**87 %**	**74,27 %**		%		
		Persentase panjang sungai yang dikonservasi	**22,42 %**	%	**68 %**	**22,42 %**		%		
1 3 2 202	**Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)**	Jumlah Irigasi yang dipelihara	2,5 km	km	3,5 km	km		km		
1 3 2 202 1	**Sub Kegiatan Penyusunan Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa**	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	Dokumen		Dokumen		
1 3 2 202 8	**Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan**	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 km	km	2 km	0,513 km		0,7 km		
1 3 2 202 14	**Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 km	3,1 km	1,5 km	0,375 km		3,06 km		

1	3	2	201		**Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)**	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,05 km	km	0,27 km	km		km		
1	3	2	201	1	**Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan**	Jumlah dokumen masterplan dan database sungai yang dibuat	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen		
1	3	2	201	46	**Sub Kegiatan : Normalisasi/Restorasi Sungai**	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,05 km	km	0,27 km	0,247 km		0 km		
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Proporsi Rumah tangga dengan Akses berkelanjutan terhadap air minum layak**	**86,57 %**	**%**	**84 %**	**86 %**		**%**		
1	**3**	**3**	201		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	100 SR	SR	SR	SR		SR		
1	3	3	201	1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		0 dokumen		
1	3	3	201	7	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik	100 SR	2 SR	100 SR	175 SR		54 SR		
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tinggal dengan bersanitasi Layak**	**90 %**	**%**	**92,8 %**	**89,05 %**		**%**		
1	3	5	201		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	20 rumah tangga	rumah tangga	rumah tangga	rumah tangga		rumah tangga		
1	3	5	201	1	sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang	1 dokumen	dokumen	0 dokumen	dokumen		0 dokumen		
1	3	5	201	10	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan	1 unit	unit	2 unit	2 unit		1 unit		
1	3	5	201	12	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	20 rumah tangga	25 rumah tangga	100 rumah tangga	65 rumah tangga		2 rumah tangga		
1	3	5	201	15	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi	5 m3/hari	m3/hari	m3/hari	m3/hari		m3/hari		

1 3 6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase sarana infrastruktur drainase perkotaan dalam kondisi baik**	**87,45 %**	**%**	**91 %**	**85 %**		**%**		
1 3 6 201	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara	1000 meter	meter	meter	meter		meter		
1 3 6 201 6	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase lingkungan yang ditingkatkan	1000 meter	300 meter	4 meter	4 meter		1950 meter		
1 3 6 201 9	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase	Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dioperasikan dan dipelihara	500 meter	meter	13 meter	13 meter		0 meter		
1 3 6 201 16	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Jumlah Masterplan drainase yang dibuat	1 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	Dokumen		0 Dokumen		
1 3 8	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan Ber IMB**	**46,10 %**	**%**	**76,9 %**	**44,2 %**		**%**		
1 3 8 201	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	50 unit	unit	unit	unit		unit		
1 3 8 201 1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Perizinan PBG dengan Implementasi SIMB serta meningkatkan peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung dalam memberikan advice terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung	50 dokumen	2 dokumen	6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen		
1 3 8 201 2	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatn bangunan gedung negara	-	2 0%	1 0%	1 0%		0 0%		
1 3 8 201 13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit		1 unit		

1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	88,01 %	%	93,5 %	85,89 %		%	
					Persentase Trotoar dalam kondisi baik	%	%	83 %	81,00 %		%	
1	3	10	201	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	2,1 km	km	km	km		km	
1	3	10	201 1	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknik, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		0 Dokumen	
1	3	10	201 2	Sub Kegiatan : Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan	luas jalan yang tersedia untuk pembebasan jalan	0 meter2	meter2	meter2	meter2		0 meter2	
1	3	10	201 5	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	0 km	0,7 km	11 km	0,586 km		km	
1	3	10	201 8	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi	0 km	km	0 km	km		0 km	
1	3	10	201 10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	0,1 km	3,5 km	0,4 km	2,66 km		0 km	
1	3	10	201 11	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin jalan dalam kota	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	2 km	0,9 km	0,2 km	1,052 km		1,9 km	
1	3	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi	61 %	%	81 %	69,75 %		%	
1	3	11	201	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja terampil konstruksi tersertifikasi	0 orang	orang	orang	orang		orang	
1	3	11	201 6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konsruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	0 orang	orang	3 orang	2 orang		orang	
1	3	11	201 7	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	0 orang	orang	orang	orang		orang	
1	3	11	202	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0 dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen	
1	3	11	201 1	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0 dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen	
1	3	11	201 2	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat jasa pendukung layanan informasi jasa konstruksi	0 dokumen	45 dokumen	76 dokumen	76 dokumen		45 dokumen	
1	3	11	201 9	Sub kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	0 dokumen	dokumen	10 dokumen	8 dokumen		dokumen	

1 3 11 204	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	8 dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
1 3 11 204 3	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	8 dokumen	dokumen	10 dokumen	10 dokumen		10 dokumen		
1 3 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun**	**0,21 %**	%	0,19 %	0,19 %		%		
1 3 12 201	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi RTRW dan RDTR ke KemenATR	2 dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
1 3 12 201 1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	jumlah dokumen dalam rangka per substansi RDTR ke kemenART	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		dokumen		
1 3 12 201 3	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	jumlah dokumen kebijakan yang di terbitkan	1 dokumen	dokumen	0 dokumen	dokumen		dokumen		
202	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	1 dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
1 3 12 201 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RRTR yang disusun	1 dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		1 dokumen		
1 3 12 203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	0 dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
1 3 12 203 2	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	jumlah data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	0 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		
1 3 12 204	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	1 dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
1 3 12 204 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	1 dokumen	96 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		
1 3 12 204 4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	jumlah dokumen koordinasi penataan ruang yang dilaksanakan	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		
2 10 10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko**	**77 %**	%	77 %	77 %		%		
2 10 10 201	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan	0 sertifikat	sertifikat	sertifikat	sertifikat		sertifikat		
2 10 10 201 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 laporan	0 laporan	44 laporan	189 laporan		6 laporan		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat dua urusan wajib yaitu urusan bidang Pekerjaan Umum dan Pertanahan. Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib dengan kategori pelayanan dasar. Pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kabupaten/kota pada urusan ini terdiri dari pelayanan air minum dan air limbah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan minimal di Bidang Pekerjaan Umum adalah:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Adapun target dari kegiatan ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum;
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Adapun target dari kegiatan ini adalah Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Masing-masing pelayanan diatas harus dilaksanakan setiap tahunnya dengan target capaian yang telah ditetapkan. Pembiayaan untuk pelaksanaan SPM diatas telah diakomodir melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan Rancangan Awal Renja setiap tahunnya.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Padang Panjang
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	INDIKATOR	SPM/standar nasional	IKK	TARGET RENSTRA OPD		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2021	2022	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100% (2024)		82,96 %	84%	85,88%	86%	84,96%	86,57%
2	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100% (2024)		90%	92,8%	87,87%	89,05%	94,44%	90%

Adapun pencapaian sasaran Renstra pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik

- Indikator kinerja persentase ketersediaan sarana publik pada Program penataan bangunan dan lingkungannya dari target 88% dengan realisasi kinerja 94,44% dengan capaian kinerja 107,32%. Dari 18 sarana publik yang harus tersedia/dipelihara yang bisa dipenuhi adalah sebanyak 17 unit sarana publik dan pemeliharaan sampai dengan 2022 seperti: (1) Pintu replika nabawi, (2)pembuatan reserver air bersih Islamic Centre, (3)finishing lantai basi selasar Islamic Centre, (4) finishing lantai basement Islamic Centre, (5) booster pump, (6)pembangunan area parkir, (7)pengaman reserver air bersih, (8) pemasangan pengaman bangunan dari air hujan /kanopi, (9)pembuatan pengaman bangunan dari air hujan /pratisi atrilik pada bangunan pasar, (10)rehab kandang kuda bancah laweh, (11)pembangunan retainingwall rusunawa, dan (12) gerbang batas kota silaing bawah (13) Rehab Tourist Information Center (14) Kawasan Islamic Center (15) Gerbang Kota Kacang Kayu (16) Gerbang Kota Silaing Bawah (17) Pembangunan TIC

- Indikator kinerja Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi dari target 81% dengan realisasi kinerja 60,75% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 75% dengan proporsi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sebanyak 274 orang dari 451 orang tenaga kerja konstruksi tidak terdapat penambahan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

- Indikator kinerja Persentase jalan dalam kondisi baik pada Program Penyelenggaraan Jalan dari target 93,50 % dan realisasi kinerja sebesar 90,97% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 97,29% dengan panjang jalan yang dalam kondisi baik 85.930 km dari 94,456 km yang ada di Kota Padang Panjang.

- Indikator kinerja Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas pada Program Penyelenggaraan Jalan dari target 83 % dengan realisasi 44,66% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 53,81%. Dari panjang trotoar di jalan utama 6.313,7 meter sepanjang 2.819,8 meter merupakan jalur ramah disabilitas. Adapun realisasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan 596 meter.

- Indikator kinerja Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dari target 91% dengan realisasi 97,88% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 107,56% dengan terpenuhinya 121.456,65 meter drainase yang dalam kondisi baik dari 124.085,05 meter panjang seluruh drainase Kota Padang Panjang.

- Indikator kinerja Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan target 87% dan realisasi 77,91% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 89,55% dengan panjang irigasi yang dalam kondisi baik 48.368,46 m dari 62082,48 m irigasi yang dipelihara.

- Indikator kinerja Persentase panjang sungai yang dikonservasi pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan target 68% dan

realisasi 40,78% dengan capaian kinerja 59,97%. Panjang sungai yang dikonservasi 540,3 meter dari 1325 meter yang seharusnya dikonservasi. Terdapat penambahan sebesar 247,3 meter

- Indikator kinerja Persentase Bangunan Ber-IMB per satuan bangunan pada Program Penataan Bangunan Gedung dari target 44,2% dan realisasi 45,81% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 103,64%. Data yang mendukung capaian kinerja adalah jumlah bangunan yang ber-IMB 4259 dari 9.297 bangunan yang ada di Kota Padang Panjang.

b. Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak

- Indikator kinerja Persentase Cakupan pelayanan air minum pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dengan target 83,96% dan realisasi 87,21% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 103,87%. Dengan jumlah kumulatif masyarakat rumah yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam Kota Padang Panjang sebanyak 15.197 rumah dari 17.425 proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Padang Panjang.

- Indikator kinerja Persentase Cakupan pelayanan air limbah pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan target 92% dan realisasi 87,21% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 94,79%. Dengan jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kota Padang Panjang sebanyak 15.197 rumah dari 17.425 proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Padang Panjang.

c. Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang

Indikator kinerja Persentase Kesesuaian Tata Ruang dengan RTRW pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dari target 82% dan realisasi 82% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 100%%. Data

yang mendukung capaian kinerja adalah program/kegiatan OPD pada tahun 2022 sebagian besar telah sesuai/sinkron dengan indikasi program/kegiatan yang tertuang pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032. Hal ini terwujud dalam capaian proram yang mewujudkan rencana indikasi program pola ruang dan struktur ruang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun isu-isu strategis yang diinventarisir dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Penanganan Banjir
2. Penanganan Air Limbah
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar Infrastruktur kota
4. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berupaya seoptimal mungkin merealisasikan berbagai program dan kegiatan dalam pencapaian RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 baik dibidang keciptakaryaan, kebinamargaan, perencanaan maupun Penataan ruang. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2018 sampai tahun 2021 yaitu Lanjutan pembangunan pedestrian kawasan pasar yang belum selesai dan kegiatan rutin lainnya. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang disebabkan baik oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas PUPR dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yaitu: Refokusing anggaran untuk penanganan covid 19, dalam penyelesaian pekerjaan tidak sesuai/tidak didukung oleh personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana kantor yang belum memadai, kegamangan personil pengelola kegiatan tersangkut masalah hukum, Belum memadainya sarana pendukung pekerjaan

pertamanan. adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk memberi izin/menyerahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan setapak dan drainase.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan diatas tentu ini akan berdampak atau berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, sehingga target kinerja pelayanan OPD dalam menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah belum tercapai secara maksimal.

Beberapa tantangan dan peluang dari Dinas PUPR dalam meningkatkan pelayanan adalah: Adanya program pusat berupa hibah penanganan limbah pribadi, tingginya partisipasi sebagian masyarakat Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan pembangunan yang dibuktikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan P3MK dalam bentuk jasa gotong royong dan tingginya dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur kota.

Dari permasalahan diatas dapat dikemukakan isu-isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

a. Kualitas, kuantitas dan komitmen sumber daya aparatur masih belum optimal;
b. Jumlah sarana prasarana penunjang kerja belum mencukupi dan ketersediaan data teknis untuk kebutuhan perencanaan belum memadai;
c. Standar pelayanan publik (SPP) yang masih kurang dalam pelaksanaan pelayaan prima kepada masyarakat;
d. Rendahnya kemampuan fiskal daerah dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Tenaga pengawas yang berkualitas dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan dilapangan belum memadai;
f. Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan;
g. Belum lengkapnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang sebagaimana di amanatkan peraturan perundang-undang;
h. Masih banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
i. Belum tersediannya sistem informasi penataan ruang yang dapat diakses

publik;

j. Belum terpenuhinya debit air untuk kebutuhan irigasi;
k. Belum terpenuhinya ketersediaan saran dan prasarana sumber daya air;
l. Masih kurangnya kualitas dan kapasitas jalan;
m. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang jalan;
n. Belum terpenuhinya target pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat;
o. Rendahnya legalisasi terhadap kepemilikan aset tanah pemerintah;
p. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan jalan dan kantor serta RTH;
q. Masih ada tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat;
r. Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan jaringan irigasi dan sungai di kota padang panjang;
s. Belum maksimalnya layanan jalan dan sarana pendukung jalan seperti trotoar dan drainase;
t. Belum tuntasnya proyek-proyek stategis kota dalam mendukung kegiatan perekonomian, sosial budaya dan pendidikan masyarakat. Seperti Pasar dan Islamic Center;
u. Masih terbatasnya jumlah tukang yang memiliki sertefikasi di Kota padang Panjang sesuai dengan amanat UU RI No. 2 tahun 2018 tentang jasa konstruksi baik proyek pemerintah maupun swasta wajib bersertifikat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja BAPPEDA disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja BAPPEDA dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel TC-31

Tabel TC-31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Dengan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	6	(8)	(9)	(10)	(11)	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**17.357.746.850**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**17.357.746.850**	
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN**				
1	03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**17.357.746.850**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN**			**17.357.746.850**	
1	03	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**100 Persen**	**6.179.286.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**100 Persen**	**6.179.286.000**	
1	03	01	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**		**100 Persen**	**5.160.743.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**5.160.743.000**	
1	03	01	2 02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	658 Orang/bulan	5.160.743.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang/bulan	5 160 743 000	
1	03	01	2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**		**100 Persen**	**23.501.900**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**23.501.900**	
1	03	01	2 05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Paket	23.501.900	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	23 501 900	
1	03	01	2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**		**100 Persen**	**216.499.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**216.499.500**	
1	03	01	2 06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	6.499.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.499.500	
1	03	01	2 06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	40 000 000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40 000 000	
1	03	01	2 06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	20 000 000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	
1	03	01	2 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	150 000 000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	150 000 000	

1 03 01 2 07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	50.000.000	
1 03 01 2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	
1 03 01 2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**		**100 Persen**	**369.641.600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100 Persen**	**369.641.600**	
1 03 01 2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	
1 03 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	20.000.000	
1 03 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	345.541.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	345.541.600	
1 03 01 2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**90 Persen**	**359.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**90 Persen**	**359.000.000**	
1 03 01 2 09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.000.000	
1 03 01 2 09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	240.000.000	
1 03 01 2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	40.000.000	
1 03 01 2 09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4.000.000	
1 03 01 2 09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	

1	03	02			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase panjang sungai yang dikonservasi**		**22,42 Persen**	**1.133.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase panjang sungai yang dikonservasi**	**22,42 Persen**	**1.133.000.000**
						Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik		**70,4 Persen**			**Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik**	**70,4 Persen**	
1	03	02	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi**		**0,05 km**	**250.000.000**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi**	**0,05 km**	**250.000.000**
1	03	02	2 01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,05 KM	250.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,05 KM	250 000 000
1	03	02	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah panjang irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara**		**2,5 km**	**883.000.000**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah panjang irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara**	**2,5 km**	**883.000.000**
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,5 KM	475.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM	475 000.000
1	03	02	2 02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 KM	308.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	308 000 000
1	03	02	2 02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	100 000 000
1	03	03			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak**		**88,57 Persen**	**250.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak**	**88,57 Persen**	**250.000.000**
1	03	03	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun**		**100 SR**	**250.000.000**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun**	**100 SR**	**250.000.000**
1	03	03	2 01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	100 000.000
1	03	03	2 01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 SR	150 000 000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	150 000 000

1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak		90 Persen	678.071.200	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak	90 Persen	678.071.200	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik		20 rumah tangga	678.071.200	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	20 rumah tangga	678.071.200	
1	03	06	2 01	0038	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,5 M³/Hari	100 000 000	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	2,5 M³/Hari	100 000 000	
1	03	06	2 01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 M³/Hari	300 000 000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5 M³/Hari	300 000 000	
1	03	06	2 01	0036	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	178 071 200	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	178 071 200	
1	03	06	2 01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	100.000.000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik		67,34 Persen	7.038.232.660	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	67,34 Persen	7.038.232.660	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara		1600 meter	7.038.232.660	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara	1600 meter	7.038.232.660	
1	03	06	2 01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100 000 000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	100 000 000	
1	03	06	2 01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Sistem Drainase	5 805 776 650	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase	5 805 776 650	
1	03	06	2 01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Sistem Drainase	1 132 456 000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase	1 132 456 000	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Ber IMB		46,1 Persen	400.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Ber IMB	46,1 Persen	400.000.000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku		60 unit	400.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	60 unit	400.000.000	
1	03	08	2 01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Bangunan Gedung	350 000 000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	350 000 000	
1	03	08	2 01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen	50 000 000	

1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik		55,67 Persen	1.134.990.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik	55,67 Persen	1.134.990.000	
						Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		93,74 Persen			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	93,74 Persen		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara		2,1 km	1.134.990.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	2,1 km	1.134.990.000	
1	03	10	2 01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 KM	484.990.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,1 KM	484.990.000	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 KM	600.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	600.000.000	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat		61 Persen	69.167.500	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	61 Persen	69.167.500	
1	03	11	2 01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan		30 orang	#REF!	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	30 orang	#REF!	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	69.167.500	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	69.167.500	
1	03	11	2 04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		30 dokumen	9.999.600	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	30 dokumen	9.999.600	
1	03	11	2 04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Paket Pekerjaan	9.999.600	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	9.999.600	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun		0,21 Persen	474.999.700	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,21 Persen	474.999.700	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun		1 dokumen	384.826.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	1 dokumen	384.826.400	
1	03	12	2 02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	384.826.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	384.826.400	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang		1 dokumen	64.386.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	1 dokumen	64.386.200	
1	03	12	2 03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.744.400	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	21.744.400	
1	03	12	2 03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	42.640.800	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	42.640.800	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan		3 dokumen	16.088.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	3 dokumen	16.088.100	
1	03	12	2 04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16.088.100	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	16.088.100	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, perguruan tinggi melalui pelaksanaan musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang RKPD Kota. Usulan Musrenbang yang diakomodir dalam rancangan Renja Akhir Tahun 2024 adalah usulan yang verifikasi di tingkat kecamatan dan Bappeda serta telah melalui proses investigasi (penelitian lapangan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selain usulan Musrenbang, Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 juga mengakomodir hasil reses DPRD berupa pokok-pokok pikiran Anggota DPRD tersebut sesuai dengan tupoksi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengakomodir usulan Musrenbang dan Pokir DPRD, diantaranya :

1. Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai. Terdapat 1 usulan Musrenbang, berupa rehab/perbaikan/pengedaman tebing sungai;
2. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan. Terdapat 2 usulan Musrenbang terkait Pembuatan saluran bandar, Pembuatan Got Dan Saluran Irigasi Air, dan Lanjutan Tali Bandar (Irigasi);
3. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan. Terdapat 4 usulan Pokok Pikiran berupa Pembangunan/perbaikan saluran irigasi;
4. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman. Terdapat 1 usulan Pokok Pikiran berupa Perbaikan mck dan Lanjutan Ipal komunal;
5. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan terdapat 1 usulan Musrenbang berupa Pembangunan/Perbaikan drainase;
6. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase . Terdapat 7 usulan pokok pikiran berupa Pembangunan/Perbaikan drainase;
7. Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 usulan pokok pikiran berupa Pembangunan/perbaikan bangunan

situs budaya dan pendaman tebing

8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan. Terdapat 2 usulan musrenbang berupa Pemeliharaan/perbaikan jalan dan trotoar.

Usulan hasil Musrenbang dan pokok pikiran yang terakomodir pada Renja 2024 dapat dilihat pada table TC-32 berikut :

Tabel TC.32

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Padang Panjang

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran	Catatan
I	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				
1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				
a	Normalisasi/Restorasi Sungai	Lambah RT 1 Kelurahan Ganting	Sering terjadinya luapan air pinggir sungai pada musim hujan karena volume air yang meningkat dari kolam kelompok sampai jembatan dekat MCK Lambah RT 1 yang mengakibatkan sawah disekitar pingir sungai karena dampak luapan air dan merusak tanaman pertanian warga untuk itu diperlukan penambahan tinggi dam dengan panjang 150 m, dan tinggi 1,5 m	250.000.000	Musrenbang JANUARDI, SE
2	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				
a	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Depan dan samping Kantor Lurah RT 2 Kelurahan Koto Katik	Dinding sungai sudah banyak yang tergerus air dan membahayakan terhadap saluran irigasi yang ada di atasnya, maka perlu dilakukan pendaman diding sungai dengan panjang 30 meter	100.000.000	Musrenbang EMRIANIS, SE
		Depan Rumah Pak Don sampai sawah Dt Tanjapa RT 03 Kelurahan Ekor Lubuk	Lanjutan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi di RT 3, mulai dari depan rumah Pak don sampai sawah Dtk Tanjapa, untuk itu irigasi tersebut harus direhap dan dilanjutkan sepanjang 250 M	125.000.000	Musrenbang SYAMSUWIR, S.Si
b	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	RT. 07 Kelurahan Ekor Lubuk	Rehab Berat Irigasi dari Sigalanggang sampai Kincie Upiak Palatiang	100.000.000	Pokok Pikiran Drs. ADITIAWARMAN
		RT. 6 kel. Ganting	Pembuatan dan irigasi ke solok panjang RT. 6 kel. Ganting	100.000.000	Pokok Pikiran ZULFIKRI, SE
		Sawah banda lambah RT 1	Lanjutan pembangunan banda lambah / irigasi sawah	30.000.000	Pokok Pikiran KIKI ANUGERAH DIA, SE
		Jl. Rasuna Said RT.VII, belakang rumah ibu Yet	Diperlukan pembuatan gorong-gorong disekitar rumah warga	200.000.000	Pokok Pikiran MAHDELMI, S.Sos
II	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH**				
1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**				
a	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	RT 9 dan RT 10 Kelurahan Sigando	Belum adanya Sanitasi limbah masyarakat	200 000 000	Pokok Pikiran RISMAN

III	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				
1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**				
a	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jl Rasuna Said RT 23 Kel Kampung Manggis	Sering terjadinya banjir dikarenakan tidak adanya saluran, maka diperlukan pembuatan drainase sepanjang 225 x 1.5 m.	265.000.000	Musrenbang AKBAR SYAHNAN, S.A.P
b	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jl. Rasuna Said RT.VII, belakang rumah ibu Yet	Dipertukan pembuatan gorong-gorong disekitar rumah warga	200.000.000	Pokok Pikiran MAHDELMI, S.Sos
		RT.7 Kel. Ganting, Kota Padang Panjang	Guna menanggulangi terjadinya banjir atau luapan air perlu kiranya dibuat saluran drainase	35.000.000	Pokok Pikiran Dr. H. NOVI HENDRI SE.,M.Si
		Jl. Dr. Riva'i no. 145 RT 09 Kel. Guguk Malintang, Kota Padang Panjang	Penutupan bandar	100.000.000	Pokok Pikiran YULIUS KAISAR
		RT. 15 Kel. Guguk Malintang, kec. Padang Panjang Timur , Kota Padang Panjang	Pemasangan tutup riol	150.000.000	Pokok Pikiran MARDIANSYAH, A.md
		RT. 6 kel. Ganting, Kec. Padang Panjang Barat , Kota Padang Panjang	Pembangunan drainase dari RT. 6 saluran air dari tabek ampang menuju sawah	100.000.000	Pokok Pikiran ZULFIKRI, SE
		Solok Batuang, RT. 1 Kel. Sigando, Kec. Padang Panjang Timur , Kota Padang Panjang	Pembuatan drainase	100.000.000	Pokok Pikiran ZULFIKRI, SE
		RT 21 Kel. Guguk Malintang, Kota Padang Panjang	Lanjutan pembuatan riol	150.000.000	Pokok Pikiran YULIUS KAISAR
IV	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				
1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**				
a	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Guguk Malintang, Kota Padang Panjang	Picuran lakuak yang merupan beruduk dan situs budaya perlu di dam kembali agar dapat di pergunakan masyarakat kembali	50.000.000	Pokok Pikiran PUJI HASTUTI, A.Md
		Tanah Pak Lambik, Kota Padang Panjang	Tebing perkuburan butuh di dam kama rawan longsor	50.000.000	Pokok Pikiran PUJI HASTUTI, A.Md
		Jl. Anas Karim RT. 20 Kelurahan Kampung Manggis	Pengendaman Tebing Pemakaman Umum Perwaliko	200.000.000	Pokok Pikiran H NASRULLAH NUKMAN, SH
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				
1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				
a	Pemeliharaan Berkala Jalan	Belakang rumah dinas Walikota RT 01 Kel Guguk Malintang	Kondisi jalan pemukiman warga yang sudah rusak seperti jalan yang sudah berlobang dan menyebabkan genangan air yang dapat membahayakan pengguna jalan maka di perlukan pengaspalan ulang jalan dengan panjang 300 meter.	345.000 000	Musrenbang ILHAM KUSUMA RY S STP
		Jl Urip Sumoharjo RTVI. RT VII. RT VIII Kelurahan Tanah Pak Lambik	Untuk Kenyamanan Pejalan kaki dan Keindahan Trotoar diperlukan Peningkatan Trotoar, yaitu dengan Pemasangan Batu Alam untuk Trotoar sepanjang 300 Meter di Trotoar Jalan Urip Sumoharjo	140 000 000	Musrenbang ROMI SAPUTRA SH

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan strategi yang telah dijabarkan sebelumnya untuk dilaksanakan tiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun kedepan sehingga dapat dijadikan pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026dapat dijelaskan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2024-2026

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2026	2026
Meningkatkan layanan jaringan drainase perkotaaan	peningkatan drainase perkotaan	✓	✓	✓
	Pemeliharaan jaringan drainase perkotaan	✓	✓	✓
	Penyediaan drainase perkotaan	✓	✓	✓
Meningkatkan layanan infrastruktur air limbah	Pembangunan/ pemeliharaan IPAL komunal	✓	✓	✓
	Rehab/pemeliharaan IPLT	✓	✓	✓
	Penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah	✓	✓	✓
	Penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan air limbah	✓	✓	✓
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana air limbah	✓	✓	✓
Meningkatkan layanan infrastruktur jalan	Penyediaan Jaringan Jalan Perkotaan	✓	✓	✓
	Pemeliharaan jalan perkotaan	✓	✓	✓
	Rehabilitasi jaringan Jalan perkotaan	✓	✓	✓

Meningkatkan layanan infrastruktur Irigasi	Penyediaan Jaringan Irigasi Permukaan	✓	✓	✓
	Pemeliharaan Irigasi permukaan	✓	✓	✓
	Rehabilitasi jaringan Irigasi permukaan	✓	✓	✓
Meningkatkan layanan infrastruktur Bangunan Gedung	Fasilitasi perizinan bangunan Gedung	✓	✓	✓
	Fasilitasi Penataan Bangunan dan gedung	✓	✓	✓
Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	Penyusunan regulasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	✓	✓	✓
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang	Optimalisasi sosialisasi produk tata ruang	✓	✓	✓
	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	✓	✓	✓

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan tujuan dan sasaran dinas didasarkan pada faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan kinerja keberhasilan dinas, sehingga dengan memperhatikan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pertanahan yang menjadi kewenangannya, maka tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah :

1. Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas; dan
2. Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang

Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan diformulasikan sebagai Renja dinas. Adapun sasaran renja yang akan dituju yaitu:

1. Meningkatnya sarana infrastruktur perkotaan yang berkualitas dalam rangka:
   a) Penanganan Banjir
   b) Penanganan Air Limbah

c) Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar Infrastruktur kota

2. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang muncul pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada dasarnya adalah program kegiatan yang telah tercakup pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan RPD Kota Padang Panjang 2024-2026. Perumusan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan sebelum adanya visi dan misi KDH/WKDH terpilih, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024

Sasaran RPD Kota Padang Panjang Bidang kePUan yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kualitas infrastrukstur yang berkelanjutan dengan indikator persentase kenaikan indeks kualitas layanan infrastruktur (IKLI). Menyikapi kebijakan tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Adapun sasaran meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang ditindaklanjuti melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan, jumlah program yang diajukan dalam Renja 2024 adalah sebanyak 9 program, 18 Kegiatan dengan total pagu indikatif Rp. 17.357.746.850,00. Seperti pada tabel T-C.33 dibawah ini :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kota Padang Panjang

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(10)	(11)
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**17.357.746.550**				**8.318.466.200**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	03				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**17.357.746.550**				**8.318.466.200**
1	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**100 Persen**	**8.179.266.000**			**100 Persen**	**8.167.860.000**
1	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**		**100 Persen**	**5.160.743.000**			**100 Persen**	**5.350.000.000**
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	658 Orang/bulan	5.160.743.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**658 orang/bln**	5.350.000.000
1	03	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**		**100 Persen**	**23.501.900**			**100 Persen**	**23.000.000**
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang	47 Paket	23.501.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**47 paket**	23.000.000
1	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**		**100 Persen**	**216.499.500**			**100 Persen**	**227.000.000**
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	6.499.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4 paket**	6.500.000
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4 paket**	50.000.000
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Paket	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12 paket**	20.500.000
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	24 Laporan	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**24 laporan**	150.000.000

1	03	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**		**100 Persen**	**50.000.000**			**100 Persen**	-
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0 unit**	-
1	03	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**		**100 Persen**	**369.541.600**			**100 Persen**	**289.860.000**
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	12 Laporan	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12 laporan**	4.000.000
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	36 Laporan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36 laporan**	20.500.000
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	13 Laporan	345.541.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13 laporan**	265.360.000
1	03	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**90 Persen**	**359.000.000**			**90 Persen**	**278.000.000**
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	1 Unit	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1 unit**	30.000.000
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang	30 Unit	240.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30 unit**	203.000.000
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	6 Unit	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6 unit**	40.000.000
1	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	1 Unit	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1 unit**	4.000.000
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	50 000 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1 unit**	1.000.000

1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang sungai yang dikonservasi		22,42 Persen	1.133.000.000			22,62 Persen	500.000.000
						Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik		70,4 Persen				72,06 Persen	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		0,05 km	250.000.000			0,2 km	250.000.000
1	03	02	2 01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kota Padang Panjang	0,05 KM	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Musrenbang (Pendaman di RT 1 Kelurahan Ganting sepanjang 150 m dan tinggi 1,5 m)	0,2 km	250.000.000
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara		2,6 km	883.000.000			2,6 km	250.000.000
1	03	02	2 02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kota Padang Panjang	1,5 KM	475.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Musrenbang (Lanjutan pembangunan jaringan irigasi di RT 07 Ngalau sepanjang 50 m)	0 km	-
1	03	02	2 02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 KM	308.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Musrenbang (Rehab jaringan irigasi di RT 03 Ekor Lubuk sepanjang 250 m dengan anggaran 125 jt dan jaringan irigasi di RT 02 Koto Katik sepanjang 30 m dengan anggaran 100 jt) Kegiatan rehab rutin sebesar 250 jt	2,6 km	250.000.000
1	03	02	2 02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masterplan Irigasi Kota Padang Panjang	0 Dokumen	-
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak		86,67 Persen	250.000.000			87,16 Persen	150.000.000
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun		100 SR	250.000.000			100 SR	150.000.000
1	03	03	2 01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Dokumen RISPAM		
1	03	03	2 01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Padang Panjang	100 SR	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 SR	150.000.000

1	03	03			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase R[illegible] dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak**		**8[illegible],67 Persen**	**250.000.000**			**8[illegible],15 Persen**	**150.000.000**
1	03	03	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun**		**100 SR**	**250.000.000**			**100 SR**	**150.000.000**
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revisi Dokumen RISPAM		
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Padang Panjang	100 SR	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 SR	150.000.000
1	03	05			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak**		**90 Persen**	**678.071.200**			**90,7 Persen**	**266.407.200**
1	03	05	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik**		**20 rumah tangga**	**678.071.200**			**20 rumah tangga**	**266.407.200**
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kota Padang Panjang	2,5 M³/Hari	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rehabilitasi IPLT	2,5 m3/hari	
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kota Padang Panjang	5 M³/Hari	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Musrenbang (pembangunan IPAL Komunal di RT 9 dan 10 Sigando yang melayani 40 RT)	5 m3/hari	100.000.000
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Padang Panjang	1 Unit	178.071.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	166.407.200
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masterplan Air Limbah Domestik	0 dokumen	

1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak**		**90 Persen**	**678.071.200**			**90,7 Persen**	**266.407.200**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik**		**20 rumah tangga**	**678.071.200**			**20 rumah tangga**	**266.407.200**
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kota Padang Panjang	2,5 M³/Hari	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rehabilitasi IPLT	2,5 m3/hari	
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kota Padang Panjang	5 M³/Hari	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Musrenbang (pembangunan IPAL Komunal di RT 9 dan 10 Sigando yang melayani 40 RT)	5 m3/hari	100.000.000
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Padang Panjang	1 Unit	178.071.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	166.407.200
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masterplan Air Limbah Domestik	0 dokumen	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik**		**87,34 Persen**	**7.038.232.650**			**87,92 Persen**	**189.824.000**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara**		**1500 meter**	**7.038.232.650**			**500 meter**	**189.824.000**
1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masterplan Drainase	0 dokumen	
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Kota Padang Panjang	1 Sistem Drainase	5.805.776.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Musrenbang (Pembangunan drainase di Jl rasuna said Kampung Manggis sepanjang 225 m X	0 Sistem Drainase	-
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Padang Panjang	1 Sistem Drainase	1.132.456.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Sistem Drainase	189.824.000

1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Ber IMB**		**78,1 Persen**	**400.000.000**			**Persen**	**100.000.000**
1	03	08	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku**		**50 unit**	**400.000.000**			**50 unit**	**100.000.000**
1	03	08	2 01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kota Padang Panjang	2 Bangunan Gedung	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 bangunan gedung	50.000.000
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Padang Panjang	50 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 dokumen	50.000.000
1	03	10			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik**		**85,87 Persen**	**1.134.990.000**			**85,87 Persen**	**867.375.000**
						Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		**93,74 Persen**				**90,33 Persen**	
1	03	10	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara**		**2,1 km**	**1.134.990.000**			**2,1 km**	**867.375.000**
1	03	10	2 01	0020	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Appraisal Rencana Jalan Sport Center	0 Dokumen	-
1	03	10	2 01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Padang Panjang	0,1 KM	484.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Musrenbang (Pengaspalan ulang jalan dibelakang rumdin Walikota sepanjang 150 m dengan anggaran 345 jt dan pemasangan batu alam di jl urip sumaharjo sepanjang 300 m dengan anggaran 140 jt)	0,1 km	500.000.000
1	03	10	2 01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Padang Panjang	2 KM	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 km	2 km	357 375 000

1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat**		**61 Persen**	**69.167.300**			**66 Persen**	**37.000.000**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan**		**30 orang**	**-**			**33 orang**	**-**
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Kota Padang Panjang	30 Orang	59.167.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30 orang**	25.000.000
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi**		**30 dokumen**	**9.999.800**			**30 dokumen**	**12.000.000**
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kota Padang Panjang	30 Paket Pekerjaan	9.999.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30 Paket Pekerjaan**	12.000.000
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun**		**0,21 Persen**	**474.999.700**			**0,23 Persen**	**50.000.000**
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen RRTR yang disusun**		**1 dokumen**	**-**			**0 dokumen**	**-**
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	394.526.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang**		**1 dokumen**	**84.386.200**			**1 dokumen**	**50.000.000**
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	21.744.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	42.640.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1 dokumen**	50.000.000
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan**		**3 dokumen**	**16.088.100**			**3 dokumen**	**-**
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	16.088.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran atau tujuan. Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang pada satu atau lebih unit kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan mengerahkan sumber daya (sumber daya manusia), peralatan, teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.

Renja Tahun 2024 Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat pagu indikatif (PI) sebesar Rp. 17.357.746.850,00 yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, dengan kegiatan :
   1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
      1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1. Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
      1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      2. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor;
      3. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan;
      4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD.

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   3. Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor;
6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan;
   3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset tetap Lainnya;
   5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan:
1) Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
   1. Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Skunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 HA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan.
   2. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
   3. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa

III. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
   2. Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

IV. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
   2. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
   3. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
   4. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

V. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan:

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupataen/Kota, dengan subkegiatan:
   1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
   2. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
   3. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

VI. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Setifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan Sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Setifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG;

VII. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan;
   2. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;
   3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan;
   4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.

VIII. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan Sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis.
2) Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan Sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

IX. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
   2. Sub Kegiatan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang.

3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

1. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di Tahun 2024. Keterlaksanaan program tergantung kepada ketersediaan dana serta rencana aksi kegiatan yang akan disusun kemudian. Pelaksanaan program kegiatan mengacu kepada prinsip efektif dan efisien baik dari segi pendanaan maupun pemanfaatan waktu dengan melaksanakan evaluasi yang berkelanjutan.

Untuk itu, besar harapan kami agar Renja Tahun 2024 ini secara faktual dan ideal dapat menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan sehingga dokumen perencanaan ini menjadi bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan terwujudnya pelayanan prima di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

WIDYA KUSUMA, ST

NIP.19750901 200501 1 008


PADANG PANJANG
KOTA SERAMBI MEKAH

PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

(DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN

LINGKUNGAN HIDUP)

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan ..... I 1

1.1 Latar Belakang ..... I 1

1.2 Dasar Hukum ..... I 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..... I 5

1.4 Sistematika Penulisan..... I 5

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2022 ..... II 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup..... II 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup..... II 20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang ..... II 25

2.3.1 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ..... II 25

2.3.2 Urusan Lingkungan Hidup ..... II 26

2.4. Review terhadap rangcangan Awal RKPD ..... II 27

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ..... II 37

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup..... III 55

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... III 55

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ..... III 60

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ..... III 62

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup..... IV 84

BAB V Penutup ..... V 96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan disertai indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap perumusan rancangan dan tahap penyajian. Proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah, hasil pengkajian terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi acuan dalam penyajian dokumen Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Padang Panjang di Tahun 2023, maka Kota Padang Panjang menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang diiringi dengan penyusunan Rencana Strategi Daerah Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Melalui proses penyusunan secara terintegrasi ini diharapkan akan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, dan semakin terarahnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembanguan Daerah merupakan bagian proses awal tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan Negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, disusunlah rancangan KUA dan rancangan PPAS. Rancangan KUA dan rancangan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan RKA SKPD.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membawahi 2 (dua) Urusan Wajib, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup, pada saat ini juga menyiapkan Renja Tahun 2024 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Padang Panjang, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. DASAR HUKUM

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891)

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);

11. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembar Daerah Tahun 2013 Nomor 08)

12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Padang Panjang Panjang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 29).

14. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 64);

15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6).

16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Menetapkan prioritas pembangunan Tahun 2024 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;

2.4 Review terhadap rangcangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun yang lalu diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan mengupayakan realisasi pencapaian target kinerja program,kegiatan dan Sub Kegiatan serta perkiraan target tahun 2024.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2022 dan laporan realisasi APBD Tahun 2022, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian. Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Selain itu dengan adanya Perubahan RPJMD yang diiringi dengan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dari 12 program dan 19 kegiatan dan 36 sub kegiatan yang dilaksanakan, capaian yang tidak memenuhi target umumnya terjadi pada outcome. Sementara untuk output hampir seluruhnya terealisasi 100%. Beberapa Program yang capaiannya dibawah target adalah

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Dengan Target persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standar sebesar 88%, telah terealisasi sebesar 8, 62%. Upaya untuk mencapai target ini berupa pemeliharaan dan pembangunan jalan, dam dan drainase yang terus dilakukan setiap tahun di wilayah permukiman Kota Padang Panjang. Tahun 2022 pembangunan jalan sepanjang 424, 66 m, pembuatan dan perbaikan drainase sepanjang 1.310, 45 m dan pembuatan bangunan pengaman sungai (DAM) sepanjang 338, 58 m.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Dari target Persentase ketersediaan RTH Publik sebesar 4, 40% terealisasi sebesar 4,23%. Upaya untuk meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau berupa pembuatan taman di 3 lokasi dan pemeliharaan taman-taman yang sudah ada. Penambahan Ruang

Terbuka Hijau dari 3 lokasi tersebut adalah seluas 124 m^2 . Penambahan ini belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penambahan ketersediaan RTH di Kota Padang Panjang. Keterbatasan lahan yang bisa digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau menjadi kendala dalam pencapaian target indikator persentase ketersediaan RTH Publik.

3. Program Pengelolaan Sampah

Dengan indikator Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan target 73% terealisasi sebesar 82,72%. Data realisasi yang lebih besar menunjukkan belum tercapainya target, karena penanganan sampah sesuai dengan Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang ditargetkan semakin meurun dari waktu ke waktu.

Hal ini juga menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA masih tinggi, yang berarti upaya pengurangan sampah dari sumbernya tidak terselenggara dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain tidak berjalannya aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah oleh masyarakat dan institusi. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pengolahan sampah selama Tahun 2022 tidak berjalan optimal, disebabkan karena keterbatasan anggaran, sehingga objek dan jumlah pelaksanaan pembinaan terbatas.

4. Program Pengembangan Perumahan

Dengan indikator Rasio rumah layak huni dengan target 95, 24 terealisasi 95, 21. Tidak tercapainya target disebabkan karena tidak terealisasi nya pemberian bantuan rehab rumah tidak layak huni kepada masyarakat sebanyak 3 unit rumah. Hal ini disebabkan karena tidak lengkapnya administrasi terkait pemberian bantuan tersebut. Tahun 2022 ditargetkan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 43 unit dan terealisasi sebanyak 40 unit.

. Beberapa Program yang telah memenuhi target adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan

Dengan indikator Persentase dokumen perencanaan lingkungan dengan target 100% terealisasi 100%. Tahun 2022 terdapat 2 dokumen lingkungan yang disusun, yaitu KLHS revisi RTRW dan KLHS RPJMD Perubahan. Selain itu juga telah disusun Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang berhasil mengantarkan Walikota dan DPRD Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Dengan indikator Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar sedang dengan target 28, 57% terealisasi sebesar 28, 57%. Tercapainya target ini karena 2 dari 7 sungai yang ada di Padang Panjang ditargetkan telah berstatus cemar sedang. Tahun 2022 sungai yang telah berstatus cemar sedang adalah batang sitabak dan bakarek-karek.

3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Dengan indikator Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup dengan target 100% terealisasi 100%. Tercapainya target karena peningkatan Sumber Daya Manusia berupa pembinaan dan penyuluhan terhadap kader lingkungan yang dilakukan setiap bulan, dan telah ikut berpartisipasinya kader lingkungan dalam melakukan penyuluhan lingkungan terhadap masyarakat di Kelurahannya masing-masing. Selain itu juga dilakukan pemberian informasi lingkungan hidup kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Dengan indikator Penghargaan di bidang lingkungan hidup dengan target 1 jenis penghargaan terealisasi 1 jenis penghargaan. Tahun 2022 Kota Padang Panjang kembali mendapat kan penghargaan Adipura sebagai kota yang berhasil mengelola kebesihan dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Beberapa Program yang telah melebihi target adalah sebagai berikut :

1. Program Kawasan Permukiman

Dengan indikator Persentase pengurangan kawasan kumuh, dengan target 73, 95% terealisasi sebesar 73, 97%. Tercapainya target ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Program KOTAKU yang secara berkelanjutan melakukan peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Dari 47,719 Ha luas kawasan kumuh telah tertangani seluas 35,3008 sampai tahun 2022.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Dengan indikator Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan dan/atau SPPL dengan target 50% terealisasi 62, 68%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tercapainya target karena pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terus menerus kepada pelaku usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Sekalipun tingkat ketaatan ini telah melebihi target, namun tetap perlu dilakukan upaya pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diawasi, karena tingkat ketaatan dihitung dengan cara penjumlahan bobot tingkat ketaatan seluruh usaha dan/atau kegiatan dibagi dengan jumlah usaha/kegiatan yang diawasi. Jika dilihat dari masing-masing usaha/kegiatan yang diawasi, dari 33 usaha/kegiatan 19 berada pada kategori tidak taat (bobot dibawah 75).

3. Program Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dengan indikator Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes dari 28-30% target yang ditetapkan telah terealisasi sebesar 38%. Tercapainya target ini dipengaruhi oleh terlaksananya pembinaan terhadap 38 fasyankes (Rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter dan bidan) pada Tahun 2022, lebih banyak dari target yang di tetapkan yaitu sebanyak 30 fasyankes. Hal ini menunjukkan bahwa cukup meningkatnya perhatian fasyankes terhadap pengelolaan limbah B3.

Tidak optimalnya pencapaian target pada beberapa program diatas mempengaruhi capaian sasaran OPD, terutama Indeks Kualitas Air (IKA). Dimana dari target sebesar 55,89 baru tercapai sebesar 46, 07. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat pencemaran air permukaan di Kota Padang Panjang. Salah satunya dengan melihat penurunan kualitas air sungai di Kota Padang Panjang. Selain itu masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat baik rumah tangga, industri, pertanian/peternakan dan perdagangan dalam pengelolaan limbah juga mempengaruhi tingkat pencemaran air. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi baku mutu dari masing-masing sektor menjadi penyebab utama pencemaran. Parameter uji yang paling tinggi tingkat cemarannya adalah *E coli* dengan konsentrasi mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat melebihi baku mutu. Bakteri *E coli* biasanya bersumber dari tinja manusia maupun kotoran ternak.

Untuk indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) , dari target yang ditetapkan sebesar 70, 97 baru terealisasi sebesar 56, 18. Hal ini disebabkan karena perubahan penentuan Luas Tutupan Hutan dan Luas Tutupan Vegetasi Non Hutan. Luas Tutupan Hutan dan Vegetasi Non Hutan yang dihitung sebagai dasar penentuan IKTL adalah; Luas

Hutan Kota, Luas Belukar di Kawasan Hutan, Luas Belukar di APL, Luas Ruang Terbuka Hijau dan Luas Areal Rehabilitasi Hutan. Sementara itu areal pertanian berupa sawah di Kota Padang Panjang yang sebelumnya digolongkan sebagai Ruang Terbuka Hijau tidak dapat lagi dihitung sebagai penyumbang luas RTH di Kota Padang Panjang. Untuk mencapai nilai indeks IKTL Nasional maka perlu didorong lebih giat penumbuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang Panjang berupa pembangunan Taman Kota maupun Hutan Kota. Namun keterbatasan lahan menjadi permasalahan utama dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau dan hutan kota

. Selain itu dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, maka penetapan target untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan mempedomani Surat Edaran tersebut. Daerah diminta melakukan penyesuaian dan upaya untuk pencapaian target yang telah di tetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut.

Berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023 terdapat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sampai dengan Tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kodo	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kehiatan Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN									
01:04:02	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	81,76%	48,80%	73,59%	73,97%	101%	81,76%	81,76%	100,00%
1.04.02.2.01	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.02.2.03	Penyusunan/Reviu/Legalisasi/Kebijakan Bidang PKP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.02.2.05	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	30 kali	10 kali	10 kali	12 kali	120%	10 kali	30 kali	100%
1.04.03.2.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	30 Kali	10 kali	10 kali	10 kali	100%	23 kali	30 Kali	100%
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)	200 unit	52 unit	43 unit	40 unit	93%	105 unit	197 unit	98%
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang direhab (APBD)	200 Unit	52 unit	43 unit	40 unit	93%	105 unit	197 unit	98%
01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	86%	86%	88%	88%	100%	86%	86%	100%
1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah jenis PSU yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (PSU)	1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	100%	2 kecamatan	2 kecamatan	100%
		Jumlah Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permu kiman	39 lokasi		11 lokasi	11 lokasi	100%	28 lokasi	39 lokasi	100%

		Jumlah Lokasi Permukiman yg dilengkai dengan Banguna Pengaman	27 lokasi		11 lokasi	11 lokasi	100%	16 lokasi	27 lokasi	100%
		Jumlah Bangunan Drainase Lingkungan Permukiman	33 lokasi		8 lokasi	7 lokasi	88%	25 lokasi	32 lokasi	97%
	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Prosentase Permukiman layak Huni**	**97,90%**	**94,96%**	**95,24%**	**95,22%**	**100%**	**95,22%**	**97,90%**	**100%**
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehab dan Di Bangun	10 Unit		5 Unit	0 unit	100%	5 Unit	10 Unit	100%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehab dan di Bangun	10 Unit		5 Unit	0 unit	100%	5 Unit	10 Unit	100%
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Hunian Rusunawa yang di Kelola	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	100%	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	100%
	Sum Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelemba gaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Hunian Rusunawa yang di Kelola dan Jumlah Tenaga Harian Lepas yang Dibayarkan	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	100%	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Rasio Rumah Layak Huni**	**95, 56%**	**94,96%**	**95,24%**	**95,22%**	**100%**	**95, 56%**	**95, 56%**	**100%**
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	72 hunian	72 hunian	72 hunian	100%	72 hunian	72 hunian	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	72 hunian	72 hunian	72 hunian	100%	72 hunian	72 hunian	100%
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1.Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	2 dokumen	2 dokumen				4 dokumen	4 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW	1 dokumen	1 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	1 dokumen	1 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan**	**32-29**	**28,57**	**28,57**	**28,57**	**100%**	**32-29**	**32-29**	**100%**
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil Uji, Jumlah kampung iklim yg di Bina	2 jenis, 9 kampung iklim	2 Jenis(Air dan Udara)	2 jenis,6 kampung iklim	2 jenis,8 kampung iklim	100%	2 jenis,9 kampung iklim	2 jenis,9 kampung iklim	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	9 kampung iklim	7 Kampung	8 kampung iklim	8 kampung iklim	100%	9 kampung iklim	9 kampung iklim	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jenis hasil uji	2 jenis	2 jenis				2 jenis	2 jenis	100%
	Sub Kegiatan Pengelo laan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil uji	2 jenis		2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data kualitas lingkungan, Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	2 data, 1 sungai	1 data, 1 sungai	2 Data,1 sungai	2 Data,1 sungai	100%	2 data, 1 sungai	2 data, 1 sungai	100%

	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Data kualitas lingkungan	2 data	2 data	2 data	2 data	100%	2 data	2 data	100%
		Jumlah Sungai yg diventarisasi dan diawasi Sumber Pencemarnya	1 Sungai	1 Sungai	1 Sungai	1 Sungai	100%	1 Sungai	1 Sungai	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Prosentase Ketersediaan Dokumen KEHATI**	**100%**		**66%**	**66%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Prosentase Ketersediaan RTH Publik	**4,4%**	**4,3%**	**4,4%**	**4,23%**	**96%**	**4,40%**	**4,4%**	**100%**
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KEHATI, jumlah taman yang dibangun dan jumlah taman yang terpelihara	2 dokumen, 8 lokasi dan 2 kecamatan		2 dokumen, 8 lokasi dan 2 kecamatan	2 dokumen, 8 lokasi dan 2 kecamatan	100%	2 dokumen, 8 lokasi dan 2 kecamatan	2 dokumen, 8 lokasi dan 2 kecamatan	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Keaneka ragaman Hayati Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kehati, dan Jumlah Dokumen Data Monitoring KAHATI	1 Dokumen Monitoring , 1 Dokumen Renca na Pemanfaatan		1 Dokumen Monitoring , 1 Dokumen Rencana Peman faatan KEHATI	1 Dokumen Monitoring , 1 Dokumen Rencana Peman faatan KEHATI	100%	1 Dokumen Monitoring , 1 Dokumen Rencana Peman faatan KEHATI	1 Dokumen Monitoring , 1 Dokumen Renca na Pemanfaatan KEHATI	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman yg dibangun dan jumlah taman yg terpelihara	8 lokasi dan 2 kecamatan		3 lokasi dan 2 kecamatan	3 lokasi dan 2 kecamatan	100%	5 lokasi dan 2 kecamatan	8 lokasi dan 2 kecamatan	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Prosentase Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes (Jmlh Fasyankes yg mengelola Limbah/Penghasil Limbah**	**31-35**		**26-30**	**38**	**127%**	**31-35**	**31-35**	**100%**
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes (Jmlh Fasyankes yg mengelola Limbah/Penghasil Limbah**	20 Fasyankes	10 Fasyankes	10 Fasyankes	18 Fasyankes	**100%**	20 Fasyankes	20 Fasyankes	**100%**
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha/kegiatan penghasil LB3 yang dibina	20 FasyanKes	10 Fasyankes	10 Fasyankes	18 Fasyankes	100%	20 Fasyankes	20 Fasyankes	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Tingkat ketaatan penerapan Izin Lingkungan**	**65%**	**50%**	**60%**	**60,53%**	**101%**	**65%**	**65%**	**100%**
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	110 Kegiatan	100 Kegiatan	105 Kegiatan	105 Kegiatan	100%	110 Kegiatan	110 Kegiatan	100%
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	110 Kegiatan	100 Kegiatan	105 Kegiatan	105 Kegiatan	100%	110 Kegiatan	110 Kegiatan	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan kader lingkungan, Jenis Data dan Informasi Lingkungan yang disajikan	12 kali pertemuan, 2 jenis	4 kali pertemuan	4 kali pertemuan, 2 Jenis	2 Jenis Data Informasi dan 4 kali pertemuan	83%	4 kali pertemuan, 2 jenis	12 kali pertemuan, 2 jenis	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasya rakatan	Jumlah pertemuan kader lingkungan	12 kali pertemuan	4 kali pertemuan	4 kali pertemuan	4 kali pertemuan	100%	4 kali pertemuan	12 kali pertemuan	100%
	Penyelenggaraan Kampanye Lingkungan	Jenis Data dan Informasi Lingkungan yg di sajikan	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Penghargaan di bidang lingkungan hidup**	**2 jenis**	**0 jenis**	**2 jenis**	**2 jenis**	**100%**	**2 jenis**	**2 jenis**	**100%**
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Penilaian kebersihan lingkungan, Jumlah sekolah Adiwiyata	45 kali Pembinaan	**0 jenis 40 sekolah**	2 Jenis, 3 kali Koordinasi,40 kali Pembinaan	4 kali Koordinasi,40 kali Pembinaan	**100%**	45 kali Pembinaan, 2 Jenis	45 kali Pembinaan, 2 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Jenis Penilaian kebersihan lingkungan	2 Jenis	0 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
		2. Jumlah sekolah Adiwiyata	45 kali Pembinaan	40 sekolah	3 kali Koordinasi,40 kali Pembinaan	4 kali Koordinasi,40 kali Pembinaan	100%	4 kali Koordinasi,85 kali Pembi naan	4 kali Koordinasi,85 kali Pembi naan	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga**	**72%**	**74%**	**73%**	**82,72%**	**88%**	**82,72%**	**72%**	**100%**
		Presentase Pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	**24%**	**24%**	**26%**	**15,17%**	**58%**	**15,17%**	**24%**	**100%**
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	-Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada -Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan -Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat - Jenis sarana prasarana persampahan Jumlah TPA yang dipelihara Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah	185 orang, 25 kali ,penekagan perda 3 kali penganan lahan TPA 1 Unit, 1 dokumen 4 lapo ran	4 kali, 181 Orang, 1 TPA	2 laporan, 183 orang, 3 kali , 1 TPA	175 orang, 1 TPA	96%	177 orang, 1 TPA	185 orang, 25 kali ,penekagan perda 3 kali penganan lahan TPA 1 Unit, 1 dokumen 4 lapo ran	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daearh Pengelolaan Sampah Kebupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Jastrada	4 laporan		2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	4 laporan	100%
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melaku kan Pemilahan, Pengum pulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pempro sesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupa ten/Kota	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan,	185 org	4 kali, 181 Orang, 1 TPA	183 orang	177 orang	97%	177 orang	185 org	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penye diaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jenis Sarana prasarana persampahan (APBD)	3 jenis. 1 TPA	3 jenis (pemeliharaan bak sampah kayu, beton dan kontainer)	3 jenis	3 jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Sampah bagi Masyarakat	7 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	4 kali	7 kali	100%

	Sub Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPATPST/SPA	Jumlah TPA yg terpelihara	1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA	100%	1 TPA	1 TPA	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja, laporan keuangan perangkat daerah	20 laporan					20 laporan	20 laporan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja, laporan keuangan perangkat daerah	20 laporan					20 laporan	20 laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran, Jumlah Laporan Prognosis	37 orang, 45 laporan	37 orang, 15 laporan	37 orang, 15 laporan	37 orang, 15 laporan	100%	37 orang, 30 laporan	37 orang, 45 laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg bibayarkan Gaji dan tunjangannya	37 orang	37 orang	37 orang	37 orang	100%	37 orang	37 orang	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	2 laporan	3 laporan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	39 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	26 laporan	39 laporan	100%
	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	2 laporan	3 laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan, jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan, Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan yang disediakan, Jumlah makan dan minum yang disediakan, Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	63 jenis, 174 jenis, 2 gedung kantor, 36 jenis dan29928 lembar, 3099 ok, 414 ok	21 jenis, 58 jenis, 2 gedung kantor, 12 jenis dan 9976 lembar, 1033 ok, 150 ok	21 jenis, 58 jenis, 2 gedung kantor, 12 jenis dan 9976 lembar, 1033 ok, 150 ok	14 jenis, 52 jenis, 2 gedung kantor,19 Jenis dan8814 lembar, 143 ok, 40 ok	100%	21 jenis, 72 jenis, 2 gedung kantor, 12 jenis dan16307 lembar, 2042 ok, 269 ok	63 jenis, 174 jenis, 2 gedung kantor, 36 jenis dan29928 lembar, 3099 ok, 414 ok	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan	21 jenis	18 jenis	18 jenis	18 jenis	100%	21 jenis	21 jenis	100%
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	58 jenis	58 jenis	58 jenis	58 jenis	100%	58 jenis	58 jenis	100%
		Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor	100%	2 gedung kantor	2 gedung kantor	100%
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan yang disediakan	12 jenis dan 29928 penggandaan	12 jenis dan 9976 penggandaan	12 jenis dan 9976 penggandaan	12 jenis dan 2296 penggandaan	100%	12 jenis dan 16307 penggandaan	12 jenis dan 29928 penggandaan	100%

	Sub Kegiatan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum yang disediakan	3099 ok	1009 ok	1009 ok	1009 ok	100%	2042 ok	3099 ok	100%
		Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	414 ok	288 ok	288 ok	288 ok	100%	269 ok	414 ok	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tagihan jasa air, listrik, telepon yang dibayarkan, Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia	104 rekening, 16 orang	36 rekening, 29 orang	36 rekening, 29 orang	36 rekening, 29 orang	100%	105rekening, 29 orang	105rekening, 29 orang	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa air yang dibayarkan	72 rekening	24 rekening	24 rekening	24 rekening	100%	48 rekening	48 rekening	100%
		Jumlah tagihan jasa listrik yang dibayarkan	72 rekening	24 rekening	24 rekening	24 rekening	100%	48 rekening	48 rekening	100%
		Jumlah tagihan jasa telephon yang dibayarkan	12 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100%	21 rekening	21 rekening	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia	23 orang	29 orang	29 orang	29 orang	100%	29 orang	29 orang	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara, Jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara, Jumlah gedung kantor yang terpelihara	34 unit, 6 jenis, 2 gedung kantor	3 unit, 6 jenis, 6 Jenis, 2 gedung kantor	3 unit, 6 jenis, 6 Jenis, 2 gedung kantor	3 unit,6 unit, 6 Jenis, 2 Gedung	100%	28 unit, 6 jenis,2 gedung kantor	34 unit, 6 jenis, 2 gedung kantor	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 unit	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan lapangan yang terpelihara	28 unit					28 unit	28 unit	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan lapangan yang terpelihara	28 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	28 unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeli haraan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
	Sub kagiatan Pemeliha raan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor	100%	1 gedung kantor	2 gedung kantor	100%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat beberapa capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target pada Tahun 2022 diantaranya yaitu :

1. Persentase ketersediaan RTH Publik. Realisasi sebesar 4, 23% dari target yang ditetapkan sebesar 4,4 %. Belum tercapainya target disebabkan karena belum maksimalnya penambahan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Salah satu upaya penambahan luas RTH adalah dengan pembangunan Taman. Di Tahun 2022 ditargetkan 4 lokasi pembangunan taman dan terealisasi sebanyak 3 lokasi. Walaupun telah dilakukan upaya pembangunan taman baru seluas 0. 124 Ha, namun belum memberikan nilai signifikan terhadap penambahan luas RTH Kota Padang Panjang. Keterbatasan lahan untuk penambahan RTH juga menjadi penyebab tidak tercapainya target.
2. Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dari target yang ditetapkan sebesar 73% terealisasi 82,72%. Realisasi yang lebih besar dari target menunjukkan bahwa belum maksimalnya penanganan sampah yang dilakukan serta tingginya timbulan sampah yang masuk ke TPA. Indikator ini seiring dengan capaian indikator Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Dari target 26% terealisasi 15,17%. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
3. Rasio rumah layak huni, dari target sebesar 95,24% telah terealisasi sebesar 95,22%. Realisasi kinerja ini didukung oleh pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023 dari 43 unit rehab rumah tidak layak huni yang ditargetkan, terealisasi 40 unit.

Sementara untuk kinerja lainnya sudah mencapai target yang ditetapkan, indikator yang telah mencapai target diantaranya :

1. Persentase pengurangan kawasan kumuh dari target sebesar 73, 58% telah tercapai 73, 97%. Tercapainya target ini karena adanya upaya penanganan kawasan kumuh melaui program KOTAKU.
2. Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard dari target sebesar 88% telah tercapai sebesar 88%. Tercapainya target karena adanya pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum berupa jalan, DAM dan drainase.
3. Persentase dokumen perencanaan lingkungan, dari target sebesar 100% telah terealisasi sebesar 100%. Tercapainya target ini dengan tersusunnya dokumen KLHS RPJMD dan KLHS Tata Ruang.

4. Jumlah penghargaan dibidang lingkungan hidup, dari target sebanyak 2 jenis, terealisasi sebanyak 2 jenis (Penghargaan Adipura dan sekolah Adiwiyata).
5. Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan, dari target sebesar 28, 57 terealisasi sebesar 28, 57. Tercapainya target ini dengan melihat kondisi air permukaan terutama sungai-sungai. Dua (2) sungai dari tujuh (7) sungai yang ada di padang panjang telah berstatus cemar ringan.
6. Persentase ketersediaan dokumen KEHATI, dari target sebesar 66% terealisasi 66%. Tercapainya target ini karena telah tersusunnya dokumen profil KEHATI dan Monitoring KEHATI.
7. Persentase pengelolaan limbah B3 Fasyankes, dari target sebesar 26-30 terealisasi 38%. Tercapainya target ini karena terlaksananya pembinaan terkait pengelolaan limbah B3 terhadap fasyankes. Tahun 2022 telah dilakukan pembinaan terhadap 28 fasyankes.
8. Tingkat ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dari target 60% terealisasi sebesar 60, 53%. Tercapainya target ini karena dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin SPPL.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdapat dua urusan wajib yaitu urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup. Urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib dengan kategori pelayanan dasar. Pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kabupaten/kota pada urusan ini terdiri dari dua bidang yaitu bidang perumahan rakyat dan bidang pekerjaan umum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan minimal di Bidang Perumahan Rakyat adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Masing-masing pelayanan diatas harus dilaksanakan setiap tahunnya dengan target capaian 100% per tahun.

Pembiayaan untuk pelaksanaan SPM diatas telah diakomodir melalui Renstra Dinas PerkimLH Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal Renja setiap tahunnya. Untuk Tahun 2024 sesuai dengan Renstra 2024-2026 diusulkan 1 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan untuk memfasilitasi pelaksanaan SPM. Sub Kegiatan tersebut berupa Pendataan Rumah di lokasi rawan bencana, Rehab rumah bagi korban bencana dan Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kota.

Sementara itu untuk kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup, tidak ada ketentuan pelaksanaan SPM tertentu semenjak Tahun 2014. Namun layanan informasi kualitas lingkungan sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM sebelumnya tetap disediakan melalui berbagai kegiatan terkait.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. Terdapat 7 (tujuh) indikator, 5 (lima) indikator terkait urusan perumahan permukiman dan 2 (dua) indikator terkait urusan lingkungan hidup. Indikator-indikator tersebut menggambarkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang harus dicapai.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No	INDIKATOR	SPM / standar nasional	IKK	TARGET RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%		82,29 %	84,38 %	86,80%			84, 23%	86,80%		-
4	Pengurangan kawasan kumuh	10%		48,80 %	73,95 %	81,76%	89,36%	95,74%	73,98%	81,76%	89,36%	95,74%
5	Persentase permukiman layak huni		90%	94,12 %	97,01 %	97,90%	98,80%	99,52%	97,01%	97,90%	98,80%	99,52%
6	Indek Kualitas Lingkungan (IKLH)		69,78	72, 42	72,65	72,87	66,60	66,76	66,60	72,87	66,60	66,76
a.	Indeks Kualitas Air (IKA)		46	55, 79	55,89	55,99	46, 07	46,50	46,07	55,99	46,07	46,50
b.	Indeks Kualitas Udara (IKU)			89	89, 11	89,22	91,29	91,29	91,29	89,22	91,29	91,29
c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			70,29	70,97	71,64	56,18	56,18	56,18	71,64	56,18	56,18
7	Berkurangnya Volume sampah yang masuk ke TPA		75%	74%	73%	72%	80%	79%	82,72%	73%	80%	79%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dua tahun terakhir dan proyeksi target dua tahun berikutnya. Capaian kinerja ini digambarkan melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
4. Pengurangan kawasan kumuh.
5. Persentase permukiman layak huni.
6. Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH), merupakan perhitungan secara proposional dari 3 indikator berikut :
   a. Indeks Kualitas Air (IKA).
   b. Indeks Kualitas Udara (IKU)
   c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
7. Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA.

Terdapat beberapa kinerja pelayanan yang belum mencapai target, diantaranya :

1. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Tahun 2022 dari target sebesar 84, 38% terealisasi 84, 23%. Hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 3 (tiga) unit.
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dua tahun terakhir belum mencapai target. IKLH merupakan penghitungan proporsi dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari tiga komponen perhitungan IKLH tersebut, baru Indeks Kualita Udara yang telah mencapai target. Sementara Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih dibawah target. Belum tercapainya target IKA karena masih tinggi nya pencemaran pada air sungai, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha sebagai sumber pencemar. Sementara IKTL belum mencapai target karena terbatasnya lahan untuk penambahan Ruang terbuka hijau.

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

2.2.1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Beberapa isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas Perangakat Daerah pada urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

1. **Potensi berkembangnya kawasan kumuh perkotaan akibat ketidak teraturan bangunan perumahan.**

   Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang, ditetapkan kawasan kumuh baru di Kota Padang Panjang seluas 47,718 Ha.Samapai Tahun 2022 telah tertangani seluas 35, 3008 Ha. Sebelumnya dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 050/357/WAKO-PP/2014 Tahun 2014 dimana luas kawasan kumuh adalah sebesar 53,06 Ha, dan telah berhasil dituntaskan sampai Tahun 2020. Dengan munculnya kawasan kumuh baru ini, maka upaya-upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilaksanakan, sekaligus mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh baru akibat perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

1. **Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni.**

   Sampai Tahun 2022 masih terdapat 368 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Angka ini berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan jumlah hunian dan juga tidak terpeliharanya bangunan rumah yang telah ada. Selain itu keterbatasan lahan untuk perumahan dan permukiman juga menjadi kendala dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Luas wilayah yang hanya 23 km2, diikuti dengan topografi yang didominasi kemiringan lebih dari 40%, menjadi batasan utama dalam pemanfaatan lahan di Kota Padang Panjang.

2. **Belum Optimalnya Penanganan rumah tidak layak huni.**

   Berdasarkan perhitungan Tahun 2021, ratio rumah layak huni di Kota Padang Panjang mencapai 94,96%. Hal ini berarti masih ada potensi Rumah Tidak Layak Huni sebesar 5,04%. Sampai Tahun 2021 terdapat 356 unit rumah tidak layak huni. Apabila tidak ada penanganan lebih lanjut, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni berpotensi memunculkan Kawasan Kumuh baru yang dapat berakibat pada penurunan kualitas hidup dan kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu jumlah Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH) berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

3. **Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman**

   Dengan adanya pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap perumahan terus meningkat. Penambahan perumahan dan permukiman ini, harus diiringi dengan penyediaan sarana prasarana umum (PSU) yang memadai. Salah satu sarana prasarana umum yang perlu mendapat perhatian yaitu saluran drainase. Curah hujan yang realtif tinggi di Kota Padang Panjang, kecenderungan pola pembangunan yang semakin mengurangi areal resapan air, berpotensi meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutam saluran drainase. Maka diperlukan upaya pemeliharaan saluran drainase terutama di kawasan permukiman.

2.2.2. Urusan Lingkungan Hidup

Sementara itu untuk urusan lingkungan hidup, beberapa isu strategis yang menyangkut dengan penyelenggaran tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. **Belum optimalnya penanganan pencemaran air permukaan.**

   Pada Tahun 2022, Indek Kualitas Air di Kota Padang Panjang berada pada angka 46, 07. Hal ini mengindikasikan tingkat pencemaran air yang masih buruk. Tahun 2022 dari 7 sungai yang ada di padang panjang, 5 (lima) sungai berada pada status cemar ringan, dua (2) sungai berstatus cemar sedang. Hal ini tentunya menuntut perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Daerah. Langkah-langkah komprehensif yang terpadu perlu dilakukan dengan seluruh sektor terkait, termasuk mengembangkan kerjasama pengelolaan sungai dengan kabupaten tetangga. Tingkat pencemaran air akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup daerah secara keseluruhan. Dari data indeks kualitas air juga dapat terlihat tingkat ketaatan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Data hasil pengawasan Tahun 2022 menunjukkan tingkat ketaatan yang masih rendah di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 62, 68.

2. **Belum Optimalnya penanganan sampah perkotaan**

   Data Tahun 2022 menunjukkan bahwa dari total timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Padang Panjang baru tertangani sebesar 82,72%. Sementara kemampuan TPA Sampah Sungai Andok yang dijadikan tempat pemrosesan akhir sampah semakin

menurun. Secara teknis diperkirakan TPA ini hanya mampu menampung sampah paling lama sampai Tahun 2022.

Sejalan dengan arahan dan target yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jakstrada Pengolahan Sampah Kota Padang Panjang, bahwa harus ada penurunan timbulan sampah dan perbaikan penanganan sampah dari tahun ke tahun. Apalagi. mengingat adanya keterbatasan pada ketersediaan lahan untuk TPA, maka upaya pengurangan timbulan sampah menjadi mutlak diperlukan.

1. **Belum Optimalnya Pengelolaan keanekaragaman Hayati**

   Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI) merupakan Program yang bertujuan untukmempertahankan kestabilan ekosistem, ketersediaan sumber pangan dan sarana edukasi masyarakat. Sampai saat ini Kota Padang Panjang belum memiliki Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI), karena keterbatasan lahan. Untuk Taman Keanekaragaman Hayati diperlukan lahan minimal seluas 3 Ha. Karena belum adanya taman KEHATI ini, maka pengelolaan Keanekaragaman Hayati baru dilakukan terbatas pada Ruang Terbuka Hijau yang ada yaitu seluas 26, 943 Ha.

2. **Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan**

   Salah satu sumber pencemaran air dan lingkungan adalah limbah dari usaha/kegiatan yang ada di Kota Padang Panjang. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan tersebut. Dari pengawasan yang dilakukan dapat dilihat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap kewajibannya terkait dokumen lingkungan. Tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun ketaatan ini perlu terus ditingkatkan, karena di Tahun 2022 ketaatan pelaku usaha/kegiatan sebesar 54,83%. Hal ini menunjukkan masih rendah nya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan, dalam artian masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang belum memenuhi kewajibannya terkait pengelolaan lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Mengacu pada Renstra 2024-2026, dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan rencana kegiatan dan analisis kebutuhan kemudian dimunculkan sejumlah program dan kegiatan beserta penganggarannya. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024

terdapat 14 Program, 25 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 14.966.051.416,-. Sementara Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 terdiri dari 14 Program, 24 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 24.250.962.021,-. Penambahan pagu merupakan penambahan usulan musrenbang dan pengadaan mesin pengolahan sampah dan pembuatan hanggar.

Perbedaan Rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisisi Kebutuhan ini disebabkan karena adanya penggabungan beberapa Sub Kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan. Selain itu terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yang dihilangkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah pada saat ini, sehingga perlu dilakukan efesiensi anggaran. Untuk Pagu Indikatif, rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2024 telah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang diperoleh dari hasil musrenbang.

Untuk lebih jelasnya review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	
1	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**				**14.966.051.416**				**29.931.462.022**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi**	90%	**5.738.872.195**		**Persentase pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi**	90%	**6.722.898.748**	
1	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu***	100%	**4.707.571.395**		***Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu***	100%	**5.335.622.000**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang	4.707.571.395	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang	5.335.622.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran***	90%	**238.500.000**		***Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran***	90%	**366.197.750**	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	70.000.000	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	78.811.200	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 paket	8.500.000	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 paket	8.508.300	
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	10.000.000	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	18.878.250	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1050 ok/300 kali	150.000.000	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1050 ok/300 kali	260.000.000	
1	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur***	90%	**50.000.000**		***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur***	90%	**72.999.998**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 orang	-	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 orang	23.000.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	50.000.000	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	49.999.998	
1	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah***	90%	**511.372.000**		***Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah***	90%	**630.724.000**	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	51.532.000	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	51.532.000	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	459.840.000	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	579.192.000	
1	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah***	90%	**231.428.800**		***Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah***	90%	**317.355.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	11.428.800	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	60.280.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	100.000.000	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	157.145.000	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 jenis	20.000.000	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 jenis	24.930.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	75.000.000	
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		**Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani**	**100%**	**300.435.280**		**Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani**	**100%**	**387.554.786**	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		**Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program**	**2 dokumen**	**10.000.000**		**Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program**	**2 dokumen**	**10.000.050**	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	5.000.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	-	
	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah di lokasi rawan Bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.000.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah di lokasi rawan Bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	10.000.050	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		**Jumlah rumah korban bencana dan terkena reloksi program pemerintah**	**4 unit**	**90.000.000**		**Jumlah rumah korban bencana dan terkena reloksi program pemerintah**	**4 unit**	**94.960.000**	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Padang Panjang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit	40.000.000	Padang Panjang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit	44.960.050	
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	50.000.000	Padang Panjang	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	49.999.950	

	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun**	1 dokumen	200.435.280		**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun**	1 dokumen	282.594.736	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen	200.435.280	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen	282.594.736	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**89,36**	**185.000.000**		**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**89,36**	**135.622.800**	
	Penataan dan Peningkatan Kulaitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia**	**2 dokumen**	**75.000.000**		**Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia**	**2 dokumen**	**98.710.600**	
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumen	50.000.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumen	98.710.600	
	Survei dan penetapan lokasi Perumahan dan permukiman kumuh	Padang Panjang	Jumlah hasil survey dan penetapan lokasi Perumahan dan permukiman kumuh	1 dokumen	25.000.000	Padang Panjang	Jumlah hasil survey dan penetapan lokasi Perumahan dan permukiman kumuh	1 dokumen	-	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh**	1 laporan	**110.000.000**		**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh**	1 laporan	**36.912.200**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	110.000.000	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	36.912.200	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		**Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard**	**69,85**	**95.040.000**		**Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard**	**69,85**	**5.117.375.043**	
	Penyelenggaraan PSU Permukiman		**Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian**	**2 kecamatan**	**95.040.000**		**Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian**	**2 kecamatan**	**5.117.375.043**	
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	95.040.000	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	5.117.375.043	
	Program Perumahan dan Kawasan PermukimanKumuh	Padang Panjang	Persentase Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	16,91	**50.000.000**	Padang Panjang	Persentase Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	16,91	**2.409.617.500**	

	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	70 unit	50.000.000		Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	70 unit	2.409.617.500	
	Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk Pecegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 Ha	Padang Panjang	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	70 unit	50.000.000	Padang Panjang	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	70 unit	2.409.617.500	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		**Persentase dokumen perencanaan lingkungan**	**100%**	**280.000.000**		**Persentase dokumen perencanaan lingkungan**	**100%**	**267.465.000**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**	**2 dokumen**	**280.000.000**		**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**	**2 dokumen**	**267.465.000**	
	Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RDTR yang disusun	1 dokumen	140.000.000	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RDTR yang disusun	1 dokumen	144.841.200	
	Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun	1 dokumen	140.000.000	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun	1 dokumen	122.623.800	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN		**Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani**	**100%**	**40.000.000**		**Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani**	**100%**	**19.723.600**	
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**5 dokumen**	**40.000.000**		**Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**5 dokumen**	**19.723.600**	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	5 dokumen	20.000.000	Padang Panjang	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	5 dokumen	11.103.500	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	5 dokumen	20.000.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	5 dokumen	8.620.100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		**Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan**	**55%**	**60.000.000**		**Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan**	**55%**	**23.685.500**	

	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	60.000.000		Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	23.585.500	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsinal PPLHD	2 orang	20.000.000	Padang Panjang	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsinal PPLHD	2 orang	-	
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 laporan	20.000.000	Padang Panjang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 laporan	23.585.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	5 dokumen	20.000.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	5 dokumen	-	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		**Jumlah jenis koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan MHA**	**3 jenis**	**20.000.000**		**Jumlah jenis koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan MHA**	**3 jenis**	**19.999.950**	
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)**	**1 Dokumen**	**20.000.000**		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)**	**1 Dokumen**	**19.999.950**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 Dokumen	20.000.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 Dokumen	19.999.950	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**100**	**100.000.000**		**Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**100**	**74.000.000**	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana**	**3 jenis kegiatan**	**100.000.000**		**Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana**	**3 jenis kegiatan**	**74.000.000**	

	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Padang Panjang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	1 kelompok masyarakat	40.000.000	Padang Panjang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	1 kelompok masyarakat	34.000.000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	3 kali pendampingan	30.000.000	Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	3 kali pendampingan	30.000.000	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	16 kelompok masyarakat	30.000.000	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	16 kelompok masyarakat	10.000.000	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**1 jenis**	**40.800.000**		**Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**1 jenis**	**93.362.950**	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja**	**1 kelompok**	**40.800.000**		**Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja**	**1 kelompok**	**93.362.950**	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	40.800.000	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	93.362.950	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		**Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100%**	**328.864.040**		**Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100%**	**443.900.650**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		***Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan***	**2 jenis**	**308.864.040**		***Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan***	**2 jenis**	**425.773.150**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	25.000.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	16.010.300	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	10.000.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	28.797.500	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 jenis	273.864.040	Padang Panjang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 jenis	380.965.350	

	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		***Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan***	**1 jenis**	**20.000.000**		***Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan***	**1 jenis**	**18.127.500**	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 kali	20.000.000	Padang Panjang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 kali	18.127.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		**Persentase pengelolaan RTH Publik**	**100%**	**1.779.878.101**		**Persentase pengelolaan RTH Publik**	**100%**	**2.076.565.550**	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		**Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola**	**2 kecamatan**	**1.779.878.101**		**Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola**	**2 kecamatan**	**2.076.565.550**	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Padang Panjang	Luas RTH Publik yang dikelola	53 Ha	1.759.878.101	Padang Panjang	Luas RTH Publik yang dikelola	53 Ha	2.048.438.550	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 orang	20.000.000	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 orang	28.127.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		**Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3**	**32%**	**35.000.000**		**Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3**	**32%**	**20.963.900**	
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		***Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3***	**2 kali**	**25.000.000**		***Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3***	**2 kali**	**14.530.500**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	25.000.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	14.530.500	
	Penyimpanan sementara Limbah B3		***Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan***	**24**	**10.000.000**		***Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan***	**24**	**6.433.400**	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Padang Panjang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 laporan	10.000.000	Padang Panjang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 laporan	6.433.400	

	PROGRAM PENGOLAHAN PERSAMPAHAN		***Persentase pengelolaan sampah***	**98**	**5.912.161.800**		***Persentase pengelolaan sampah***	**98**	**12.118.826.045**	
	Pengelolaan Sampah		***Persentase penanganan sampah***	**80**	**5.897.161.800**		***Persentase penanganan sampah***	**80**	**12.118.826.045**	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.000 - 20.000 ton/tahun	4.847.161.800	Padang Panjang	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.000 - 20.000 ton/tahun	5.947.180.576	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 bank sampah	20.000.000	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 bank sampah	40.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	30.000.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	9.150.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	21 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah,6 betor, 1 pic up sampah, mesin pyrolisis)	1.000.000.000	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	21 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah,6 betor, 1 pic up sampah, mesin pyrolisis)	6.122.495.469	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		***Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi***		**15.000.000**		***Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi***		-	
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		15.000.000	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		-	

Sumber Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada rancangan awal diusulkan pagu sebesar Rp. 14.966.051.416,- dan pada rancangan akhir dengan penambahan pokir dan musrenbang pagu menjadi Rp. 29.931.462.022,-. Dimana anggaran untuk Pokir sebesar Rp 1. 224.000.000,-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mengakomodir porgram/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, perguruan tinggi melalui pelaksanaan musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan musrenbang RKPD Kota. Usulan Musrenbang yang diakomodir dalam rancangan Renja Akhir Tahun 2024 adalah usulan yang telah melalui proses investigasi (penelitian lapangan) dan verifikasi di tingkat kecamatan, Bappeda dan Perangkat Daerah tujuan.

Selain usulan Musrenbang, Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 juga mengakomodir hasil reses DPRD berupa pokok-pokok pikiran Anggota DPRD tersebut sesuai dengan tupoksi yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengakomodir usulan Musrenbang dan Pokir DPRD, diantaranya :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Terdapat 12 usulan musrenbang dan 31 Pokir terkait penyediaan PSU di kawasan permukiman berupa perbaikan dan pembangunan bangunan pengaman, perbaikan jalan lingkungan serta pembangunan dan perbaikan saluran drainase di kawasan permukiman.
2. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha. Terdapat 161 usulan pokir terkait bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Usulan hasil Musrenbang dan pokok pikiran yang terakomodir pada rancangan akhir Renja 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
	Musrenbang				
I	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard**		
I	**Penyelenggaraan PSU Permukiman**		**Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian**	**12 lokasi**	
1	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	12 lokasi	
A	Belanja Modal Jalan Kota				
1	Lanjutan Pembangunan Jalan Setapak di RT 1 disamping Azzura sepanjang 250 m, Lebar 4m,	Kel. Ekor Lubuk	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Ekor Lubuk
2	Pemasangan Paving Slabs dengan panjang 270 m dan lebar2m	Kel. Ngalau	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Ngalau
3	Pemasangan Paving Slabs dengan panjang 100 m dan lebar2m	Kel. Ngalau	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Ngalau
4	Peningkatan jalan lingkungan sepanjang 300m di kelurahan koto panjang	Kel. Koto Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Koto Panjang
5	Lanjutan Pembangunan Jalan Setapak di RT 8 mulai dari sosokan sampai lasuang baruah sepanjang 200m lebar 3m	Kel. Ekor Lubuk	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Ekor Lubuk
6	Pembangunan jalan setapak baru di RT 03 dan RT 20 sepanjang 200m di kelurahan Koto Panjang	Kel. Koto Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Koto Panjang
B	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi				
1	Pembuatan drainase cor bertulang sepanjang 23 m	Kel. Tanah Pak Lambik	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Tanah Pak Lambik
2	Pembangunan/perbaikan drainase sepanjang 600m di kelurahan tanah hitam	Kel. Tanah Hitam	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Tanah Hitam
3	Pembangunan riol ke saluran utama sepanjang 300m di kelurahan Ngalau	Kel. Ngalau	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Ngalau
4	Pembuatan drainase dibawah jalan setapak sepanjang 300m di kelurahan pasar usang	Kel. Pasar Usang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Pasar Usang

5	Pembuatan drainase sepanjang 250 m dikelurahan balai-balai	Kel. Balai-balai	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Balai-balai
C	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				
1	Dam tebing sepanjang 50m di kelurahan Silaing Atas	Kel. Silaiang Bawah	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Hasil Musrenbang Kel. Silaing Bawah

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
	Pokok Pikiran Anggota DPRD				
I	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard**		
1	**Penyelenggaraan PSU Permukiman**		**Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian**	**30 lokasi**	
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	30 lokasi	
1	Jalan belum di cor/bantuan pengecoran lingkungan (Rabat Beton)	Kel. Silaing Bawah	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yandra Yane, SE
2	Rencana Pengedaman tebing dikarenakan sering terjadinya longsor saat hujan	Kel. Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Micko Kirstie, S.Psi
3	sering terjadinya longsor saat hujan dan terhambatnya aktivitas masyarakat	Kel. Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Micko Kirstie, S.Psi
4	peningkatan dan pelebaran jalan setapak	Kel. Sigando	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Kiki Anugerah Dia, SE
5	Rawan akan terjadinya longsor	Kel. Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Micko Kirstie, S.Psi
6	sering terjadinya longsor saat hujan dan terhambatnya aktivitas masyarakat	Kel. Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Micko Kirstie, S.Psi
7	taman bermain anak TBM	Kel. Ngalau	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Kiki Anugerah Dia, SE
8	pemasangan Pavin Blok	Kel. Sigando	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Kiki Anugerah Dia, SE
9	terjadinya banjir karena aliran tidak lancar, perbaikan selokan di komplek silaing glas	Kel. Silaing Bawah	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yandra Yane, SE
10	Belum di DAM (bukti menyusul)	Kel. Silaing Bawah	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HUKEMRI

11	Belum ada riol (bukti menyusul)	Kel. Silaing Bawah	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HUKEMRI
12	pengedaman bahu jalan dan pembuatan riol	Kel. Koto Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yulius Kaisar
13	pengembangan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat	Kel. Tanah Hitam	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
14	lanjutan pendaman tebing	Kel. Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yudha Prasetia
15	Lanjutan Pemasangan Paving Slab	Kel. Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yudha Prasetia
16	Lanjutan pendaman tebing	Kel. Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yudha Prasetia
17	Lanjutan pengecoran jalan setapak dan pengecoran bandar bertulang	Kel. Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yudha Prasetia
18	Lanjutan penambahan batu andesit pada trotoar di RT. 9 Kel. Silaing bawah atau jalan menuju SMA 3	Kel. Silaing Bawah	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
19	Diperlukan perbaikan riol di gang caleg RT. 16 karena jika hujan air sering meluap	Kel. Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Mahdelmi S.Sos
20	Belum di DAM / DAM kuburan pengaman longsor	Kel. Ganting	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Zulfikri, SE
21	Jalan rusak/pembangunan jalan setapak	Kel. Ganting	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Zulfikri, SE
22	pengerasan jalan/pemasangan paving blok (200 Jt)	Kel. Bukit Surungan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. RIZA ADITYA NUGRAHA, SH
23	pembuatan riol dan pemasangan paving slab	Kel. Guguk malintang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yulius Kaisar
24	pengecoran dan pendaman badan jalan serta bahu jalan	Kel. Koto Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yulius Kaisar
25	lanjutan jalan setapak	Kel. Guguk malintang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Yulius Kaisar
26	pembuatan drainase	Kel. Guguk malintang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yulius Kaisar

27	pendaman dekat tanah pekuburan	Kel. Guguk malintang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yulius Kaisar
28	pembuatan riol	Kel. Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Pan jang An.Yudha Prasetia
29	Belum adanya riol dan diperlukannya pembutan riol/saluran air	Kel. Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Micko Kirstie, S.Psi
30	jalan setapak di lingkungan pemukiman warga RT. X Kel. Silaing bawah sudah rusak dan licin, karena itu perlu diganti paving blok berwarna agar aman dan nyaman	Kel. Silaing Bawah	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
	Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh		**Persentase peningkatan kualitas rumah tidak layak huni**	16,91	
	Pencegahan perumahan dan kawasan Permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		**jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha**	161 unit	
	Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	161 unit	
1	Masyarakat a.n Ria Delfitri Remita butuh bantuan bedah rumah	Kel.Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. RIZA ADITYA NUGRAHA, SH
2	Dibutuhkan bantuan bedah rumah a.n Endang Yuni Yanti	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
3	Masyarakat a.n Effendi butuh bantuan bedah rumah	Kel.Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. RIZA ADITYA NUGRAHA, SH
4	Masyarakat a.n Rio Saputra butuh bantuan bedah rumah	Kel.Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. RIZA ADITYA NUGRAHA, SH
5	Masyarakat a.n Andre Wijaya butuh bantuan bedah rumah	Kel.Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. RIZA ADITYA NUGRAHA, SH
6	Masyarakat a.n Misralini butuh bantuan bedah rumah	Kel.Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. RIZA ADITYA NUGRAHA, SH

7	Memohon bantuan rehabilitasi rumah a.n Agusman	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HERMAN
8	Rumah masyarakat a.n Selfi tidak layak huni	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Kiki Anugerah Dia, SE
9	Rumah tidak layak huni a.n Algumeri, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
10	masyarakat atas nama Syamsidar memiliki rumah tidak layak huni	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IDRIS
11	memohon bantuan bedah rumah a.n Dewi Kumala	Kel. Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Drs. NASRUL EFENDI
12	Rumah tidak layak huni atas nama Iska Susanti	Kel. Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HENDRA SAPUTRA, SH
13	Rumah yang tidak layak huni atas nama Syafri	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HENDRA SAPUTRA, SH
14	Rumah yang tidak layak huni atas nama Erisma	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HENDRA SAPUTRA, SH
15	Rumah yang tidak layak huni atas nama Feri Sukma	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HENDRA SAPUTRA, SH
16	Rumah yang tidak layak huni atas nama Veniarti	Kel. Koto Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HENDRA SAPUTRA, SH
17	Rumah tidak layak huni/bantuan bedah rumah a.n Nuraini	Kel. Balai-balai	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yandra Yane, SE
18	Rumah yang tidak layak huni atas nama Hepi Wirta	Kel. Balai-balai	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HENDRA SAPUTRA, SH
19	Dibutuhkan bantuan bedah rumah a.n Rina Lestari	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom

20	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah a.n Rita Bakri	Kel.Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HUKEMRI
21	Rumah masyarakat a.n Ardi Murfi tidak layak untuk ditempati	Kel.Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
22	Masyrakat a.n Okrina Rumelda butuh bantuan bedah rumah	Kel. Guguk malintang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yulius Kaisar
23	Rumah yang tidak layak huni atas nama Maslinda Yani	Kel. Balai-balai	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HENDRA SAPUTRA, SH
24	Memohon bantuan bedah rumah a.n Agusman	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. PUJI HASTUTI, A.Md
25	Rumah tidak layak huni atas nama Sri Mulyati	Kel. Ganting	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HENDRA SAPUTRA, SH
26	Masyarakat a.n Nila Okta Sari butuh bantuan bedah rumah	Kel.Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yudha Prasetia
27	Rumah yang tidak layak huni atas nama Asnedi	Kel.Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HENDRA SAPUTRA, SH
28	Rumah tidak layak huni a.n Ardianis, aggaran Rp. 15.000.000	Kel. Koto Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
29	Rumah tidak layak huni a.n Erni, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ganting	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
30	Rumah tidak layak huni a.n Eva Nurwati, anggaram Rp. 15.000.000	Kel. Koto Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
31	Rumah tidak layak huni a.n Julnalisman, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
32	Rumah tidak layak huni a.n Handayani, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si

33	Rumah tidak layak huni a.n Misnar, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
34	Rumah tidak layak huni a.n Desi Warni, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
35	Rumah tidak layak huni a.n Aprimen, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
36	Rumah tidak layak huni a.n Azhar, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
37	Rumah tidak layak huni a.n Syamsinar, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
38	Rumah tidak layak huni a.n Ida Yunida, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
39	Rumah tidak layak huni a.n Risna Hayati, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ganting	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
40	Masyrakat a.n Meri Oktaveni butuh bantuan bedah rumah	Kel. Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yudha Prasetia
41	Rumah tidak layak huni atas nama Suardi	Kel.Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HENDRA SAPUTRA, SH
42	Rumah Masyarakat atas nama Rosna tidak layak untuk ditempati	kel.silaing atas	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Micko Kirstie, S.Psi
43	Rumah a.n Basri warga RT. 7 Kel. Silaing Bawah yang sudah tidak layak huni, untuk itu perlu perbaikan dari rumah tersebut	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Mahdelmi S.Sos
44	masyarakat a.n Jamalis butuh bantuan bedah rumah	Kel. Bukit Surungan	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. RIZA ADITYA NUGRAHA, SH
45	Rumah Masyarakat A.n Suwasti tidak layak huni	Kel. Ganting	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Kiki Anugerah Dia, SE

46	memohon bantuan bedah rumah a.n Farni Ermila	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HERMAN
47	Masyarakat atas nama Reni Marlina memiliki rumah yang tidak layak huni	Kel. Balai-balai	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HENDRA SAPUTRA, SH
48	memohon bantuan bedah rumah atas nama Putra Restianda	kel pasar usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HERMAN
49	memohon bantuan bedah rumah atas nama Sulastri	kel pasar usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HERMAN
50	Rumah masyarakat a.n Afrizal tidak layak huni	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Kiki Anugerah Dia, SE
51	memohon bantuan rehabilitasi rumah atas nama Zainita Afrida	kel pasar usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HERMAN
52	Memohon bantuan bedah rumah atas nama Kamisnar	kel pasar usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HERMAN
53	Rumah masyarakat a.n Jurnalisman tidak layak huni	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Kiki Anugerah Dia, SE
54	memohon bantuan rehabiliasi rumah atas nama Rahman Setiawan	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HERMAN
55	Memohon bantuan bedah rumah atas nama Azwir	Kel. Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HERMAN
56	memohon bantuan bedah rumahh atas nama Dasril	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HERMAN
57	Masyarakat a.n Desi Arianti butuh bantuan bedah rumah	Kel. Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yudha Prasetia
58	masyarakat a n Gusnellian butuh bantuan bedah rumah	Kel. Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yudha Prasetia

59	Rumah tidak layak huni a.n Ade Putra, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
60	Rumah tidak layak huni a.n Asha Yendria Novita, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
61	Rumah tidak layak huni a.n Jusnidar, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
62	Rumah tidak layak huni a.n Desfanilla, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
63	Diperlukan bantuan bedah rumah warga yang sudah tidak layak huni a.n Zurnalis, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
64	Rumah tidak layak huni a.n Asnidar, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
65	Rumah tidak layak huni a.n Yuniar, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
66	Rumah tidak layak huni a.n Aidil Fitri, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
67	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah a.n Jusmaini	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yandra Yane, SE
68	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah a.n Anizar	Kel. Koto Katik	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. MARDIANSYAH, A.Md
69	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah a.n Asriwati	Kel. Koto Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. MARDIANSYAH, A.Md
70	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah a.n Marlis	Kel. Koto Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. MARDIANSYAH, A.Md
71	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah a.n Deni Susanti	Kel. Koto Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. MARDIANSYAH, A.Md

72	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah a.n Rosi Layenti	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HUKEMRI
73	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah a.n Fiqih Febrian Pratama	Kel. Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HUKEMRI
74	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah a.n Khairul	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HUKEMRI
75	Memohon bantuan bedah rumah atas nama Yulia	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. PUJI HASTUTI, A.Md
76	Rumah tidak layak huni/bantuan bedah rumah a.n Detti Suryani	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HUKEMRI
77	Rumah tidak layak huni/bantuan bedah rumah a.n Yusrizal	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HUKEMRI
78	Memohon bantuan bedah rumah atas nama Ellyanis	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. PUJI HASTUTI, A.Md
79	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah a.n Dayat Efendi	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HUKEMRI
80	Meminta bantuan bedah rumah atas nama Misra	kel.ekor lubuk	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. PUJI HASTUTI, A.Md
81	memohon bantuan bedah rumah yang saya tempati atas nama Yuniar	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. PUJI HASTUTI, A.Md
82	Dibutuhkan bantuan bedah rumah a.n Handriyanto	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
83	Dibutuhkan bantuan bedah rumah a.n Lias Hengki Herdianto	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
84	Dibutuhkan bantuan bedah rumah a.n Fitri Rahmadani	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom

85	Dibutuhkan bantuan bedah rumah a.n Irwan	Kel. Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
86	Dibutuhkan bantuan bedah rumah a.n Kasmi	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
87	Dibutuhkan bantuan bedah rumah a.n Melwandi	Kel. Bukit Surungan	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
88	Masyarakat a.n Mulyati butuh bantuan bedah rumah	Kel. Guguk malintang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yulius Kaisar
89	Masyarakat a.n Esy Rosita butuh bantuan bedah rumah	Kel. Koto Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Yulius Kaisar
90	Bantuan bedah rumah Sridareni tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
91	Rumah masyarakat atas nama Ridwan tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
92	Rumah masyarakat atas nama Saranih tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
93	Rumah masyarakat atas nama Suratmi tidak layak untuk ditempati	Kel. Balai-balai	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
94	Rumah masyarakat atas nama Musmulyadi tidak layak untuk ditempati	Kel. Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
95	Rumah masyarakat atas nama Nurafni tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
96	Rumah masyarakat atas nama Sukardi tidak layak untuk ditempati	Kel. Koto Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
97	Rumah masyarakat atas nama Zulyetti tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E

98	Rumah masyarakat atas nama Nona Antika Sari tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
99	Rumah masyarakat atas nama Marda Linda tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
100	Rumah masyarakat atas nama Muharam tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
101	Rumah masyarakat atas nama Dewi Anggra Yeni tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
102	Rumah masyarakat atas nama Lenny Sylvia tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
103	Rumah masyarakat atas nama Titi Hendriati tidak layak untuk ditempati	Kel. Bukit Surungan	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
104	Rumah masyarakat atas nama Armaini tidak layak untuk ditempati	Kel. Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
105	Rumah masyarakat atas nama Rifli Arif tidak layak untuk ditempati	Kel. Bukit Surungan	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
106	Rumah masyarakat atas nama Evi Erra tidak layak untuk ditempati	Kel. Bukit Surungan	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
107	Rumah masyarakat atas nama Nurfirma tidak layak untuk ditempati	Kel. Bukit Surungan	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
108	Rumah masyarakat atas nama Iskandar tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
109	Rumah masyarakat atas nama Yuliyasman tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
110	Rumah masyarakat atas nama Aswir tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E

111	Rumah masyarakat atas nama Widiya Andesta tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
112	Rumah masyarakat atas nama Erma Z Karim tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
113	Rumah masyarakat atas nama Nurmansyah tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
114	Rumah masyarakat atas nama Dedy Hendri tidak layak untuk ditempati	kel. Silaing Atas	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
115	Rumah masyarakat atas nama Peri tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
116	Rumah masyarakat atas nama RIKI JUNAIDI tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
117	Rumah masyarakat atas nama ROSNIWATI tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
118	Rumah masyarakat atas nama DAIYAR tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
119	Bantuan bedah rumah DESMAWATI tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IMBRAL, S.E
120	Perlunya bantuan bedah rumah a.n Sastra Muis	Kel. Bukit Surungan	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Mahdelmi S.Sos
121	Masyarakat atas nama DITA FIRMAYENI memiliki rumah yang tidak layak huni	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. ADITIAWARMAN
122	Masyarakat atas nama ERNI SAFITRI memiliki rumah yang tidak layak huni	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. ADITIAWARMAN
123	Masyarakat atas nama ERDAWATI memiliki rumah yang tidak layak huni	kel. Ekor lubuk	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. ADITIAWARMAN

124	Masyarakat atas nama YESI RAHMAYENI memiliki rumah yang tidak layak huni	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. ADITIAWARMAN
125	Masyarakat atas nama SUARNI memiliki rumah yang tidak layak huni	Kel. Ganting	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. ADITIAWARMAN
126	Masyarakat atas nama NURLINDA memiliki rumah yang tidak layak huni	kel. Ekor lubuk	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. ADITIAWARMAN
127	Masyarakat atas nama ULFI RAHMI memiliki rumah yang tidak layak huni	kel. Ekor lubuk	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. ADITIAWARMAN
128	Dibutuhkan bantuan bedah rumah a.n Hasdawismar	Kel. Bukit Surungan	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
129	Rumah Masyarakat a.n NUZIRWAN tidak layak huni	Kel. Ganting	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Kiki Anugerah Dia, SE
130	Masyarakat atas nama NURLELA memiliki rumah yang tidak layak huni	Kel.Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An H. NASRULLAH NUKMAN, SH
131	memohon bantuan rehabilitasi rumah atas nama ANWAR	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An HERMAN
132	Memohon bantuan bedah rumah atas nama YULI FANDRA PUTRA	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An HERMAN
133	Masyarakat a.n Mujiono butuh bantuan bedah rumah	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Yudha Prasetia
134	Memohon bantuan bedah rumah atas nama MISNAR	kel. sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An PUJI HASTUTI, A.Md
135	Dibutuhkan bantuan bedah rumah a.n Maidasril	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
136	Dibutuhkan bantuan bedah rumah a.n Rossy Surya Nengsih	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom

137	Dibutuhkan bantuan bedah rumah A.n Kamisnar	Kel. Pasar Usang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
138	Rumah tidak layak huni A.n Ellyanis, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
139	Rumah tidak layak huni A.n Yulia, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
140	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah A.n NUR EVA	Kel. Koto Katik	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An MARDIANSYAH, A.Md
141	Rumah tidak layak huni / bantuan bedah rumah A.n MUHAMMAD FAUZAN	Kel. Guguk malintang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An MARDIANSYAH, A.Md
142	Rumah tidak layak huni atas nama Toni Dian	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An HENDRA SAPUTRA, SH
143	Rumah yang tidak layak huni atas nama Sutrisno	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An HENDRA SAPUTRA, SH
144	Rumah tidak layak huni A.n Esy, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Koto Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
145	Rumah tidak layak huni A.n Multi Hardjadi, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Sigando	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
146	Rumah tidak layak huni A.n Slamet Suwito, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Koto Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
147	Rumah tidak layak huni A.n Fitri Yeni, anggaran Rp. 15.000.000	kel. ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
148	Rumah tidak layak huni A.n Zuraida, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ngalau	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si
149	Rumah tidak layak huni A.n Nurfadila, anggaran Rp. 15.000.000	Kel. Ganting	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Dr. H. NOVI HENDRI, SE., M.Si

150	Rumah masyarakat atas nama YUSNIMAR tidak layak	Kel. Balai-balai	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An IMBRAL, S.E
151	Rumah Masyarakat atas nama MIMI ARIANI tidak layak untuk ditempati	Kel. Kampung Manggis	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Micko Kirstie, S.Psi
152	Rumah tidak layak huni/bantuan bedah rumah A.n NOFRIZAL ANAS	Kel. Ganting	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An Zulfikri, SE
153	Bantuan bedah rumah AGUSMAN tidak layak untuk ditempati	kel. Ekor lubuk	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An IMBRAL, S.E
154	Rumah masyarakat atas nama MISWARTI tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An IMBRAL, S.E
155	Rumah masyarakat atas nama ARMI tidak layak untuk ditempati	Kel. Silaing Bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An IMBRAL, S.E
156	Rumah masyarakat atas nama JESSIKA FERNANDES tidak layak untuk ditempati	kel.silaing bawah	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An IMBRAL, S.E
157	Rumah masyarakat atas nama NURAINI tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An IMBRAL, S.E
158	Rumah masyarakat atas nama RAHAYU HANDAYANI tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An IMBRAL, S.E
159	Rumah masyarakat atas nama NURJANII tidak layak untuk ditempati	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An IMBRAL, S.E
160	Rumah tidak layak huni/ bantuan bedah rumah A.n RASIMA	Kel. Tanah Hitam	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An HUKEMRI
161	Rumah tidak layak huni/bantuan bedah rumah RAJU MURI	kel. Pasar Baru	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1 unit	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An HUKEMRI

Sumber Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Renja Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan Kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	
2	Menurunnya kawasan kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh	83%	
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio Rumah layak huni	56, 93%	
4	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Nasional Urusan Lingkungan Hidup

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,65 poin	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekren bang Tahun 2022 dan Kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya penanggungjawab usaha yang taat terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	68%	
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah, meliputi : a. Persentase pengurangan timbulan sampah c. Persentase penanganan timbulan sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota, meliputi: b. Persentase pengurangan timbulan sampah d. Persentase penanganan timbulan sampah	 11,18 31,41	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Beberapa indikator pada prioritas dan sasaran pembangunan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal di Daerah yaitu (1) Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni; dan (2) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Target capaian dari masing-masing indikator tersebut pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Untuk dapat mewujudkan target tersebut Pemerintah Daerah perlu menyiapkan beberapa

alternatif kebijakan diantaranya penyediaan hunian baru pelaksanaan rehabilitasi hunian atau penyediaan penampungan sementara yang layak huni.

Dalam hal penanganan kawasan kumuh, di Kota Padang Panjang telah ditetapkan kawasan kumuh seluas 47,718 Ha melalui Keputusan Walikota Nomor 189 Tahun 2020.Oleh karena itu kebijakan penanganan kawasan ini secara terpadu dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk dapat dituntaskan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam hal memenuhi ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat, Pemerintah Kota Padang Panjang juga perlu menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan Nasional yakni meningkatkan jumlah rumah layak huni. Jika secara nasional ditargetkan pengurangan rumah tidak layak huni mencapai 205.225 unit pada Tahun 2024, maka Kota Padang Panjang juga perlu menerapkan kebijakan serupa di level daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Kondisi sampai dengan akhir Tahun 2022 menunjukkan data jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang sebanyak 368 unit.

Sementara itu dengan ditetapkannya target nasional berupa peningkatan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman sebesar 100% pada Tahun 2024, maka daerah perlu mendukungnya dengan menyiapkan kebijakan berupa pembangunan PSU baru maupun peningkatan kualitas PSU yang telah tersedia.

Untuk urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020.Terdapat prioritas nasional yang terkait dengan KLHK, arah kebijakan dan strategi dalam prioritas tersebut terdiri dari 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3) pembangunan rendah karbon.

Sementara untuk Tahun 2023, prioritas pembangunan nasional pada urusan lingkungan hidup mengarah pada 3 kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2.Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih menjadi prioritas yang muncul setiap tahunnya. Kebijakan ini diperlukan sebagai fungsi kontrol terhadap munculnya dampak akibat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Target IKLH nasional yang ditetapkan sebesar 69,48 poin, harus dicapai dengan memastikan perbaikan terhadap kualitas air, udara dan lahan. Untuk Kota Padang Panjang, berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan, maka prioritas utama perlu diarahkan pada perbaikan kualitas air.

Peningkatan kualitas lingkungan tidak bisa terlepas dari peran berbagai *stakeholder*. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kondisi kualitas lingkungan. Ada sejumlah indikator yang perlu dipantau melalui instrumen izin lingkungan, izin PPLH ataupun izin lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu disiapkan berbagai upaya yang dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap ketentuan perizinan lingkungan.

Kinerja berikutnya yang menjadi prioritas pada pembangunan nasional adalah pengelolaan persampahan. Sejalan dengan telah ditetapkannya kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) dibidang persampahan, maka fokus pengelolaan sampah diarahkan pada penurunan timbulan dan penanganan sampah. Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 telah menyikapi kebijakan tersebut melalui penetapan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk Tahun 2023 ditargetkan pengurangan timbulan sampah sebesar 27% dan penanganan sampah sebesar 72%.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

1) Tujuan

1. Terbangunnya infrastruktur layanan dasar perkotaan yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan
3. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran

2) Sasaran

Tujuan pertama dijabarkan menjadi satu sasaran yaitu :

(1) Meningkatnya Kualitas lingkungan permukiman; dan

Tujuan kedua terdiri dari satu sasaran yaitu:

(1) (3) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Sementara Tujuan ketiga terdiri dari satu sasaran yaitu :

(2) Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman

3) Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target 2024	Sumber Data	OPD
	Persentase permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{luas permukiman seluruhnya}} \times 100\%$	98,80%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase pengurangan kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh yang tertangani}}{\text{luas kawasan Kumuh keseluruhan}} \times 100\%$	89,36%	KOTAKU	Dinas PerkimLH

	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah PSU yang sesuai standar}}{\text{Jumlah PSU yang ada}} \times 100\%$	86,24%	Hasil Survey	Dinas PerkimLH
	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani		100%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah rumah secara keselurahan}} \times 100\%$	96,63%	Hasil Survey	Dinas PerkimLH

Urusan Lingkungan Hidup

	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	$\frac{\text{Capaian upaya pengelolaan LH}}{\text{Jumlah upaya pengelolaan LH}} \times 100\%$	78%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan dokumen lingkungan yang mesti ada}} \times 100\%$	100%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani}} \times 100\%$	100%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	$\frac{\text{Jumlah usaha yang melanggar}}{\text{Jumlah usaha yang diawasi}} \times 100\%$	54,83%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase cakupan fasilitasi MHA terkait PPLH	$\frac{\text{fasilitasi MHA yang dilakukan}}{\text{fasilitasi MHA yang seharusnya dilakukan}} \times 100\%$	50%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	$\frac{\text{Penyuluhan lingkungan yang dilakukan}}{\text{Penyuluhan lingkungan yang seharusnya dilakukan}} \times 100\%$	100%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah penghargaan yang diperoleh	1 jenis	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	$\frac{\text{Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan}}{\text{Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang seharusnya dilakukan}} \times 100\%$	100%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase luas RTH Publik	$\frac{\text{Total luas RTH publik tahun n}}{\text{Luas wilayah terbangun tahun n}} \times 100\%$	4,23%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	$\frac{\text{Jumlah pembinaan dan verifikasi lapangan terhadap pelaku usaha dan kegiatan tahun n}}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha dan kegiatan yang mendapat SPPL tahun n}} \times 100\%$	32%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase pengelolaan sampah	%penanganan sampah+%pengurangan sampah	97,98%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang muncul pada Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada dasarnya adalah program kegiatan yang telah tercakup pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan RPD Kota Padang Panjang 2024-2026. Perumusan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan , kebijakan nasional dan daerah dalam bidang Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, kecenderungan kualitas lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka telah dilakukan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RPJMD, yang menjadi pedoman penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Renja Tahun 2024.

Mengacu pada RPD, terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan diantaranya (1) Terbangunnya infrastruktur layanan dasar perkotaan yang berkualitas dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perkim dan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Udara (IKU). Menyikapi kebijakan tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengembangan Perumahan untuk mendukung pencapaian target IKLI Perkim . (2) Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan dengan indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualiras Udara. Untuk mendukung capaian target IKA, IKTL dan IKU program yang disiapkan adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan Program Pengelolaan Persampahan. (3) Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan indikator Angka kemiskinan. Untuk mendukung capaian target ini disiapkan Program Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Selain mendukung pencapaian target IKLH, pada keempat program tersebut juga diarahkan untuk mendukung capaian target Kebijakan Nasional pada Urusan Lingkungan Hidup yang mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan pembangunan rendah karbon.

Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diajukan dalam Renja 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 3.4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA PADANG PANJANG

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				**29.931.462.022**					**14.722.561.416**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**14.773.068.977**					**6.430.867.475**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup**		**90 Persen**	**6.827.858.798**			**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup**	**90 Persen**	**5.780.422.195**
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**		**100 persen**	**5.335.622.000**			**Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu**	**100 persen**	**4.707.571.395**
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672 Orang/bulan	5.335.622.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	672 Orang/bulan	4.707.571.395
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**		**100 persen**	**23.000.000**			**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	-
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Paket	23.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-

1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**		**90 persen**	**366.197.750**			**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 persen**	**310.050.000**
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	8.508.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	11.050.000
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	78.811.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	91.000.000
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Paket	18.878.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	13.000.000
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	260.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	195.000.000
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**		**100 persen**	**49.999.998**			**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 persen**	**20.000.000**
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	49.999.998	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi**		**90 persen**	**630.724.000**			**persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi**	**90 persen**	**511.372.000**
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	51.532.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	51.532.000
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	579.192.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	459.840.000

1	0 4	0 1	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	.	**80 persen**	**317.366.000**			**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**90 persen**	**231.428.800**
1	0 4	0 1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	60.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.428.800
1	0 4	0 1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	157.145.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	100.000.000
1	0 4	0 1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	24.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000
1	0 4	0 1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000
1	0 4	0 2			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani**		**100 Persen**	**387.664.786**			**Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani**	**100 Persen**	**280.435.280**
1	0 4	0 2	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah**		**4 unit**	**104.960.050**			**Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah**	**4 unit**	**90.000.000**
1	0 4	0 2	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Rumah	44.960.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	40.000.000

1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Rumah	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	50.000.000
1	**04**	**02**	**2.06**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun**		**1 Laporan**	**282.594.736**			**Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun**	**1 Laporan**	**200.435.280**
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	282.594.736	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	200.435.280
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pengurangan kawasan kumuh**		**89,36 Persen**	**135.622.800**			**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**95,74 Persen**	**110.000.000**
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia**		**1 dokumen**	**98.710.600**			**Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia**	**- dokumen**	**-**
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	98.710.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	- Dokumen	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh**		**1 laporan**	**36.912.200**			**Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh**	**1 laporan**	**110.000.000**
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	36.912.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	110.000.000

1	04	04			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**		**96,62 Persen**	**2.409.617.600**			**Persentase Rumah Layak Huni**	**97,26 Persen**	**50.000.000**
1	04	04	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab**		**70 unit**	**2.409.617.600**			**Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab**	**70 unit**	**50.000.000**
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Unit Rumah	2.409.617.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 Unit Rumah	50.000.000
1	04	05			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik**		**86,24 Persen**	**5.117.375.043**			**Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik**	**87,11 Persen**	**200.000.000**
1	04	05	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian**		**2 kecamatan**	**5.117.375.043**			**Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian**	**2 kecamatan**	**200.000.000**
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	5.117.375.043	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Musrenbang sebanyak 12 kegiatan dengan anggaran sebesar 1.860.000.000	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	200.000.000

2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**1 1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**16.158.393.045**					**8.291.703.941**
2	**1 1**	**0 2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan**		**100 Persen**	**267.465.000**			**Persentase dokumen perencanaan lingkungan**	**100 Persen**	**70.000.000**
2	**1 1**	**0 2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**		**2 dokumen**	**267.465.000**			**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**	**1 dokumen**	**70.000.000**
2	1 1	0 2	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	122.623.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	- Dokumen	
2	1 1	0 2	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	144.841.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	70.000.000
2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup**		**100 Persen**	**443.900.650**			**Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup**	**100 Persen**	**338.864.040**
2	**1 1**	**0 3**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan**		**2 jenis**	**425.773.150**			**Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan**	**2 jenis**	**308.864.040**
2	1 1	0 3	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16.010.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	25.000.000

2	1 1	0 3	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	28.797.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	30.000.000
2	1 1	0 3	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	380.965.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	253.864.040
2	**1 1**	**0 3**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan**		**1 jenis**	**18.127.500**			**Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan**	**1 jenis**	**30.000.000**
2	1 1	0 3	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	18.127.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	30.000.000
2	**1 1**	**0 4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luas RTH Publik**		**4,23 Persen**	**2.076.565.550**			**Persentase luas RTH Publik**	**4,23 Persen**	**1.779.878.101**
2	**1 1**	**0 4**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola**		**2 kecamatan**	**2.076.565.550**			**Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola**	**2 kecamatan**	**1.779.878.101**
2	1 1	0 4	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53 Ha	2.048.438.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	1.759.878.101
2	1 1	0 4	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	28.127.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	20.000.000

2	**1 1**	**0 5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3**		**32 Persen**	**20.963.900**			**Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3**	**32 Persen**	**45.000.000**
2	**1 1**	**0 5**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah penghasillimbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan**		**24 fasyankes**	**6.433.400**			**Jumlah penghasillimbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan**	**24 fasyankes**	**20.000.000**
2	1 1	0 5	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.433.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	20.000.000
2	**1 1**	**0 5**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3**		**2 kali**	**14.530.500**			**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3**	**2 kali**	**25.000.000**
2	1 1	0 5	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.530.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	25.000.000
2	**1 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan**		**56 Persen**	**23.686.500**			**Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan**	**60 Persen**	**30.000.000**

2	**1 1**	**0 6**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha/kegiatan yang diawasi**		**100 persen**	**23.585.500**			**Persentase usaha/kegiatan yang diawasi**	**100 persen**	**30.000.000**
2	1 1	0 6	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Badan Usaha	23.585.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 Badan Usaha	30.000.000
2	**1 1**	**0 7**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH**		**50 Persen**	**19.999.950**			**Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH**	**100 Persen**	**20.000.000**
2	**1 1**	**0 7**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH**		**1 dokumen**	**19.999.950**			**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH**	**1 dokumen**	**20.000.000**
2	1 1	0 7	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	19.999.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	20.000.000

2	1 1	1 0	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Pengaduan	11.103.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Dokumen	20.000.000
2	1 1	1 0	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Perkara	8.620.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Dokumen	25.000.000
2	**1 1**	**1 1**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengelolaan sampah**		**98 Persen**	**12.118.826.045**			**Persentase pengelolaan sampah**	**98 Persen**	**5.852.161.800**
2	**1 1**	**1 1**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase penanganan sampah**		**80 persen**	**12.118.826.045**			**Persentase penanganan sampah**	**79 persen**	**5.852.161.800**
2	1 1	1 1	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Kelompok	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	20.000.000
2	1 1	1 1	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	35.000.000

2	1 1	1 1	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	6.122.495.469	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah,6 betor, 1 pic up sampah, mesin pyrolisis, hanggar mesin)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 Unit	950.000.000
2	1 1	1 1	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15000-20000 Ton	5.947.180.576	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	4.847.161.800

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Padang Panjang
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP								29.931.462.072,00					14.847.563.416,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								14.773.068.977,00					6.440.857.475,00
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								14.773.068.977,00					6.440.857.475,00
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.722.898.748,00					5.780.422.195,00
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.335.627.000,00					4.707.571.395,00
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	47 Orang/bulan	100 persen	5.335.627.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	4.707.571.395,00
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								23.000.000,00					0,00
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	48 Paket	100 persen	23.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	0,00
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								366.197.750,00					310.056.000,00
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	0	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	0 0	90 persen	8.508.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 0	11.050.000,00
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	21 Paket	90 persen	8.508.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	11.050.000,00
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan layanan adminhtrasi perkantoran	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	60 Paket	90 persen	78.811.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	91.000.000,00
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	15 Paket	90 persen	18.878.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	13.000.000,00
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	90 persen	260.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	195.000.000,00
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								49.999.998,00					20.000.000,00
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	3 Unit	90 persen	49.999.998,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000,00
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								630.724.000,00					511.172.000,00
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	90 persen	51.532.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	51.532.000,00
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	90 persen	579.192.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	459.640.000,00

1	04	01	2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								317.355.000,00					231.428.800,00
1	04	01	2 09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Unit	90 persen	60.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.428.800,00
1	04	01	2 09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	10 Unit	90 persen	157.145.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	100.000.000,00
1	04	01	2 09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	5 Unit	90 persen	24.930.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20.000.000,00
1	04	01	2 09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	2 Unit	90 persen	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000,00
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								387.554.786,00					300.435.280,00
1	04	02	2 01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								0,00					10.000.000,00
1	04	02	2 01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus													
						Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	0 dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0 Dokumen	5.000.000,00
1	04	02	2 01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota													
						Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	0 dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0 Dokumen	5.000.000,00
1	04	02	2 03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								104.960.050,00					90.000.000,00
1	04	02	2 03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana													
						Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit Rumah	4 unit	44.960.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	40.000.000,00
1	04	02	2 03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
						Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit Rumah	4 unit	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	50.000.000,00
1	04	02	2 05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								282.594.736,00					200.435.280,00
1	04	02	2 05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun													
						Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 dokumen	282.594.736,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	200.435.280,00
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								135.622.800,00					110.000.000,00
1	04	03	2 02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								98.710.600,00					0,00
1	04	03	2 02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP													
						Persentase penguranagan kawasan kumuh	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevew/Terlegalisasi	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89,36 %	1 Dokumen	1 dokumen	98.710.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevew/Terlegalisasi	1 Dokumen	0,00
1	04	03	2 02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh													

						Persentase pengurangan kawasan kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89,36 %	0 Dokumen	1 dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	0,00
1	04	03	2 03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								36.912.200,00					110.000.000,00
1	04	03	2 03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													
						Persentase pengurangan kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89,36 %	0 Unit Rumah	1 laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	0,00
1	04	03	2 03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh													
						Persentase pengurangan kawasan kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89,36 %	1 Laporan	1 laporan	36.912.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	110.000.000,00
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								2.409.617.600,00					50.000.000,00
1	04	04	2 01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								2.409.617.600,00					50.000.000,00
1	04	04	2 01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
						Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96,62 %	70 Unit Rumah	70 unit	2.409.617.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 Unit Rumah	50.000.000,00
1	01	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								5.117.375.043,00					200.000.000,00
1	04	05	2 01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								5.117.375.043,00					200.000.000,00
1	04	05	2 01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
						Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66,24 %	2 Lokasi	2 kecamatan	5.117.375.043,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	200.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								15.158.393.045,00					8.406.703.941,00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								15.158.393.045,00					8.406.703.941,00
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								267.465.000,00					70.000.000,00
2	11	02	2 01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								0,00					0,00
2	11	02	2 01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota													
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD) yang disusun	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokuman	0 dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	0 Dokuman	0,00
2	11	02	2 02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								267.465.000,00					70.000.000,00
2	11	02	2 02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	122.623.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0,00
2	11	02	2 02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang													
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	144.841.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	70.000.000,00
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								443.900.650,00					358.861.040,00
2	11	03	2 01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								425.773.150,00					329.861.040,00
2	11	03	2 01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													

							Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Jenis	16.010.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	75.000.000,00
2	11	03	2 01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
							Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Jenis	28.797.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	30.000.000,00
2	11	03	2 01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota														
							Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Jenis	380.965.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	273.864.040,00
2	11	03	2 02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								18.127.500,00					30.000.000,00	
2	11	03	2 02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
							Indeks respon daerah terhadap tutupan lahan Indeks respon Daerah terhadap Udara Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.80 % 75.80 % 100 %	2 Laporan	1 Jenis	18.127.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	30.000.000,00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								2.076.565.550,00					1.799.878.101,00	
2	11	04	2 01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								2.076.565.550,00					1.799.878.101,00	
2	11	04	2 01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
							Persentase luas RTH Publik	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,23 %	54 Ha	2 kecamatan	2.048.438.550,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Ha	1.779.878.101,00
2	11	04	2 01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
							Persentase luas RTH Publik	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,23 %	40 Orang	2 kecamatan	28.127.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	20.000.000,00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								20.963.900,00					45.000.000,00	
2	11	05	2 01		Penyimpanan sementara Limbah B3								6.433.400,00					20.000.000,00	
2	11	05	2 01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														

						Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah penghasilimbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 %	1 Laporan	24 fasyankes	6.433.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	70.000.000,00
2	11	05	2 02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								14.530.500,00					25.000.000,00
2	11	05	2 02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan													
						Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 %	1 Dokumen	2 kali	14.530.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang	1 Dokumen	25.000.000,00
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								23.585.500,00					60.000.000,00
2	11	06	2 01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								23.585.500,00					60.000.000,00
2	11	06	2 01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
						Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 %	0 Dokumen	100 persen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 Dokumen	20.000.000,00
2	11	06	2 01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan													
						Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 %	30 Badan Usaha	100 persen	23.585.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Badan Usaha	20.000.000,00
2	11	06	2 01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup													
						Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 %	0 Orang	100 persen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	20.000.000,00
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								19.999.950,00					40.000.000,00
2	11	07	2 01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH								19.999.950,00					20.000.000,00
2	11	07	2 01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH													

						Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 %	1 Dokumen	1 dokumen	19.999.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	20.000.000,00
2	11	07	2 02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH							0,00						20.000.000,00
2	11	07	2 02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
						Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 %	0 Dokumen	- dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	0 Dokumen	20.000.000,00
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							74.000.000,00						70.000.000,00
2	11	08	2 01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							74.000.000,00						70.000.000,00
2	11	08	2 01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
						Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	3 jenis kegiatan	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	20.000.000,00
2	11	08	2 01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
						Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Orang	3 jenis kegiatan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2 Orang	10.000.000,00
2	11	08	2 01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
						Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Lembaga	3 jenis kegiatan	34.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	4 Lembaga	40.000.000,00
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							93.362.850,00						40.800.000,00
2	11	09	2 01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							93.362.850,00						40.800.000,00
2	11	09	2 01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
						Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Jenis	45 Entitas	1 kelompok	93.362.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	45 Entitas	40.800.000,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							19.723.600,00						15.000.000,00
2	11	10	2 01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							19.723.600,00						15.000.000,00
2	11	10	2 01	0001	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														

							Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Pengaduan	5 dokumen	11 103 500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	70 000 000,00
2	11	10	2 01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota															
							Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Perkara	5 dokumen	8 620 100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	75 000 000,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								12 118 826 045,00					5 877 161 800,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								12 118 826 045,00					5 852 161 800,00
2	11	11	2 01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan															
							Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Persentase penanganan sampah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	7 Kelompok	80 persen	40 000 000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	20 000 000,00
2	11	11	2 01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan															
							Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Persentase penanganan sampah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	1 Dokumen	80 persen	9 150 000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	35 000 000,00
2	11	11	2 01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota															
							Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Persentase penanganan sampah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	21 Unit	80 persen	6 122 495 469,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	21 Unit	950 000 000,00

2	11	11	2 01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
						Persentase pengelolaan sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	15000-20000 Ton	80 persen	5.947.180.576,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	4.847.161.600,00
2	11	11	2 03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta								0,00						25.000.000,00
2	11	11	2 09	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah														
						Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	0 Laporan	1 pihak swasta	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0 Laporan	25.000.000,00
												TOTAL	29.939.970.322,00						14.858.611.416,00

Dari Tabel diatas dapat dilihat jumlah program yang diajukan dalam Renja 2024 sebanyak 15 program yang terdiri dari 1 program rutin kesekretariatan, 4 program teknis urusan perumahan rakyat dan 10 program yang terkait urusan lingkungan hidup 27 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.

Program-program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
7. Program Penanganan Pengaduan
8. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
9. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
12. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
13. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
14. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
15. Program Pengolahan Persampahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIA TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA PADANG PANJANG

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Prioritas	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Nasional	Daerah
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				**29.931.462.022**					**14.722.581.416**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**14.773.068.977**					**8.430.857.475**		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup**		**90 Persen**	**6.827.858.798**			**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup**	**90 Persen**	**5.780.422.195**		
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**		**100 persen**	**5.335.622.000**			**Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu**	**100 persen**	**4.707.571.395**		
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672 Orang/bulan	5.335.622.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	672 Orang/bulan	4.707.571.395		
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**		**100 persen**	**23.000.000**			**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**-**		
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Paket	23.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-		
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**		**90 persen**	**366.197.750**			**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 persen**	**310.050.000**		
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	8.508.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	11.050.000		
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	78.811.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	91.000.000		
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Paket	18.878.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	13.000.000		
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	260.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	195.000.000		

1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**		**100 persen**	**49.999.998**			**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 persen**	**20.000.000**		
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	49.999.998	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000		
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi**		**90 persen**	**630.724.000**			**persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi**	**90 persen**	**511.372.000**		
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	51.532.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	51.532.000		
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	579.192.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	459.840.000		
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**90 persen**	**317.355.000**			**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**90 persen**	**231.428.800**		
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	60.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.428.800		
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	157.145.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	100.000.000		
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	24.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000		
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000		
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani**		**100 Persen**	**387.554.786**			**Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani**	**100 Persen**	**290.435.280**		

1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah**		**4 unit**	**104.960.050**			**Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah**	**4 unit**	**90.000.000**		
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Rumah	44.960.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	40.000.000		
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Rumah	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	50.000.000		
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun**		**1 Laporan**	**282.594.736**			**Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun**	**1 Laporan**	**200.435.280**		
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	282.594.736	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	200.435.280		
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pengurangan kawasan kumuh**		**89,36 Persen**	**135.622.800**			**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**95,74 Persen**	**110.000.000**		
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia**		**1 dokumen**	**98.710.600**			**Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia**	**- dokumen**	**-**		
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	98.710.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	- Dokumen			
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh**		**1 laporan**	**36.912.200**			**Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh**	**1 laporan**	**110.000.000**		
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	36.912.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	110.000.000		

1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**		**96,62 Persen**	**2.409.617.600**			**Persentase Rumah Layak Huni**	**97,26 Persen**	**50.000.000**		
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab**		**70 unit**	**2.409.617.600**			**Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab**	**70 unit**	**50.000.000**		
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Unit Rumah	2.409.617.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 Unit Rumah	50.000.000		
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik**		**86,24 Persen**	**5.117.375.043**			**Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik**	**87,11 Persen**	**200.000.000**		
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian**		**2 kecamatan**	**5.117.375.043**			**Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian**	**2 kecamatan**	**200.000.000**		
1	04	05	2 01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	5.117.375.043	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Musrenbang sebanyak 12 kegiatan dengan anggaran sebesar 1.860.000.000	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	200.000.000		

2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**15.158.393.045**					**8.291.703.941**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan**		**100 Persen**	**267.465.000**			**Persentase dokumen perencanaan lingkungan**	**100 Persen**	**70.000.000**	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**		**2 dokumen**	**267.465.000**			**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**	**1 dokumen**	**70.000.000**	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	122.623.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	- Dokumen		
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	144.841.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	70.000.000	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup**		**100 Persen**	**443.900.650**			**Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup**	**100 Persen**	**338.864.040**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan**		**2 jenis**	**425.773.150**			**Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan**	**2 jenis**	**308.864.040**	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16.010.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	25.000.000	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	28.797.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	30.000.000	

2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	380.965.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	253.864.040		
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan**		**1 jenis**	**18.127.500**			**Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan**	**1 jenis**	**30.000.000**		
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	18.127.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	30 000 000		
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luas RTH Publik**		**4,23 Persen**	**2.076.565.550**			**Persentase luas RTH Publik**	**4,23 Persen**	**1.779.878.101**		
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola**		**2 kecamatan**	**2.076.565.550**			**Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola**	**2 kecamatan**	**1.779.878.101**		
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53 Ha	2.048.438.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	1.759.878.101		
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	28.127.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	20.000.000		
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3**		**32 Persen**	**20.963.900**			**Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3**	**32 Persen**	**45.000.000**		
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah penghasillimbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan**		**24 fasyankes**	**6.433.400**			**Jumlah penghasillimbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan**	**24 fasyankes**	**20.000.000**		
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.433.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	20 000 000		

2	11	05	2.02		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3**		**2 kali**	**14.530.500**			**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3**	**2 kali**	**25.000.000**		
2	11	05	2 02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.530.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	25.000.000		
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan**		**55 Persen**	**23.585.500**			**Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan**	**60 Persen**	**30.000.000**		
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha/kegiatan yang diawasi**		**100 persen**	**23.585.500**			**Persentase usaha/kegiatan yang diawasi**	**100 persen**	**30.000.000**		
2	11	06	2 01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Badan Usaha	23.585.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 Badan Usaha	30.000.000		
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH**		**50 Persen**	**19.999.950**			**Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH**	**100 Persen**	**20.000.000**		

2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH**		**1 dokumen**	**19.999.950**			**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH**	**1 dokumen**	**20.000.000**		
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	19.999.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	20.000.000		
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**		**100 Persen**	**74.000.000**			**Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**100 Persen**	**70.000.000**		
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana**		**3 jenis kegiatan**	**74.000.000**			**Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana**	**3 jenis kegiatan**	**70.000.000**		
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	20.000.000		
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Orang	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang	10.000.000		
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	34.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Lembaga	40.000.000		
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**		**1 Jenis**	**93.362.850**			**Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**1 Jenis**	**40.800.000**		

2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya**		**1 kelompok**	**93.362.850**			**Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya**	**1 kelomp ok**	**40.800.000**		
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Entitas	93.362.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	40.800.000		
						Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup		1 dokumen				Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup	1 dokumen			
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani**		**100 Persen**	**19.723.600**			**Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani**	**100 Persen**	**45.000.000**		
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**		**5 dokumen**	**19.723.600**			**Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**	**5 dokumen**	**45.000.000**		
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Pengaduan	11.103.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Dokumen	20.000.000		
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Perkara	8.620.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Dokumen	25.000.000		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengelolaan sampah**		**98 Persen**	**12.118.826.045**			**Persentase pengelolaan sampah**	**98 Persen**	**5.852.161.800**		
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase penanganan sampah**		**80 persen**	**12.118.826.045**			**Persentase penanganan sampah**	**79 persen**	**5.852.161.800**		
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Kelompok	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	20.000.000		

2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	35.000.000		
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	6.122.495.469	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah,6 betor, 1 pic up sampah, mesin pyrolisis, hanggar mesin)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 Unit	950.000.000		
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15000-20000 Ton	5.947.180.576	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	4.847.161.800		

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat lima belas (15) Program, dua puluh tujuh (27) Kegiatan dan empat puluh tiga (43) Sub Kegiatan yang diusulkan untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2024. Pagu indikatif sebesar Rp. 29.931.462.022,- yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan dan Permukiman dengan pagu Rp. 14.733.068.977,- dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 15. 158.393.045,-.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi langkah awal bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan APBD dan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang.

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 berpedoman kepada Renstra 2024-2026. Selain itu Renja Tahun 2024 telah secara penuh menerapkan klasifikasi dan nomenklatur baru sesuai ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 selain berisi program, rencana kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan, indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat menbantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT

NIP. 19750825 200212 1 004


PADANG PANJANG
KOTA SERAMBI MEKAH

PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat Nya Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk periode Tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rancangan RPD 2024-2026 Kota Padang Panjang dan penjabaran dari Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Demikian Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini dibuat sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Padang Panjang, Agustus 2023

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang

Ade Nafrita Anas., MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710520 199903 2 004

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			**i**
DAFTAR ISI			**ii**
DAFTAR TABEL			**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**1**
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	1
	1.3	Maksud dan Tujuan	3
	1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN LALU**		**5**
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang	5
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang	17
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang	19
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
	2.5	Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat	27
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**		**30**
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang	31
	3.3	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	34
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**		**42**
BAB V	**PENUTUP**		**50**

DAFTAR TABEL

		Halaman
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Padang Panjang.....	6
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.....	18
2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Padang Panjang.....	22
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	27
3.1	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024.....	33
3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat Kota Padang Panjang Dinas Pangan Dan Pertanian....	35
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024.....	42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dengan demikian Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP).

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan nasional bidang pertanian.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah salah satu Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan, serta Ketahanan Pangan kepada masyarakat.

Tahun Anggaran 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian 2024-2026, yang dituangkan dalam Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024 yang memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tahun 2024 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
. Undang-undang 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
11. Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 73);
14. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6); dan
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 No.12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja adalah menjabarkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan untuk :

a. Menyusun Renja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
b. Menyusun penilaian kinerja tahunan;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; dan

e. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN DAN PERTAIAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

BAB III.TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Pertanian
3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Memuat Renja dan Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang selaku Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Indikator Kinerja program, kegiatan dan subkegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Hasil evaluasi kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak berhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (Renja tahun berikutnya). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2019 yang telah dirubahn menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Gambaran lengkap dari hasil pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sampai dengan Tahun 2024 seperti terdapat pada tabel 2.1 berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Padang Panjang

Nama Perangat Daerah : Dinas Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan keluaran Subkegiatan s/d Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
2	**09**				**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**									
2	**09**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi**	**90 %**	**100 %**	**90 %**	**90 %**	**100,00%**	**90 %**	**90,00 %**	100,00%
2	**09**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah**	**90 %**	**100 %**	**90 %**	**90 %**	**100,00%**	**90 %**	**90,00 %**	100,00%
2	09	01	2 02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	58 Orang	58 Orang	58 Orang	58 Orang	100,00%	54 Orang	54,00 Orang	93,10%
2	09	01	2 02	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	0 Laporan	3 Laporan	100,00%
2	09	01	2 02	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran yang Disusun	42 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100,00%	0 Laporan	42 Laporan	100,00%
2	09	01	2 02	0004	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	0 Dokumen	3 Laporan	100,00%
2	**09**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian**	**90 %**	**100 %**	**90 %**	**90 %**	**100,00%**	**90 %**	**90,00 %**	**100,00%**
2	09	01	2 06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang Disediakan	21 Jenis	23 Jenis	21 Jenis	21 Jenis	100,00%	21 Jenis	21 Jenis	100,00%
2	09	01	2 06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Paket Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100,00%	7 Paket	7 Paket	100,00%
2	09	01	2 06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00%	3 Paket	3 Paket	100,00%
2	09	01	2 06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	575 Kali	229 Kali	196 Kali	196 Kali	100,00%	150 Kali	575 Kali	100,00%
						Jumlah Makan dan Minum Rapat yang Disediakan	2071 Kali	705 Kali	466 Kali	466	100,00%	900 Kali	2071 Kali	100,00%
2	**09**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**- -**	**100 %**	**100 %**	**100,00%**	**100 %**	**100 %**	**100,00%**
2	09	01	2 07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	19 Unit	- -	4 Unit	4 Unit	100,00%	1 Unit	5 Unit	26,32%
2	**09**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**90 %**	**100 %**	**90 %**	**90 %**	**100,00%**	**100 %**	**90 %**	**100,00%**
2	09	01	2 08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	3 Jenis	- -	3 Jenis	3 Jenis	100,00%	3 Jenis	3 Jenis	100,00%
2	09	01	2 08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100,00%	3 Jenis	3 Jenis	100,00%
2	09	01	2 08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pnyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100,00%	16 Orang	16 Laporan	94,12%
2	09	01	2 09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**90 %**	**100 %**	**90 %**	**90 %**	**100,00%**	**90 %**	**90 %**	**100,00%**
2	09	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	61 Unit	61 Unit	61 Unit	61 Unit	100,00%	61 Unit	61 Unit	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output))/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan keluaran Subkegiatan s/d Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	09	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	7 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100,00%	7 Jenis	7 Jenis	100,00%
2	09	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 Unit	3 Unit	7 Unit	7 Unit	100,00%	7 Unit	7 Unit	100,00%
2	09	01	2.09	0012	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah yang Tersedia	2 Sertifikat	- -	2 Sertifikat	2 Sertifikat	100,00%	- Sertifikat	2 Sertifikat	100,00%
						Jumlah Sertifikat Tanah yang Tersedia	2 Ha	- -	2 Ha	2 Ha	100,00%	- Ha	2 Ha	100,00%
2	**09**	**03**			**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)**	**100,00 %**	**102,20 %**	**100 %**	**100,54 %**	**100,54%**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00%**
						Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	**100,00 %**	**100,00 %**	**100 %**	**110,00 %**	**110,00%**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00%**
2	**09**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk**	**2.400 Kkal/ kap/ hr)**	**2486,84 Kkal/ kap/ hr)**	**2.400 Kkal/ kap/ hr)**	**2.820,34 Kkal/ kap/ hr)**	**117,51%**	**2.400 Kkal/kap/th**	**2.400 Kkal/ kap/ hr)**	**100,00%**
2	09	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	0,00%	- Dokumen	2 Dokumen	100,00%
						Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM)	20 Buku	0 Buku	5 Buku	5 Buku	100,00%	10 Buku	15 Buku	75,00%
						Jumlah Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Ketahanan Pangan)	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 Orang	1 Orang	100,00%
						Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	6 Laporan	100,00%
						Jumlah Lomba Pemanfaatan Pekarangan	1 Kali	- Kali	1 Kali	- Kali	0,00%	- Kali	- Kali	0,00%
2	09	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
						Jumlah Buku Analisis Harga Pangan	20 Buku	Buku	10 Buku	10 Buku	100,00%	0 Buku	10 Buku	50,00%
						Jumlah Pemantauan Harga Pangan Pokok Kota Padang Panjang	700 Kali	- Kali	350 Kali	365 Kali	104,29%	0 Kali	350 Kali	50,00%
2	09	03	2.02		**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**	**3 ton**	**0 ton**	**3 ton**	**3 Ton**	**100,00%**	**- ton**	**3,00 Ton**	**100,00%**
2	09	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	3 ton	0 ton	3 ton	3 Ton	100,00%	- ton	3,00 Ton	100,00%
2	**09**	**03**	**2.04**		**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Angka Kecukupan Energi (AKE)**	**1845 kkal/ kapita/ hari**	**1824,6 kkal/ kapita/ hari**	**1840 kkal/ kapita/ hari**	1.850 Ton	**100,54%**	**1.850 kkal/ kapita/ hari**	**1845** Ton	**100,00%**
						Angka Kecukupan Protein (AKP)	**57 gram/ kapita/ hari**	**58,3 gram/ kapita/ hari**	**56 gram/ kapita/ hari**	**62,7 gram/ kapita/ hari**	**111,96%**	**57,0 gram/ kapita/ hari**	**57 gram/ kapita/ hari**	**100,00%**
2	09	03	2.04	0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Buku Pola Pangan Harapan yang Disusun	40 Buku	20 Buku	5 Buku	5 Buku	100,00%	0 Buku	25 Buku	62,50%
2	09	03	2.04	0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan yang dilakukan	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100,00%	1 Kali	5 Kali	100,00%
						Jumlah Keikutsertaan HPS Tk. Provinsi	2 Kali	- -	- Kali	- Kali	0,00%	- Kali	- Kali	0,00%
						Jumlah Keikutsertaan HPS Tk. Nasional	2 Kali	- -	- Kali	- Kali	0,00%	- Kali	- Kali	0,00%
						Jumlah Petugas Pengelola Toga	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 Orang	1 Orang	100,00%
						Jumlah Lomba Pengelolaan Pangan Lokal Tingkat Provinsi	2 kali	- kali	1 kali	1 Kali	100,00%	1 Kali	2 Kali	100,00%
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output))/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan keluaran Subkegiatan s/d Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Pelaksanaan DAK Non Fisik	1 Kegiatan	- Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
2	09	05			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase Pengawasan Pangan Segar**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**-**	**0,00%**	**0 %**	**100 %**	**100,00%**
2	09	05	2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Uji Sampel Keamanan Pangan**	**9 Kali**	**3 Kali**	**- Kali**	**- Kali**	0,00%	**0 Kali**	**3 Kali**	**33,33%**
2	09	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Rekomendasi Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kemanan Pangan yang Dilaksanakan	5 Kali	1 Kali	- Kali	- Kali	0,00%	- Kali	1 Kali	20,00%
						Jumlah Rekomendasi Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	0,00%	- Dokumen	1 Dokumen	33,33%
2	09	05	2.01	005	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Uji Sampel Keamanan Pangan Segar	9 Kali	3 Kali	- Kali	- Kali	0,00%	- Kali	3 Kali	33,33%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	0,00%	- Dokumen	1 Dokumen	33,33%
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**									
3	25				**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**									
3	25	04			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan**	**7 %**	**3,19 %**	**5 %**	**5 %**	**100,00%**	**7 %**	**7 %**	**100,00%**
3	25	04	2.04		**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Produksi Perikanan**	**750 Ton/ Tahun**	**705,46 Ton/ Tahun**	**735 Ton/ Tahun**	**735,50 Ton/ Tahun**	**100,07%**	**750 Ton/ Tahun**	**750 Ton/ Tahun**	**100,00%**
3	25	04	2.04	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan yang disediakan (operasonal BBI)	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100,00%	3 Jenis	3,00 Jenis	50,00%
						Jumlah Tenaga Penunjang Operasional BBI	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	100,00%	7 Orang	7,00 Orang	100,00%
						Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Perikanan dan Penyuluh Pertanian serta UPTD BBI)	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100,00%	3 Orang	3,00 Orang	100,00%
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100,00%	3 Unit	3,00 Unit	50,00%
						Jumlah Pelaksanaan DAK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	- Kegiatan	- Kegiatan	0,00%	0 Kegiatan	0,00 Kegiatan	0,00%
3	25	06			**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan**	**20.933.449 Rp/ Tahun/ RTP**	**20.098.575 Rp/ Tahun/ RTP**	**19.936.618 Rp/ Tahun/ RTP**	**20.954.416 Rp/ Tahun/ RTP**	**105,11%**	**20.933.449 Rp/ Tahun/ RTP**	**20.933.449 Rp/ Tahun/ RTP**	**100,00%**
3	25	06	2.01		**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil**	**Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi**	**7 Kali**	**1 Kali**	**2 Kali**	**2 Kali**	**100,00%**	2 Kali	**5,00 Kali**	**71,43%**
3	25	06	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Forikan yang Dilaksanakan	7 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali	100,00%	2 Kali	5,00 Kali	71,43%
						Jumlah Data Profil Perikanan Kota Padang Panjang	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3,00 Dokumen	100,00%
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3,00 Dokumen	100,00%
3	27				**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**									
3	27	02	2.01		**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian**	**75 %**	**75 %**	**70 %**	**75 %**	**107,14%**	**75 %**	**75,00 %**	**100,00%**
						Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	**70 %**	**75 %**	**65 %**	**75 %**	**115,38%**	**70 %**	**75,00 %**	**107,14%**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output))/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan keluaran Subkegiatan s/d Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	02	2.01		**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**100,00%**	**2 Jenis**	**2,00 Jenis**	**100,00%**
3	27	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dilaksanakan	36 Kali	12 Kali	12 kali	12 Kali	100,00%	12 kali	12,00 Kali	33,33%
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
3	27	02	2.02		**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Produksi Tanaman Hias**	**87.213 Tangkai**	**79.393 Tangkai**	**83.060 Tangkai**	**80.555 Tangkai**	**96,98%**	**87.213 Tangkai**	**87.213 Tangkai**	**100,00%**
						Produksi Padi	**7.448 Ton**	**10.058,3 Ton**	**7.216 Ton**	**10.429,0 Ton**	**144,53%**	**7.448 Ton**	**7.448 Ton**	**100,00%**
						Luas Lahan Pertanian Organik	**1 Ha**	**1 Ha**	**1 Ha**	**1 Ha**	**100,00%**	**0 Ha**	**1 Ha**	**100,00%**
3	27	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Labor Kultur Jaringan yang Beroperasional	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100,00%
						Luas Lahan Pembibitan Tanaman Hias yang dilaksanakan	1 Ha	- -	1 Ha	1 Ha	0,00%	1 Ha	1 Ha	100,00%
						Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman yang Dilaksanakan	40 Orang	0 Orang	20 Orang	- Orang	0,00%	20 orang	40 Orang	100,00%
						Jumlah Petugas Screen House dan Tanaman Hias/ Labor Kultur Jaringan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100,00%	2 orang	2 Orang	100,00%
						Jumlah Perserta Studi Kompratif ke Daerah Potensi Pertanian	20 Orang	0 Orang	10 Orang	10,00 Orang	100,00%	10 Orang	20 Orang	100,00%
						Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang TPHP)	1 Orang	0 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 orang	1 Orang	100,00%
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
						Penanganan Inflasi	1 Kegiatan	- Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	1,00 Kegiatan	100,00%
3	27	02	2.03		**Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar Formal**	**1 Produk**	**1 Produk**	**1 Produk**	**1 Produk**	**100,00%**	**1 Produk**	**1,00 Produk**	**100,00%**
						Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	**5 Ekor**	**19 Ekor**	**11 Ekor**	**12 Ekor**	**109,09%**	**5 Ekor**	**5,00 Ekor**	**100,00%**
3	27	02	2.03	0001	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bakan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar Formal	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	100,00%	1 Produk	1,00 Produk	100,00%
						Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	5 Ekor	19 Ekor	11 Ekor	12 Ekor	109,09%	5 Ekor	5,00 Ekor	100,00%
						Jumlah Petugas Kandang Pembibitan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100,00%	4 Orang	4,00 Orang	100,00%
						Jumlah Tenaga Pengawas Mutu Pakan ternak	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 Orang	1,00 Orang	100,00%
						Jumlah Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
3	27	03			**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian**	**75 %**	**75 %**	**70 %**	**75 %**	**107,14%**	**75 %**	**75,00 %**	**100,00%**
						Persentase Ketersediaan Prasarana Peternakan	**70 %**	**75 %**	**65 %**	**75 %**	**115,38%**	**70 %**	**75,00 %**	**107,14%**
3	27	03	2.01		**Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**	**147,05 Ha**	**- -**	**147,05 Ha**	**147,05 Ha**	**100,00%**	**147,05 Ha**	**147,05 Ha**	**100,00%**
3	27	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LPCP2B	Jumlah peserta sosialisasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	700 Orang	- -	50 Orang	50 Orang	100,00%	350 Orang	400,00 Orang	57,14%
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Ha	- -	1 Ha	1 Ha	100,00%	1 Ha	1 Ha	100,00%
3	27	03	2.02		**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**	**4 Unit**	**- -**	**2 Unit**	**2 Unit**	100,00%	**1 Unit**	**2 Unit**	50,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan keluaran Subkegiatan s/d Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Prasarana yang Dibangun	**1 Unit**	**- -**	**1 Unit**	**1 Unit**	**100,00%**	**1 Unit**	**1 Unit**	**100,00%**
						Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan	**3 Unit**	**3 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**100,00%**	**3 Unit**	**3 Unit**	**100,00%**
3	27	03	2 02	0002	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	2 Paket	- -	1 Paket	1 Paket	100,00%	0 Paket	1 Paket	50,00%
						Jumlah Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	2 Paket	- -	1 Paket	1 Paket	100,00%	0 Paket	1 Paket	50,00%
						Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2 Unit	- -	1 Unit	1 Unit	100,00%	0 Unit	1 Unit	50,00%
						Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	2 Unit	- -	1 Unit	1 Unit	100,00%	0 Unit	1 Unit	50,00%
3	27	03	2 02	0003	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah ruas jalan usaha tani yang dibangun	2 Ruas	- -	1 Ruas	1 Ruas	100,00%	1 Ruas	2 Ruas	100,00%
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	- -	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	2 Unit	100,00%
3	27	03	2 02	0009	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	3 Unit	3 Unit	100,00%
						Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Puskeswan dan UPTD RPH)	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100,00%	3 Orang	3 Orang	100,00%
3	**27**	**3**	**2.03**		**Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bibit Ternak Sapi Perah pada Rearing Unit**	**5 Ekor**	**19 Ekor**	**11 Ekor**	**12 Ekor**	**109,09%**	**5 Ekor**	**5 Ekor**	**100,00%**
						Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	**175 Ekor**	**55 Ekor**	**50 Ekor**	**57 Ekor**	**114,00%**	**75 Ekor**	**175 Ekor**	100,00%
3	27	3	2 03		Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Bibit Ternak Sapi Perah pada Rearing Unit	5 Ekor	19 Ekor	11 Ekor	12 Ekor	109,09%	5 Ekor	5 Ekor	100,00%
						Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	175 Ekor	55 Ekor	50 Ekor	57 Ekor	114,00%	75 Ekor	175 Ekor	100,00%
						Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Ditestarikan dan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	3 laporan	100,00%
3	27	3	2 03	0001	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/Kasus**	**8 %**	**15,17 %**	**7,5 %**	**39,92 %**	**532,27%**	**8,00 %**	**8 %**	100,00%
3	**27**	**04**			**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakitr Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Medis Veteriner**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00%**	**100 %**	100 %	100,00%
3	27	04	2 01		Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Penanggulangan Gangguan Reproduksi	105 Ekor	35 Ekor	35 Ekor	4 Ekor	11,43%	35 Ekor	105 Ekor	100,00%
						Jumlah Pelayanan Ternak/Hewan	2.990 Pelayanan	1.937 Pelayana n	995 Pelayanan	2803 Pelayanan	281,71%	1000 Pelayanan	2990 Pelayanan	100,00%
						Jumlah Kasus Zoonosis yang Dikendalikan/ Dikurangkan	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	100,00%	1 Kasus	1 Kasus	100,00%
						Jumlah Tenaga Teknis: Medis/Paramedis, Yankeswan dan PSDR	3 Orang	3 Orang	2 Orang	2 Orang	100,00%	2 Orang	2 Orang	66,67%
						Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	3 laporan	100,00%
3	27	04	2 01	0003	Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penangkapan Hewan Penular Rabies (HPR)	125 Ekor	16 Ekor	45 Ekor	11 Ekor	24,44%	55 Ekor	125 Ekor	100,00%
						Jumlah Jenis Pengadaan Obat-Obat Hewan dan Vaksin Rabies	185 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	60,00 Jenis	100,00%	65 Jenis	185 Jenis	100,00%
						Jumlah Hewan yang di Vaksinasi Rabies	3.700 Ekor	1.907 Ekor	1200 Ekor	1001 Ekor	83,42%	1200 Ekor	3700 Ekor	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan keluaran Subkegiatan s/d Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	3 laporan	100,00%
3	27	04	2.03		**Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)**	**100 %**	- -	**100 %**	**100 %**	**100,00%**	**100 %**	100 %	**100,00%**
3	27	04	2.03	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Tenaga Teknis Medis Veteriner (Dokter Hewan)	1 Orang	- -	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 Orang	1 Orang	100,00%
						Jumlah Dana Pendamping Kementerian Pertanian	1 Tahun	- -	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	1 Tahun	100,00%
3	27	04	2.04		**Kegiatan Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Livestock Expo yang diikuti**	**2 Kali**	- -	**1 Kali**	**- Kali**	**0,00%**	**1 Kali**	**1 Kali**	**50,00%**
						Jumlah Sertifikasi Produk Susu	**1 Sertifikat**	**1 Sertifikat**	**1 Sertifikat**	**1,00 Sertifikat**	**100,00%**	**0 Sertifikat**	**1 Sertifikat**	**100,00%**
3	27	04	2.04	0001	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Livestock Expo yang diikuti	2 Kali	- -	1 Kali	- Kali	0,00%	1 Kali	1 Kali	50,00%
						Jumlah Sertifikasi Produk Susu	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100,00%	0 Sertifikat	1 Sertifikat	100,00%
						Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	3 laporan	100,00%
3	27	04	2.03	0002	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pemeriksaan Hewan Qurban	1800 Ekor	685 Ekor	600 Ekor	673 Ekor	112,17%	600 Ekor	1800 Ekor	100,00%
						Jumlah Uji Sampel	600 Sampel	460 Sampel	200 Sampel	661 Sampel	330,50%	200 Sampel	600 Sampel	100,00%
						Jumlah Petugas Teknis (Petugas Operator Hoist, Petugas Penyembelih Hewan, Petugas Bongkar Muat Daging)	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100,00%	3 Orang	3 Orang	100,00%
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	3 laporan	100,00%
3	27	05			**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani**	**70,0 %**	**52,38 %**	**60 %**	**60 %**	**100,00%**	**70 %**	**70 %**	**100,00%**
3	27	05	2.01		**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**	**Luas sawah yang diasuransikan**	**590 Ha**	- -	**295 Ha**	**104,4 Ha**	**35,39%**	**0 Ha**	**104,40 Ha**	**17,69%**
3	27	05	2.01	0001	Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Sosialisasi AUTP	300 Orang	- -	50 Orang	50 Orang	100,00%	0 Orang	50 Orang	16,67%
						Jumlah Premi Asuransi AUTP	590 Ha	- -	295 Ha	104,4 Ha	35,39%	0 Ha	104,40 Ha	17,69%
						Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	24 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	24 laporan	100,00%
2	27	07			**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan**	**70 %**	**75 %**	**65 %**	**75 %**	**115,38%**	**70 %**	**75,00 %**	**107,14%**
2	27	07	2.06		**Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah KK Miskin yang Dibantu**	**8 KK**	**5 KK**	**2 KK**	**2 KK**	**100,00%**	**1 KK**	**8,00 KK**	**100,00%**
3	27	07	2 06	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	8 KK	5 KK	2 KK	2 KK	100,00%	1 KK	8,00 KK	100,00%
						Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	6 Ekor	- -	4 Ekor	4 Ekor	100,00%	223 Ekor	227,00 Ekor	3783,33%
2	27	07			**Program Penyuluhan Pertanian**	**Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian**	**100 %**	**59 %**	**67,80 %**	**68,08 %**	**100,41%**	**100,00 %**	**100 %**	**100,00%**
3	27	07	2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan**	**59 Keltan**	**21 Keltan**	**20 Keltan**	**20,00 Keltan**	**100,00%**	**19 Keltan**	**59 Keltan**	**100,00%**
3	27	07	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peserta Pertemuan Kelompok Tani	1.000 Oh	500 Oh	500 Oh	500 Oh	100,00%	- Oh	1000 Oh	100,00%
						Jumlah PENAS Tani Tingkat Nasional	2 Kali	- -	- Kali	- Kali	0,00%	1 Kali	1,00 Kali	50,00%
						Jumlah Field Day Kelembagaan Tani	2 Kali	- -	1 Kali	1,00 Kali	100,00%	1 Kali	1,00 Kali	50,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output))/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan keluaran Subkegiatan s/d Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	59 unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	0,00%	19 Unit	59,00 Unit	100,00%
3	27	07	2.01	0003	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Jenis Teknologi yang akan diterapkan	2 jenis	2 jenis	1 jenis	1 Jenis	100,00%	1 jenis	2 Jenis	100,00%
						Jumlah Fielday Penerapan Pertanian Teknologi Tepat Guna	2 Kali	0 Kali	1 Kali	0 Kali	0,00%	2 Kali	1 Kali	50,00%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00%	2 Unit	2 Unit	100,00%
						Jumlah Pelaksanaan DAK Non Fisik	1 Kegiatan	- Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%

Sumber Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2023

Dari Tabel 2.1. dapat dilihat bahwa Pada Evaluasi Renja Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2022 ada terdapat 9 program, 23 kegiatan dan 39 Subkegiatan, pada umumnya telah memenuhi target outcome dan terealisasi 100 % untuk output. Begitu juga dengan perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai keadaan tahun berjalan (tahun 2023) sudah memenuhi target outcome dan output program.

1. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Indikator Kinerja pada program ini ada 2, yaitu: 1) Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 100% dengan realisasi 100,54% dan persentase capaian 100,54%. 2) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan target 100% dan realisasi 110%, persentase capaian 110%.

Konsumsi energi rata-rata perkapita perhari masyarakat Kota Padang Panjang adalah 1.850 kkal/kapita/hari, sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE) ideal adalah 2.100 Kkalori/kapita/hari.

Untuk Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2013 adalah 57 gram/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein di Kota Padang Panjang sebesar 62,7 gram/kapita/hari. Konsumsi Protein meliputi protein meliputi protein nabati dan protein hewani.

Dalam rangka mencapai target Angka Kecukupan Energi (AKE) perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi yang **Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)** terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan.

2. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Indikator Kinerja pada program ini adalah Persentase peningkatan produksi budidaya perikanan dengan target 5% dan persentase capaian 100%.

Produksi perikanan di Kota padang Panjang mengalami peningkatan sebanyak 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana jumlah produksi perikanan pada tahun 2022 mencapai 735,5 ton. Meningkatnya produksi perikanan di Kota Padang Panjang didukung oleh kembali bergeliatnya sektor usaha budidaya perikanan dengan komoditas utama yaitu Ikan Lele, Nila dan Mas. Hai ini disebabkan adanya kenaikan harga jual ikan konsumsi dipasaran dan terjadinya kenaikan konsumsi ikan perkapita pertahun pada tahun 2022 yaitu sebanyak 41,82 kg/orang/tahun, sehingga memicu semangat pembudidayaan ikan di Kota Padang Panjang terutama ikan lele untuk pengembangan budidaya ikan.

3. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Indikator Kinerja pada program ini adalah Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan dengan target 19.936.618 rupiah/tahun/RTP.

Indikator pendapatan pembudidaya ikan diukur dengan cara mengalikan jumlah produksi perikanan dalam satuan kg dengan harga rata-rata ikan dalam Rupiah per kg kemudian membagi hasil perkalian tersebut dengan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang ada di Kota Padang Panjang. Pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2022 sebesar 20.954.416 rupiah/tahun/RTP dengan persentase capaian sebesar 105,11%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi perikanan di Kota Padang Panjang. Selain itu, jumlah RTP di Kota Padang Panjang tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 702 orang. Disamping itu juga dipicu oleh kenaiakan harga jual ikan konsumsi di Pasar Kota Padang Panjang tersedianya benih unggul di UPTD BBI.

4. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Indikator Kinerja pada program ini ada dua, yaitu: 1) Persentase pemenuhan sarana pertanian dengan target 70%, realisasi 75% dan persentase capaian 107,14%. 2) Persentase pemenuhan sarana peternakan dengan target 65%, realisasi 75 % dan persentase capaian 115,38%

Hasil pengukuran capaian kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Realisasi Persentase pemenuhan sarana pertanian tahun 2022 sebesar 75% adalah jumlah sarana pertanian yang tersedia (6 jenis yaitu tractor, cultivator, mesin potong rumput, pompa air dan kemasan, sealer) dibagi dengan jumlah sarana pertanian yang dibutuhkan (8 jenis yaitu tractor, cultivator, mesin potong rumput, pompa air, tresher, sealer, oven dan kemasan) dikali seratus persen.

Realisasi Persentase pemenuhan sarana peternakan tahun 2022 sebesar 75% adalah jumlah sarana peternakan yang tersedia (3 jenis yaitu mesin potong rumput, bibit ternak dan sealer) dibagi dengan jumlah sarana peternakan yang dibutuhkan (4 jenis yaitu mesin potong rumput, bibit ternak, sealer dan packing) dikali seratus persen.

5. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Indikator Kinerja pada program ini ada dua, yaitu: 1) Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian dengan target 70%, realisasi 100% dan persentase capaian 142,86%. 2) Persentase pemenuhan sarana peternakan dengan target 65%, realisasi 75% dan persentase capaian 115,38%.

Realisasi Persentase pemenuhan parasarana pertanian tahun 2022 sebesar 100% adalah jumah prasarana pertanian yang tersedia (2 jenis yaitu irigasi = 100%)dibagi dengan jumlah prasarana pertanian yang dibutuhkan (2 jenis irigasi) dikali seratus persen. Tinggi nya capaian ini karena Kota Padang Panjang mendapatkan alokasi dana rehabilitasi jaringan irigasi dari dana APBN Kementrian Pertanian Tahun 2022 sebanyak 2 unit untuk masing-masing seluas 50 Ha.

Realisasi Persentase pemenuhan prasarana peternakan tahun 2022 sebesar 75% adalah jumlah prasarana peternakan yang tersedia (3 jenis yaitu kandang dan RPH, Puskeswan) dibagi dengan jumlah prasarana peternakan yang dibutuhkan (4 jenis yaitu irigasi, kandang, RPH dan Puskeswan) dikali seratus persen.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Tahun 2022 dijabarkan dalam Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dan Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan prasarana pertanian/peternakan di Kota Padang Panjang seperti rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator Kinerja pada program ini adalah Persentase penurunan kasus penyakit hewan/ternak dengan target 7,5%. Realisasi Persentase penurunan kasus penyakit hewan/ternak tahun 2022 sebesar 39,92% adalah jumlah kasus tahun sebelumnya (794 kasus) dikurangi dengan jumlah kasus pada tahun berjalan (477 kasus) dibagi dengan jumlah kasus tahun sebelumnya (794 kasus) dikali seratus persen.

Realisasi Persentase penurunan kasus penyakit hewan/ternak tahun 2022 sebesar 39,92% adalah jumlah kasus tahun sebelumnya (794 kasus) dikurangi dengan jumlah kasus pada tahun berjalan (477 kasus) dibagi dengan jumlah kasus tahun sebelumnya (794 kasus) dikali seratus persen.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dijabarkan ke dalam Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota serta Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Realisasi capaian kinerja program ini mencapai 532,27% sehingga dapat dikatan bahwa kasus penyakit hewan/ternak di Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Hal ini teralaksana berkat aktif service yang dilakukan Petugas Puskeswan dan sosialisasi pencegahan penyakit hewan menular kepada

masyarakat di Kota Padang Panjang. Selain itu peternak sudah banyak yang menerapkan Good Practice Farming (GPF).

7. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Indikator Kinerja pada program ini adalah Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertanganidengan target 60%, realisasi 60% dan persentase capaian 100%.

Realisasi pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani tahun 2022 adalah luas lahan yang ditangani (104,4 Ha) dibagi dengan luas lahan pertanian (147 Ha) melalui program bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

8. **Program Penyuluhan Pertanian**

Indikator Kinerja pada program ini adalah Persentase Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian yang Tertangani dengan target 67,80%, realisasi 68,08% dan persentase capaian 100,41%.

Realisasi Persentase Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian tahun 2022 adalah jumlah kelompok tani yang menerapkan inovasi teknologi pertanian (96 kelompok tani) dibagi dengan jumlah kelompok tani (141 kelompok tani).

Adapun beberapa program, kegiatan, subkegiatan yang realisasinya tahun berjalan (tahun 2023) sesuai dengan yang telah direncanakan pada Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang namun sebagian ada pula yang tidak sesuai, tidak diakomodir atau tidak terealisasi pada Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang maupun APBD.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja secara umum beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah:

1. Bahwa terdapat subkegiatan dalam program yang tidak dianggarkan karena terbatas alokasi anggaran, sehingga mengurangi capaian program; dan
2. Bahwa terdapat pengurangan volume pengadaan barang atau jasa dalam program, karena disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Dinas:

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Perubahan target capaian kinerja akhir periode Renstra;
2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan;
3. Efisiensi alokasi belanja; dan
4. Penambahan alokasi pagu anggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian, terdapat 1 (satu) urusan wajib yaitu urusan bidang pangan. Urusan bidang pangan merupakan urusan wajib dengan kategori tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar Kebutuhan Pelayanan. Sehubungan dengan kinerja pelayanan urusan bidang pangan tidak memiliki ketentuan SPM maka maka indikator analisis kinerja pelayanan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023 (Perkiraan)	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Skor Pola Pangan Harapan			85,75	86	86,1	86,2	87,3	87,3	86,1	86,2	
2.	Produktivitas Padi			6,3 ton/ha	6,4 ton/ha	6,5 ton/ha	6,6 ton/ha	8,04 ton/ha	8,04 ton/ha	6,5 ton/ha	6,6 ton/ha	
3.	Produktivitas Susu Sapi Perah			11,2 liter/ ekor/ hari	11,8 liter/ ekor/ hari	11,8 liter/ ekor/h ari	11,85 liter/ ekor/ hari	11,67 liter/ ekor/ hari	11,8 liter/ ekor/ hari	11,80 liter/ ekor/ hari	11,85 liter/ ekor/ hari	
4.	Peningkatan Produksi Perikanan			5%	7%	0,13 %	0,13 %	5%	7%	0,13 %	0,13 %	
5.	Adopsi Inovasi Teknologi			67,80%	100%	33,3 %	66.7%	68,08%	100%	33,3%	66.7%	
6.	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos			11%	12%	8%	8,5%	20,15%	20,15%	8%	8,5%	

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pangan dan Pertanian tidak termasuk Perangkat Daerah pemangku Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian di ukur dari capaian sasaran Rentra yang rata-rata realisasi untuk Tahun 2022 mencapai target.

Kemudian pada tahun 2023 memiliki enam target indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut: 1) Skor Pola Pangan Harapan dengan target 87,3; 2) Produktivitas Padi dengan target 8,04 ton/ha; 3) Produktivitas Susu Sapi Perah dengan target 11,8 liter/ ekor/ hari; 4) Peningkatan Produksi Perikanan dengan target 7%; 5) Adopsi Inovasi Teknologi 100% dan Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos dengan target 20,15%. Untuk perkiraan pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2023 diupayakan mencapai target yang telah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan sebagian Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pangan Pertanian, Kelauatan dan Perikanan.

Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian telah ditetapkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Sejauh ini Dinas Pangan dan Pertanian tetap komit menjalankan tugas dan ungsinya, meskipun banyak ditemui permasalahan dan hambatan, diantaranya:

1. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman);
2. Menurunnya minat masyarakat untuk beternak karena tingginya biaya produksi;
3. Banyaknya Alih Fungsi Lahan Pertanian;
4. Rendahnya Produktivitas Pertanian; dan
5. Masih tingginya angka kemiskinan peternak.

Berdasarkan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 2024-2026, disebutkan beberapa isu strategis yang akan menentukan dan mempengaruhi arah kebijakan dan strategi Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian, yaitu:

Tujuan:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian;
2. Menurunkan Tingkat Kemiskinan Sektor Pertanian; dan
3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sektor Pertanian.

2) Sasaran

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Produksi/ Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatnya Meningkatnya Adopsi Inovasi Teknologi;
4. Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos; dan
5. Meningkatnya Produksi/Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan.

Hal penting yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dinas serta peningkatan pelayanan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dimasa mendatang diantaranya dengan memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan. Berdasarkan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 2024-2026, tantangan dan peluang pada Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

- ***Tantangan***

1. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian;
2. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
3. Tingginya upah tenaga kerja usaha tani, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain yang upah tenaga kerja lebih rendah;
4. Rendahnya produktivitas usaha tani;

5. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/hewan;
6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
7. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun;
8. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional;
9. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
10. Lemahnya kelembagaan tani;
11. Status kepemilikan lahan;
12. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat; dan
13. Belum Optimalnya Pasar yang menampung hasil produksi pertanian.

➢ ***Peluang***

1. Padang Panjang memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak pada daerah persimpangan;
2. Iklim yang mendukung dengan curah hujan 4.619,4 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 239 hari dalam setahun, sehingga pertanaman dan usaha perikanan darat dapat dilakukan (sumber PPDA tahun 2023);
3. Kondisi jalan dan akses tranportasi lancar baik dari sentra produksi maupun ke pasar;
4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Padang Panjang relatif besar terhadap total PDRB Kota Padang Panjang (5,14%) (sumber PPDA tahun 2023);
5. Adanya dukungan inovasi teknologi oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak ketiga lainnya;
6. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian; dan
7. Ditetapkannya Kota Padang Panjang oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Barat sebagai kawasan sapi perah, tanaman hias dan aneka cabai.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

Rancangan akhir Renja ini merupakan lanjutan dari RKPD awal. Untuk lebih jelas perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan rancangan akhir dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pangan dan Pertanian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				**7.677.888.412**	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**				**8.056.737.378**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				**7.677.888.412**	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**				**8.056.737.378**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.522.594.532**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi**	**90%**	**7.838.020.678**	
1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.130.489.612**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah**	**90%**	**6.303.169.000**	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ bulan	6.130.489.612	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang/ bulan	6.303.169.000	
2	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**		-	**Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian**	**100%**	**24.000.000**	
1)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54 paket	24.000.000	
3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**271.000.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran**	**90%**	**322.072.644**	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	16.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	16.000.000	
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	120.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	120.000.000	
3)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
4)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	120.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	176.072.644	
3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**60.000.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**50.000.000**	
1)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	-	
2)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	60.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	50.000.000	
4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	90%	**611.995.194**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	90%	**706.779.034**	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	4.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	6.000.000	
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	199.999.034	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	199.999.034	
3)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	407.996.160	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	500.780.000	
5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**90%**	**449.109.726**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**90%**	**432.000.000**	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	55 unit	323.109.726	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	55 unit	307.000.000	
2)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	5 unit	45.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	5 unit	45.000.000	
3)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	80.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	75.000.000	
4)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi tanah	Padang Panjang	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,5 ha	1.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi tanah	Padang Panjang	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,5 ha	5.000.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**		**Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)**	**100%**	**141.840.480**	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**		**Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)**	**100%**	**201.521.500**	
			Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	**100%**				**Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)**	**100%**		
6	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**		**Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk**	**2400 kkal/ kap/ hr**	**52.840.480**	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**		**Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk**	**2400 kkal/ kap/ hr**	**126.491.000**	
1)	Sub. Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Padang Panjang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	3.000.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Padang Panjang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	65.285.400	
2)	Sub. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Padang Panjang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	20.000.000	Sub. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Padang Panjang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	20.000.000	
3)	Sub. Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Padang Panjang	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	5.180.000	Sub. Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Padang Panjang	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	9.770.000	
4)	Sub. Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Padang Panjang	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Dokumen	24.660.480	Sub. Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Padang Panjang	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	31.435.600	
7	**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**	3 ton	**35.000.000**	**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**	3 ton	**34.995.000**	
1)	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3 ton	35.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3 ton	34.995.000	
8	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan /Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)**		**Angka Kecukupan Energi (AKE)**	**1852 kkal/ kapita/ hari**	**54.000.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan /Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)**		**Angka Kecukupan Energi (AKE)**	**1852 kkal/ kapita/ hari**	**40.035.500**	
			Angka Kecukupan Protein (AKP)	**62,9 gram/ kapita /hari**				**Angka Kecukupan Protein (AKP)**	**62,9 gram/ kapita /hari**		
1)	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan/Kapita/ Tahun	Padang Panjang	Target Konsumsi Pangan/Kapita/ Tahun	1 dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan/Kapita/ Tahun	Padang Panjang	Target Konsumsi Pangan/Kapita/ Tahun	1 dokumen	5.090.000	
2)	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Padang Panjang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	44.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Padang Panjang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	34.945.500	
III	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**		**Persentase Pengawasan Pangan Segar**	**100%**	**13.453.400**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**		**Persentase Pengawasan Pangan Segar**	**100%**	**17.195.200**	
9	**Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**1 laporan**	**13.453.400**	**Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**1 laporan**	**17.195.200**	
1)	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	13.453.400	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	17.195.200	
	Urusan Pemerintahan Pilihan				**611.318.800**	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**712.746.600**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				**568.998.800**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**				**629.471.000**	
IV	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**		**Produksi budidaya ikan**	**751 ton/ tahun**	**526.678.800**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**		**Produksi budidaya ikan**	**751 ton/ tahun**	**546.195.400**	
10	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan**	**20 orang**	**526.678.800**	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan**	**20 orang**	**546.195.400**	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Padang Panjang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	511.678.800	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Padang Panjang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	531.195.400	
2)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	15.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	15.000.000	
V	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**		**Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan**	**1 Jenis**	**42.320.000**	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**		**Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan**	**1 Jenis**	**83.275.600**	
11	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) Di Kota Padang Panjang dan Provinsi**	**2 kali**	**42.320.000**	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) Di Kota Padang Panjang dan Provinsi**	**2 kali**	**83.275.600**	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	1 dokumen	42.320.000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	1 dokumen	83.275.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				**913.243.190**	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**				**2.457.021.422**	
VI	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**		**Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian**	**0,77**	**386.903.920**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**		**Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian**	**0,77**	**1.699.346.801**	
			Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	**0,75**				**Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan**	**0,75**		
12	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia**	**2 jenis**	**20.000.000**	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia**	**2 jenis**	**409.390.000**	
1)	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 laporan	409.390.000	
13	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota**		**Produksi Tanaman Hias**	**81.555 tangkai**	**84.049.920**	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota**		**Produksi Tanaman Hias**	**81.555 tangkai**	**76.161.800**	
			Produksi Padi	**8.443,5 ton**				**Produksi Padi**	**8.443,5 ton**		
			Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik	**2 kelompok**				**Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik**	**2 kelompok**		
1)	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Padang Panjang	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	84.049.920	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Padang Panjang	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	1 dokumen	76.161.800	
14	**Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan**	**5 ekor**	**262.854.000**	**Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan**	**5 ekor**	**293.795.000**	
1)	Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Padang Panjang	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	1 laporan	262.854.000	Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Padang Panjang	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	1 laporan	293.795.000	
15	**Kegiatan Pennyediaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain**		**Jumlah KK Miskin yang Dibantu**	**45 KK**	**20.000.000**	**Kegiatan Pennyediaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain**		**Jumlah KK Miskin yang Dibantu**	**45 KK**	**920.000.001**	
1)	Sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Padang Panjang	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	2 ekor	20.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Padang Panjang	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	1155 ekor	920.000.001	
VII	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian**	**77%**	**113.312.640**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian**	**77%**	**129.861.801**	
			Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	**75%**				**Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan**	**75%**		
16	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**	**1 unit**	**99.312.640**	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**	**1 unit**	**115.861.801**	
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	**1 unit**				**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**	**1 unit**		
			Jumlah Prasarana Peternakan yang Disediakan	**1 unit**				**Jumlah Prasarana Peternakan yang Disediakan**	**1 unit**		
1)	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Padang Panjang	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	20.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Padang Panjang	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit	1	
2)	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	79.312.640	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	115.861.800	
3)	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Padang Panjang	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	0 unit	-	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Padang Panjang	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	0 unit	-	
17	**Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB**	**40 ekor**	**14.000.000**	**Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB**	**40 ekor**	**14.000.000**	
1)	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Padang Panjang	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	14.000.000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Padang Panjang	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	14.000.000	
VIII	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus**	**8,5%**	**343.668.150**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus**	**0,085**	**439.912.820**	
18	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Pelayanan Medis Veteriner**	**100%**	**182.045.750**	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Pelayanan Medis Veteriner**	**100%**	**232.479.700**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1)	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Padang Panjang	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 laporan	102.045.750	Sub kegiatan PenanggulanganDaerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Padang Panjang	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 laporan	152.479.700	
2)	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	80.000.000	Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Padang Panjang	Jumlah Wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	80.000.000	
19	**Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)**	**100%**	**63.992.960**	**Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)**	**100%**	**77.260.320**	
1)	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Padang Panjang	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	63.992.960	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Padang Panjang	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	77.260.320	
20	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Jumlah Livestock Expo yang Diikuti**	**1 kali**	**97.629.440**	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat**		**Jumlah Livestock Expo yang Diikuti**	**1 kali**	**130.172.800**	
			Jumlah Sertifikasi Produk Susu	**1 sertifikat**				**Jumlah Sertifikasi Produk Susu**	**1 sertifikat**		
1)	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Padang Panjang	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	77.629.440	Sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Padang Panjang	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	107.436.800	
2)	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Unit Produk Hewan yang telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	1 unit usaha	20.000.000	Sub kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah Unit Produk Hewan yang telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	1 unit usaha	22.736.000	
IX	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani**	**75%**	**16.762.000**	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani**	**75%**	**20.000.000**	
21	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**		**Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)**	**147 ha**	**16.762.000**	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**		**Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)**	**147 ha**	**20.000.000**	
1)	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Padang Panjang	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	6.762.000	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Padang Panjang	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	10.000.000	
2)	Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	Padang Panjang	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	1 laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	Padang Panjang	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	1 laporan	10.000.000	
X	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani**	**75%**	**52.596.480**	**Program Penyuluhan Pertanian**		**Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian**	**13,8%**	**167.900.000**	
22	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**		**Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)**	**147 ha**	**52.596.480**	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan**	**20 Keltan**	**167.900.000**	
1)	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Padang Panjang	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	22.596.480	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Padang Panjang	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 unit	27.900.000	
2)	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Padang Panjang	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana PenyuluhanPertanian	1 unit	140.000.000	
	JUMLAH				**9.160.130.402**					**11.143.229.800**	

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2023

Pada Tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa pada rancangan akhir terdapat penambahan anggaran Dinas Pangan dan Pertanian menjadi Rp.11.143.229.800,00 yang semula hanya Rp.9.160.130.402,00. Penambahan ini disebabkan karena telah diakomodirnya anggaran POKIR dan belanja pakaian dinas dalam rancangan akhir Renja. Selain itu juga terdapat perubahan nomenklatur subkegiatan sesuai dengan update terakhir Berdasarkan kebutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , yaitu :

No	Sebelum	Sesudah
1	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
2	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
3	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
4	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bila dibandingkan dengan rancangan awal RKPD, maka pada rancangan akhir Renja tahun 2024 terdapat penambahan 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) subkegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

Selain itu rancangan akhir Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang juga telah mengakomodir usulan musrenbang sebanyak 2 buah usulan dan usulan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD sebanyak 123 usulan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel. 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Padang Panjang

Dinas Pangan dan Pertanian

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1.1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.1.1 Subkegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Pasar baru	Jumlah Bantuan untuk Perbaikan Kolam Ikan, bantuan Bibit Ikan dan Pakan Ikan	1 Orang	Pokir Anggota DPRD an. Hukemri
2.	Program Penyuluhan Pertanian 2.1 Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.1.1 Subkegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kelulrahan Sigando Kec.Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	1. Jumlah Pelatihan Pengolahan makan Berbahan Jamur 2. Jumlah Pelatihan Budidaya Tanaman Vanili 3. Jumlah Pelatihan bagi kelompok tani se Kota Padang panjang	30 orang 10 Orang 20 Orang	Musrembang Anggota DPRD Ryan Afrinaldi, A.Md Pokir Anggota Dewan an. Micko Kirstie, S.Psi Pokir Anngota DPRD an. Dr. H. Novi Hendri, SE.,M.Si

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	[illegible]
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 3.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.1.1 Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kel Koto Katik, Sigando,Koto Panjang, Ganting, Silaing Bawah, Bukit Surungan,Kampung Manggis, Tanah Hitam, Ekor Lubuk	1. Jumlah sarana dan parasarana pertanian yang dibantu	75 KK	Pokir Anggota Dewan An. Imral, SE; Kiki Anugerah Dia, SE; Puji Hastuti, A.Md; Yudha Prasetia; Hendra Saputra, SH; Riza Aditya Nugraha SH dan Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom
4.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 4.1 Kegiatan Pennyediaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain 4.1.1 Subkegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Kel. Tanah Pak Lambik, Koto Katik, Tanah Hitam, Silaing Bawah, Ngalau, Sigando Ekor Lubuk dan Ganting	Jumlah Masyarakat Miskin yang dibantu: 1. Bantuan Ternak Sapi Potog 2. Bantuan Terk Kerbau 3. Bantun Ternak Kambing 4. Bantuan Ternak Ayam 5. Bantuan Ternak Itik	 29 KK 1 KK 3 KK 2 KK 10 KK	Pokir Anggota DPRD an. Mardiansyah, A.md; Zulfikri, SE; Imral, SE ; Drs. Aditiawarman; Kiki Anugerah Dia, SE; Hendra Saputra, SH dan Dr. H. Novi Hendri, SE.,M.Si

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 5.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan 5.1.1 Subkegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelurahan Tanah Pak Lambik	Pelatihan pemanfaatan pekarangan dan pengolahan hasil pertanian	32 Orang	Musrembang Anggota Dewan An. Romi Saputra, SH

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa usulan Aspirasi (Musrembang) dan Pokok Pikiran (Pokir) tahun 2024 sudah diinput 5 program 5 kegiatan dan lima sub kegiatan yang mencakup pada urusan wajib yaitu: Urusan Pangan dan urusan pilihan, yaitu : Urusan Pertanian serta Urusan Kelautan dan Perikanan pada Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024. Usulan Aspirasi dan Pokir tahun 2024 tersebut diterima oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dan kemudian dilakukan kajian lebih lajut mengenai keterkaitan usulan kegiatan dengan arah pembangunan pertanian serta keterkaitan dengan isu-isu penting pembangunan pertanian di Kota Padang Panjang. Dari usulan para pemangku kepentingan pada bidang ekonomi yang disampaikan melalui aplikasi https://padangpanjang.sipd.kemendagri.go.id/.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan sebagaimana tertuang dalam Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 disinergikan, disinkronkan dan diintegrasikan dengan arah kebijakan dan prioritas program Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2024 yang disesuaikan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, Tema RPJMN 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan" untuk menuju Visi "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Pembangunan Nasional diarahkan pada: 1) Pembangunan Manusia; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Kewilayahan; 4) Pembangunan Infrastruktur; dan Pembangunan Politik. Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Penyusunan program dilaksanakan dengan menerapkan prinsip money follow program.

Penelaahan terhadap keselarasan kebijakan nasional berkenaan dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dimana prioritas pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan Dinas Pangan dan Pertanian adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas.

Visi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah: "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya

dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Misi Kementerian Pertanian periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada tugas, fungsi dan wewenang dalam peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka misi Kementerian Pertanian adalah:
2. Mewujudkan Kesejahteraan Petani, adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.
3. Mewujudkan Ketahanan Pangan, adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan masyarakat.
4. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian, adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.

Tujuan dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani
2. Meningkatnya ketahanan pangan dan daya saing pertanian
3. Mengembangkan inovasi IPTEK pertanian
4. Berkembangnya sarana prasarana pertanian yang bernilai ekonomi
5. Mengembangkan sistem perkarantinaan pertanian
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan petani
7. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sejalan dengan arah pembangunan lembaga pusat dimaksud, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang turut berperan terhadap proses pencapaian Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang yaitu:

1. Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan
2. Meningkatkan Produktivitas Peternakan
3. Meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH), dan
4. Meningkatkan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Strategis

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, hasil analisis pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kota Padang Panjang, identifikasi isu dan masalah mendesak, dana Indikatif, hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024, maka disusunlah Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk

periode 2024. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tidak jauh berbeda dengan Tujuan dan Sasaran pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah untuk menetapkan Prioritas Pembangunan di lingkup Pertanian tahun 2024 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi pada tahun 2024.

Mengacu pada Renstra Dinas Pagan dan pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1) Tujuan

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian;
2. Menurunkan Tingkat Kemiskinan Sektor Pertanian; dan
3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sektor Pertanian.

2) Sasaran

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Produksi/ Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatnya Meningkatnya adopsi inovasi teknologi;
4. Meningkatnya pendapatan petani penerima bansos; dan
5. Meningkatnya Produksi/ Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan.

3) Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun Terget Indikator Kinerja uni (IKK) disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014, sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai Permendagri 18 Tahun 2020. Pada Dinas Pangan dan Pertanian, ada 3 Urusan yang mendukung IKK Kota yaitu Urusan Pangan, Urusan Pertanian serta Urusan Kelautan dan Perikanan, dimana bisa kita lihat dalam tabel dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

(Sesuai dengan urusan pemerintahan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014)

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target 2024	Sumber Data	Perangkat Daerah
1	**Pangan**				**Dinas Pangan Pertanian**
	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ---------- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	0,04 %	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	**Pertanian**				**Dinas Pangan Pertanian**
	a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi padi/ ha	6,5 ton/ ha	Dinas Pangan dan Pertanian	
	b. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian /kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t1) ---------- x 100% Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	8,5 %	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	**Kelautan dan Perikanan**				**Dinas Pangan Pertanian**
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten / kota	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota	751 ton/ ha	Dinas Pangan dan Pertanian	

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2023

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa Dinas Pangan dan Pertanian memliki 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang terbagi pada 3 unsur, yatiu : Unsur Pangan, Unsur Pertanian serta Unsur Kelautan dan Perikanan.Pada urusan pangan terdapat indikator persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan), dengan target 0,04% . Kemudian urusan pertanian dengan Indikator 2 indikator, yaitu: 1) produktivitas pertanian per hektar per tahun dengan target 6,5 ton/ ha dan 2) persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dengan target 8,5% . Serta Indikator pada Urusan Kelautan dan Perikanan jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/ kota dengan target 751 ton/ ha.

3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka telah dilakukan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RPJMD, yang menjadi pedoman penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan dalam penyusunan Renja Tahun 2024.

Dinas Pangan dan Pertanian ikut mendukung prioritas nasional terkait penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. Dukungan tersebut diakomodir pada beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penanganan inflasi dengan sub kegiatan:
   - Subkegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota;
   - Subkegitan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lainnya;
   - Subkegiatan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; dan
   - Subkegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
2. Penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan sub kegiatan:
   - Subkegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil;

- Subkegitan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lainnya; dan
- Subkegiatan Peningkatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/ Tanaman.

3. Penanganan stunting dengan sub kegiatan:
   - Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengaanekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan
   - Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Renstra Perangkat Daerah serta target capaian pada tahun 2024, maka disusunlah rencana program dan kegiatan sebanyak **10 (sepuluh) Program** dengan didukung oleh **22 (dua puluh dua) Kegiatan** dan **41 (empat puluh satu) sub kegiatan**. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**				**8.056.737.378**				**7.821.953.602**
2 09	**Urusan Pemerintah Bidang Pangan**				**8.056.737.378**				**7.821.953.602**
2 09 03	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)**	**Kota Padang Panjang**	**100%** **100%**	**201.521.500**			**100%** **100%**	**207.840.000**
2 09 03 2.01	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk**	**Kota Padang Panjang**	**2400 kkal/ kap/ hr**	**126.491.000**			**2400kkal/ kap/ hr**	**127.840.000**
2 09 03 2.01 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Padang Panjang	1 Laporan	65.285.400	APBD	Musrenbang	1 laporan	50.000.000
2 09 03 2.01 0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kota Padang Panjang	1 Unit	20.000.000	APBD		1 Unit	50.000.000
2 09 03 2.01 0015	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	9.770.000	APBD		1 Dokumen	5.200.000
2 09 03 2.01 0016	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Informasi Neraca Bahan Makanan	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	31.435.600	APBD		2 Dokumen	22.640.000
2 09 03 2.02	**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**	**Kota Padang Panjang**	3 ton	**34.995.000**			**1,7 ton**	**20.000.000**
2 09 03 2.02 0003	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	3 ton	34.995.000	APBD		1,7 ton	20.000.000
2 09 03 2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan/ Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)**	**Angka Kecukupan Energi (AKE)** **Angka Kecukupan Protein (AKP)**	**Kota Padang Panjang**	**1852 kkal/ kapita/ hari** **62,9 gram/ kapita /hari**	**40.035.500**			**1853 kkal/ kapita/ hari** **63 gram/ kapita /hari**	**60.000.000**
2 09 03 2.04 0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan/Kapita/ Tahun	Target Konsumsi Pangan/Kapita/ Tahun	Kota Padang Panjang	1 dokumen	5.090.000	APBD		1 dokumen	10.000.000
2 09 03 2.04 0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Padang Panjang	1 laporan	34.945.500	APBD		1 laporan	50.000.000
2 09 05	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase Pengawasan Pangan Segar**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**17.195.200**			**100%**	**30.000.000**
2 09 05 2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Padang Panjang**	**1 laporan**	**17.195.200**			**1 laporan**	**30.000.000**
2 09 05 2.01 0004	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang	1 dokumen	17.195.200	APBD		1 dokumen	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
x xx 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**7.838.020.678**			**100%**	**7.584.113.602**
x xx 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**6.303.169.000**			**100%**	**6.130.489.602**
x xx 01 2.02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	756 orang/ bulan	6.303.169.000	APBD		756 orang/ bulan	6.130.489.602
x xx 01 2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**24.000.000**			**100%**	**-**
x xx 01 2.05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	54 paket	24.000.000	APBD		-	-
x xx 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**322.072.644**			**100%**	**392.000.000**
x xx 01 2.06 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Padang Panjang	4 paket	16.000.000	APBD		4 paket	16.000.000
x xx 01 2.06 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 paket	120.000.000	APBD		4 paket	120.000.000
x xx 01 2.06 0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 paket	10.000.000	APBD		12 paket	16.000.000
x xx 01 2.06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	24 laporan	176.072.644	APBD		24 laporan	240.000.000
x xx 01 2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan**		**100%**	**50.000.000**			**100%**	**20.000.000**
x xx 01 2.06 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 unit	25.000.000	APBD		0 unit	-
x xx 01 2.06 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 unit	25.000.000	APBD	Laptop, CCTV, Printer	4 unit	20.000.000
x xx 01 2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**		**100%**	**706.779.034**			**100%**	**604.624.000**
x xx 01 2.08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	12 laporan	6.000.000	APBD		12 laporan	4.000.000
x xx 01 2.09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	36 laporan	199.999.034	APBD		36 laporan	200.000.000
x xx 01 2.08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 laporan	500.780.000	APBD		12 laporan	400.624.000
x xx 01 2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**		**100%**	**432.000.000**			**100%**	**437.000.000**
2 09 01 2.09 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	55 unit	307.000.000	APBD		55 unit	307.000.000
2 09 01 2.09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	5 unit	45.000.000	APBD		5 unit	45.000.000
2 09 01 2.09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	7 unit	75.000.000	APBD		7 unit	80.000.000
2 09 01 2.09 12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota Padang Panjang	0,5 ha	5.000.000	APBD		0,5 ha	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**629.471.000**				**592.178.800**
3 25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**				**629.471.000**				**592.178.800**
3 25 04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi budidaya ikan**	**Kota Padang Panjang**	**751 ton/ tahun**	**546.195.400**	**APBD**		**752 ton/ tahun**	**547.178.800**
3 25 04 2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan**	**Kota Padang Panjang**	**20 orang**	**546.195.400**			**20 orang**	**547.178.800**
3 25 04 2.04 002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	UPTD BBI	1 unit	531.195.400	APBD	Pokir	1 unit	511.678.800
3 25 04 2.04 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	1 unit	15.000.000	APBD	Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan UPTD BBI	1 unit	35.500.000
3 25 06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan**	**Kota Padang Panjang**	**1 Jenis**	**83.275.600**	**APBD**		**1 Jenis**	**45.000.000**
3 25 06 2.01	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) Di Kota Padang Panjang dan Provinsi**	**Kota Padang Panjang**	**2 kali**	**83.275.600**			**2 kali**	**45.000.000**
3 25 06 2.01 001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	Kota Padang Panjang	1 dokumen	83.275.600	APBD		1 dokumen	45.000.000
3 27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**				**2.457.021.422**				**1.078.200.000**
3 27 02	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian**	**Kota Padang Panjang**	**77%**	**1.699.346.801**			**80%**	**402.854.000**
		Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan		**75%**				**80%**	
3 27 02 2.01	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia**	**Kota Padang Panjang**	**2 jenis**	**409.390.000**			**2 jenis**	**20.000.000**
3 27 02 2.01 02	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Padang Panjang	12 laporan	409.390.000	APBD	Pokir	12 laporan	20.000.000
3 27 02 2.02	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota**	**Produksi Tanaman Hias**	**Kota Padang Panjang**	**81.555 tangkai**	**76.161.800**			**82.055 tangkai**	**100.000.000**
		Produksi Padi		**8.443,5 ton**				**8.573,4 ton**	
		Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik		**2 kelompok**				**2 kelompok**	
3 27 02 2.02 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Kota Padang Panjang	1 dokumen	76.161.800	APBD	Musrenbang	1 dokumen	100.000.000
3 27 02 2.03	**Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan**		**4 ekor**	**293.795.000**			**4 ekor**	**262.854.000**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 27 02 2.03 0001	Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Kota Padang Panjang	1 laporan	293.795.000	APBD		1 laporan	262.854.000
3 27 02 2.06	**Kegiatan Pennyediaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain**	**Jumlah KK Miskin yang Dibantu**	**Kota Padang Panjang**	**2 KK**	**920.000.001**			**2 KK**	**20.000.000**
3 27 02 2.06 01	Sub kegiatan Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Kota Padang Panjang	2 ekor	920.000.001	APBD	Pokir	2 ekor	20.000.000
3 27 03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian**	**Kota Padang Panjang**	**77%**	**129.861.800**			**80%**	**131.700.000**
		Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan		**75%**				**80%**	
3 27 03 2.02	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**	**Kota Padang Panjang**	**1 unit**	**115.861.800**			**1 unit**	**117.700.000**
		Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		**1 unit**				**1 unit**	
		Jumlah Prasarana Peternakan yang Disediakan		**1 unit**				**1 unit**	
3 27 03 2.02 0003	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Padang Panjang	1 unit	-	APBD		1 unit	20.000.000
3 27 03 2.02 0010	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Padang Panjang	1 unit	115.861.800	APBD		1 unit	97.700.000
3 27 03 2.02 0010	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 unit	-	APBD		1 unit	-
3 27 03 2.03	**Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB**	**Kota Padang Panjang**	**40 ekor**	**14.000.000**			**41 ekor**	**14.000.000**
3 27 03 2.03 0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Kota Padang Panjang	1 laporan	14.000.000	APBD		1 laporan	14.000.000
3 27 04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus**	**Kota Padang Panjang**	**8,5%**	**439.912.820**			**9%**	**426.884.000**
3 27 04 2.01	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pelayanan Medis Veteriner**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**232.479.700**			**100%**	**241.984.000**
3 27 04 2.01 0003	Sub kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kota Padang Panjang	1 laporan	152.479.700	APBD	PC 5 unit	1 laporan	121.984.000
3 27 04 2.01 0002	Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupetan/Kota	Jumlah Wilayahatau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	1 laporan	80.000.000	APBD		1 laporan	120.000.000
3 27 04 2.03	**Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)**	**UPTD Puskeswan Kota Padang Panjang**	**100%**	**77.260.320**			**100%**	**61.900.000**
3 27 04 2.03 002	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	UPTD Puskeswan Kota Padang Panjang	1 laporan	77.260.320	APBD		1 laporan	61.900.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 27 04 2.04	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Livestock Expo yang Diikuti**	Kota Padang Panjang	**1 kali**	**130.172.800**			**1 kali**	**123.000.000**
		Jumlah Sertifikasi Produk Susu		**1 sertifikat**				**1 sertifikat**	
3 27 04 2.04 0002	Sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Padang Panjang	1 laporan	107.436.800	APBD		1 laporan	100.000.000
3 27 04 2.04 0005	Sub kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Usaha Produk Hewan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	Kota Padang Panjang	1 unit usaha	22.736.000	APBD		1 unit usaha	23.000.000
3 27 05	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani**	**Kota Padang Panjang**	**75%**	**20.000.000**			**80%**	**16.762.000**
3 27 05 2.01	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**	**Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)**	**Kota Padang Panjang**	**147 ha**	**20.000.000**			**147 ha**	**16.762.000**
3 27 05 2.01 0001	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kota Padang Panjang	10 Ha	10.000.000	APBD		10 Ha	6.762.000
3 27 05 2.01 0006	Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kota Padang Panjang	1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	10.000.000
3 27 07 2	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian**	**Kota Padang Panjang**	**13,8%**	**167.900.000**			**27,6%**	**100.000.000**
3 27 07 2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan**	**Kota Padang Panjang**	**20 Keltan**	**167.900.000**			**20 Keltan**	**100.000.000**
3 27 07 2.01 002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Padang Panjang	1 unit	27.900.000	APBD		1 unit	50.000.000
3 27 07 2.01 0003	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Padang Panjang	1 unit	140.000.000	APBD	Musrenbang dan Pokir	1 unit	50.000.000
JUMLAH					**11.143.229.800**				**9.492.332.402**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024 memiliki 3 urusan bidang: yaitu Urusan Pangan, Kelautan dan Perikanan serta Urusan Perikanan. Pada Urusan Pangan memiliki 3 program, 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.8056.737.378,-. Kemudian Urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 2 Program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.629.471.000,-. Serta urusan Pertanian dengan 5 program 11 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Jadi pada tahun 2024 kebutuhan dana/pagu indikatif Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebesar Rp.11.143.229.800 sedangkan prakiraan maju rencana Tahun 2025 kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 9.492.332.402,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Renstra OPD serta target capaian pada tahun 2024, maka disusunlah rencana program dan kegiatan sebanyak sebanyak **10 (sepuluh) Program** dengan didukung oleh **23 (dua puluh tiga) Kegiatan** dan **41 (empat puluh satu) sub kegiatan**. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					**8.056.737.378**						**7.821.953.602**	
2 09	**Urusan Pemerintah Bidang Pangan**					**8.056.737.378**						**7.821.953.602**	
2 09 03	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)** **Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)**	**100%** **100%**	**Kota Padang Panjang**	**100%** **100%**	**201.521.500**					**100%** **100%**	**207.840.000**	
2 09 03 2.01	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk**	**2400 kkal/ kap/ hr**	**Kota Padang Panjang**	**2400 kkal/ kap/ hr**	**126.491.000**					**2400kkal/ kap/ hr**	**127.840.000**	
2 09 03 2.01 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	65.285.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Rumah Tangga/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Dasawisma	1 laporan	50.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.01 0005	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	Kota Padang Panjang	1 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Tani	1 Unit	50.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.01 0015	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	3 Dokumen	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	9.770.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pedagang Kecil Pasar Kota Padang Panjang	1 Dokumen	5.200.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.01 0016	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Informasi Neraca Bahan Makanan	6 Dokumen	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	31.435.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat	2 Dokumen	22.640.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.02	**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**	**7,7 ton**	**Kota Padang Panjang**	3 ton	**34.995.000**					**1,7 ton**	**20.000.000**	
2 09 03 2.02 0003	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7,7 ton	Kota Padang Panjang	3 ton	34.995.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Rumah Tangga Masyarakat	1,7 ton	20.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan/ Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)**	**Angka Kecukupan Energi (AKE)** **Angka Kecukupan Protein (AKP)**	**1854 kkal/ kapita/ hari** **63,10 gram/ kapita /hari**	**Kota Padang Panjang**	**1852 kkal/ kapita/ hari** **62,9 gram/ kapita /hari**	**40.035.500**					**1853 kkal/ kapita/ hari** **63 gram/ kapita /hari**	**60.000.000**	
2 09 03 2.04 0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan/Kapita/ Tahun	Target Konsumsi Pangan/Kapita/ Tahun	3 dokumen	Kota Padang Panjang	1 dokumen	5.090.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat Kota Padang Panjang	1 dokumen	10.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.04 0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 laporan	Kota Padang Panjang	1 laporan	34.945.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Rumah Tangga/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Dasawisma	1 laporan	50.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2 09 05	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase Pengawasan Pangan Segar**	**100%**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**17.195.200**					**100%**	**30.000.000**	
2 09 05 2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**3 laporan**	**Kota Padang Panjang**	**1 laporan**	**17.195.200**					**1 laporan**	**30.000.000**	
2 09 05 2.01 0004	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	3 dokumen	Kota Padang Panjang	1 dokumen	17.195.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Sasaran Kegiatan : Petani/Siswa Sekolah	1 dokumen	30.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
x xx 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian**	**100%**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**7.838.020.678**					**100%**	**7.584.113.602**	
x xx 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	**6.303.169.000**					**100%**	**6.130.489.602**	
x xx 01 2.02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2268 orang/ bulan	Kota Padang Panjang	756 orang/ bulan	6.303.169.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	756 orang/ bulan	6.130.489.602	Dinas Pangan dan Pertanian
x xx 01 2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	**24.000.000**					**100%**	**-**	
x xx 01 2.05 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54 paket	Kota Padang Panjang	54 paket	24.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	ASN di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
x xx 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	**322.072.644**					**100%**	**392.000.000**	
x xx 01 2.06 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	Kota Padang Panjang	4 paket	16.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	4 paket	16.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
x xx 01 2.06 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Kota Padang Panjang	4 paket	120.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	4 paket	120.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
x xx 01 2.06 0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 paket	Kota Padang Panjang	12 paket	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	12 paket	16.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
x xx 01 2.06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	Kota Padang Panjang	24 laporan	176.072.644	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	24 laporan	240.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
x xx 01 2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan**	**100%**		**100%**	**50.000.000**					**100%**	**20.000.000**	
x xx 01 2.06 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Kota Padang Panjang	1 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	0 unit	-	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
x xx 01 2.05 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	Kota Padang Panjang	4 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	4 unit	20.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
x xx 01 2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100%**		**100%**	**706.779.034**					**100%**	**604.624.000**	
x xx 01 2.08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	Kota Padang Panjang	12 laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	12 laporan	4.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
x xx 01 2.09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 laporan	Kota Padang Panjang	36 laporan	199.999.034	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	36 laporan	200.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
x xx 01 2.08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	Kota Padang Panjang	12 laporan	500.780.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	12 laporan	400.624.000	Dinas Pangan dan Pertanian
x xx 01 2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**100%**		**100%**	**432.000.000**					**100%**	**437.000.000**	
2 09 01 2.09 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	165 unit	Kota Padang Panjang	55 unit	307.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	55 unit	307.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.09 0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	15 unit	Kota Padang Panjang	5 unit	45.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	5 unit	45.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	21 unit	Kota Padang Panjang	7 unit	75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	7 unit	80.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.09 12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1,5 ha	Kota Padang Panjang	0,5 ha	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	0,5 ha	5.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**					**629.471.000**						**592.178.800**	
3 25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**					**629.471.000**						**592.178.800**	
3 25 04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi budidaya ikan**	**2256 ton/ tahun**	**Kota Padang Panjang**	**751 ton/ tahun**	**546.195.400**	**APBD**				**752 ton/ tahun**	**547.178.800**	
3 25 04 2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan**	**60 orang**	**Kota Padang Panjang**	**20 orang**	**546.195.400**					**20 orang**	**547.178.800**	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3 25 04 2.04 002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	UPTD BBI	1 unit	531.195.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pembudidaya Ikan	1 unit	511.678.800	Dinas Pangan dan Pertanian
3 25 04 2.04 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	Kota Padang Panjang	1 unit	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	UPTD BBI Kota Padang Panjang	1 unit	35.500.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 25 06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan**	**3 Jenis**	**Kota Padang Panjang**	**1 Jenis**	**83.275.600**	**APBD**				**1 Jenis**	**45.000.000**	
3 25 06 2.01	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) Di Kota Padang Panjang dan Provinsi**	**6 kali**	**Kota Padang Panjang**	**2 kali**	**83.275.600**					**2 kali**	**45.000.000**	
3 25 06 2.01 001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	3 dokumen	Kota Padang Panjang	1 dokumen	83.275.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Rumah Tangga Masyarakat	1 dokumen	45.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**					**2.457.021.422**						**1.078.200.000**	
3 27 02	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian**	**65%**	**Kota Padang Panjang**	**77%**	**1.699.346.801**					**80%**	**402.854.000**	
		Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	**65%**		**75%**						**80%**		
3 27 02 2.01	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia**	**6 jenis**	**Kota Padang Panjang**	**2 jenis**	**409.390.000**					**2 jenis**	**20.000.000**	
3 27 02 2.01 02	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	36 laporan	Kota Padang Panjang	12 laporan	409.390.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani	12 laporan	20.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 02 2.02	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota**	**Produksi Tanaman Hias** **Produksi Padi** **Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian**	**246.165 tangkai** **104.049,9 ton** **6 kelompok**	**Kota Padang Panjang**	**81.555 tangkai** **8.443,5 ton** **2 kelompok**	**76.161.800**					**82.055 tangkai** **8.573,4 ton** **2 kelompok**	**100.000.000**	
3 27 02 2.02 0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	3 Dokumen	Kota Padang Panjang	1 dokumen	76.161.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani	1 dokumen	100.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 02 2.03	**Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan**	**12 ekor**		**4 ekor**	**293.795.000**					**4 ekor**	**262.854.000**	
3 27 02 2.03 0001	Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	3 Laporan	Kota Padang Panjang	1 laporan	293.795.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	UPTD Puskeswan	1 laporan	262.854.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 02 2.06	**Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain**	**Jumlah KK Miskin yang Dibantu**	**6 kk**	**Kota Padang Panjang**	**2 KK**	**920.000.001**					**2 KK**	**20.000.000**	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Priorita Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3 27 02 2.06 01	Sub kegiatan Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	6 Ekor	Kota Padang Panjang	2 ekor	920.000.001	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat/Peternak yang terdaftar DTKS	2 ekor	20.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian**	**65%**	**Kota Padang Panjang**	**77%**	**129.861.800**					**80%**	**131.700.000**	
		Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	**65%**		**75%**						**80%**		
3 27 03 2.02	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**	**3 unit**	**Kota Padang Panjang**	**1 unit**	**115.861.800**					**1 unit**	**117.700.000**	
		Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	**3 unit**		**1 unit**						**1 unit**		
		Jumlah Prasarana Peternakan yang Disediakan	**1 unit**		**1 unit**						**1 unit**		
3 27 03 2.02 0003	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	Kota Padang Panjang	1 unit	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		1 unit	20.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.02 0010	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	Kota Padang Panjang	1 unit	115.861.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	UPTD RPH	1 unit	97.700.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.02 0010	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang Panjang	1 unit	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		1 unit	-	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.03	**Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB**	**123 ekor**	**Kota Padang Panjang**	**40 ekor**	**14.000.000**					**41 ekor**	**14.000.000**	
3 27 03 2.03 0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	3 Laporan	Kota Padang Panjang	1 laporan	14.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	UPTD Puskeswan	1 laporan	14.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus**	**9,5%**	**Kota Padang Panjang**	**8,5%**	**439.912.820**					**9%**	**426.884.000**	
3 27 04 2.01	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pelayanan Medis Veteriner**	**100 %**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**232.479.700**					**100%**	**241.984.000**	
3 27 04 2.01 0003	Sub kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	3 Laporan	Kota Padang Panjang	1 laporan	152.479.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat Kota Padang Panjang	1 laporan	121.984.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 04 2.01 0002	Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayahatau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	Kota Padang Panjang	1 laporan	80.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat Kota Padang Panjang	1 laporan	120.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3 27 04 2.03	**Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)**	**100 %**	**UPTD Puskeswan Kota Padang Panjang**	**100%**	**77.260.320**					**100%**	**61.900.000**	
3 27 04 2.03 002	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 Laporan	UPTD Puskeswan Kota Padang Panjang	1 laporan	77.260.320	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat Kota Padang Panjang	1 laporan	61.900.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 04 2.04	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Livestock Expo yang Diikuti**	**3 kali**	Kota Padang Panjang	**1 kali**	**130.172.800**					**1 kali**	**123.000.000**	
		Jumlah Sertifikasi Produk Susu	**3 sertifikat**		**1 sertifikat**						**1 sertifikat**		
3 27 04 2.04 0002	Sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	Kota Padang Panjang	1 laporan	107.436.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Peternak	1 laporan	100.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 04 2.04 0005	Sub kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Usaha Produk Hewan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	3 Unit Usaha	Kota Padang Panjang	1 unit usaha	22.736.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Peternak	1 unit usaha	23.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 05	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani**	**65%**	**Kota Padang Panjang**	**75%**	**20.000.000**					**80%**	**16.762.000**	
3 27 05 2.01	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**	**Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)**	**147 ha**	**Kota Padang Panjang**	**147 ha**	**20.000.000**					**147 ha**	**16.762.000**	
3 27 05 2.01 0001	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	35 Ha	Kota Padang Panjang	10 Ha	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani	10 Ha	6.762.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 05 2.01 0006	Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	3 Laporan	Kota Padang Panjang	1 laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani	1 laporan	10.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 07 2	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian**	**41,4%**	**Kota Padang Panjang**	**13,8%**	**167.900.000**					**27,6%**	**100.000.000**	
3 27 07 2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan**	**60 kelompok tani**	**Kota Padang Panjang**	**20 Keltan**	**167.900.000**					**20 Keltan**	**100.000.000**	
3 27 07 2.01 002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	Kota Padang Panjang	1 unit	27.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani	1 unit	50.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 07 2.01 0003	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	Kota Padang Panjang	1 unit	140.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani	1 unit	50.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
JUMLAH						**11.143.229.800**						**9.492.332.402**	

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023

Dalam table 4.1 terdapat prioritas nasional yang menunjang pembangunan daerah Kota Padang Panjang, pada Renja Dinas Pangan dan Pertanian prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan sedangkan untuk prioritas daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan serta meningkatkan produktifiktas ekonomi sektor unggulan daerah. Sektor unggulan daerah pada Dinas Pangan dan Pertanian diantaranya : Sektor Pertanian dan Perikanan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program yang menjadi acuan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program lainnya, serta subkegiatan dengan subkegiatan lain pada Dinas Pangan dan Pertanian dan instansi terkait, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/ tugas yang melekat pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 berpedoman kepada Perubahan Renstra 2024-2026. Selain itu Renja Tahun 2024 telah secara penuh menerapkan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur baru sesuai ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, baik proses maupun hasilnya masih jauh dari sempurna. Sebagimana pengalaman tahun-tahun sebelumnya akan terjadi penyempurnaan terhadap Renja ini, terutama dalam rumusan program, kegiatan dan subkegiatan. Namun demikian meskipun nanti ada kegiatan yang tidak diakomodir sepenuhnya dalam APBD karena keterbatasan anggaran atau penyebab lainnya, kami berharap agar esensi kegiatan tersebut tetap ada meskipun digabung dengan kegiatan lainnya.

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 dalam Pelaksanaan mengacu kepada mekanisme pelaksanaan rencana pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat menbantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Padang Panjang, Agustus 2023

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang

ADE NAFRITA ANAS, SP., MP
Pembina Utama Muda
NIP.19710520 199903 2 004


PADANG PANJANG
KOTA SERAMBI MEKAH

PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdullillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena curahan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat menyusun salah satu dokumen penting yakni Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang diharapkan mampu mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kualitas infrakstruktur perhubungan berkelanjutan melalui program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Diharapkan nantinya perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas sesuai indikatornya dan terukur.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
Nip.19691112 198602 1 002

DAFTAR ISI

Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang 23

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat 39

Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang 41

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 42

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang 49

BAB V : Penutup 57

DAFTAR ISI

Pengantar			**i**
Daftar Isi			**ii**
Daftar Tabel			**iii**
Bab I	:	**Pendahuluan**	
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	1
		1.3 Maksud dan Tujuan	4
		1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II	:	**Hasil Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun Lalu**	
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang	6
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang	21
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang	23
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
		2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat	39
Bab III	:	**Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang**	
		3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang	41
		3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	42
BAB IV	:	**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang**	49
BAB V	:	**Penutup**	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang	6
Tabel 2.2	Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dan Capaian Renstra	9
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang	22
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Sasasaran Daerah	24
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan RKPD	27
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Kunci	41
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	44
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024	50

BAB I
PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Renja memuat hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran rencana kerja serta memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dan sub kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun lalu, meliputi; evaluasi pencapaian target program dan kegiatan. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan.

Selanjutnya Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang.

2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pengemudi di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5368);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 528);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat);
22. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
23. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

24. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12).

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang serta mewujudkan efesiensi alokasi berbagai sumber daya.

2. Tujuan

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
c. Mengukur kinerja penyelenggara fungsi dan urusan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RPKD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

3.3 Program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dimana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang terdiri dari 2 (dua) program, 13 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagai tahun ketempat masa RPJMD Kota Padang Panjang periode 2018-2023.

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 dapat dilihat pada hasil capaian kinerja indikator RPJMD 2018-2023 dan capaian kinerja indikator renstra 2018-2023 pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	Angka	97.50	96.62	99.09	97.46	0.86

Dapat dilihat dari tabel diatas capaian tahun 2022 sangat baik jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0.86%.

Hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 26 unsur pelayanan yang ada, terdapat 24 unsur pelayanan yang berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik, 1 unsur berada pada nilai kinerja unsur Baik dan 1 unsur berada pada kinerja unsur

Kurang Baik. Jika dilihat lebih detail unsur memperoleh nilai tertinggi terdapat 9 yang masing-masingnya memperoleh nilai rata-rata sama sebesar 4,000 (100), yaitu :

- unsur pemanfaatan marka jalan di jalan kota Padang Panjang (Unsur ke-7),
- unsur kesesuaian pemanfaatan marka jalan di kota Padang Panjang (Unsur ke-8),
- unsur ketersediaan pelayanan uji kelayakan kendaraan di kota Padang Panjang (Unsur ke-14),
- unsur manfaat layanan uji kelayakan kendaraan di kota Padang Panjang (Unsur ke-16),
- unsur kesesuaian sarana dan prasarana infrastruktur layanan uji kelayakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah kota Padang Panjang (Unsur ke-17),
- unsur kemanfaatan lampu penerangan jalan di kota Padang Panjang (Unsur ke-20,
- unsur keberadaan petugas parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-24),
- unsur fungsi petugas parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-25),
- unsur kemahalan biaya retribusi parkir yang harus dibayar di kota Padang Panjang (Unsur ke-26).

Penilaian persepsi masyarakat terhadap penilaian 9 unsur tersebut yaitu sangat memuaskan, sehingga harus dipertahankan pada masa yang akan datang.

Sedangkan terdapat 2 unsur terendah dan berada pada kinerja unsur Baik dan Kurang Baik. Terdapat 1 unsur yang berada pada kinerja unsur Baik yaitu unsur kepedulian petugas dishub di area padat aktifitas publik di kota Padang Panjang (Unsur ke-13) memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,260 (81,50). Sedangkan 1 unsur lainnya berada pada kinerja unsur Kurang Baik yaitu unsur ketersediaan prasarana/lahan parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-22) memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,970 (74,25). Penilaian masyarakat terhadap 2 unsur terendah tersebut yaitu :

a. Lahan parkir yang ada di kota Padang Panjang belum mencukupi untuk masyarakat, terutama di pasar dan daerah pasar kuliner sehingga parkir banyak dilakukan dibahu jalan dan antri parkir.
b. Menurut sebagian besar masyarakat mengatakan bahwasannya petugas 24 dishub kurang membantu masyarakat terutama di Jl. Jendral Sudirman.

Oleh karenanya berdasarkan hasil olah data Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan infrastruktur Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, maka

diperoleh nilai SKM layanan infrastruktur sebesar 96,62 termasuk dalam mutu A dan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik. (Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Traffict Light, Petugas, Uji KB, Lampu Jalan, dan Lahan Parkir).

Adapun gambaran evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dan pencapaian Rencana Strategis sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM	RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
			CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)	DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
1	URUSAN WAJIB									
1	URUSAN PERHUBUNGAN									
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	15	15	15	15	100%	0	30	200%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan	14	14	14	14	100%	14	42	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	100%	0	2	200%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	17	17	17	17	100%	0	34	200%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis realisasi anggaran	1	1	1	1	100%	0	2	200%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen alat listrik yang disediakan	15	15	15	15	100%	15	45	300%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik	5	5	6	6	100%	6	17	340%
		Jumlah Unit gedung kantor yang dilaga dan dibersihkan	2	2	2	2	100%	2	6	300%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis cetak dan penggandaan	2	2	2	2	100%	2	6	300%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	0	0	0	0%	12	12	100%
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	550	304	600	530	88%	650	1484	270%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)			
		jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	1	1	1	1	100%	1	3	300%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	15	1	11	3	27%	15	19	127%
		Jumlah kendaraan yang diadakan	3					3	3	100%
		Jumlah Meubiler yang diadakan	5					5	5	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	jumlah tagihan rekening yang dibayar	3	3	3	3	100%	0	6	200%
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12					12	12	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	15	15	15	15	100%	0	30	200%
		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12					15	15	125%
	Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11	11	11	11	100%	11	33	300%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4	4	5	5	100%	5	14	350%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat besar yang terpelihara dan dibayarkan perizinannya	1	1	1	2	200%	1	4	400%
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15		0	12	0%	15	27	180%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung dan perlengkapan kantor yang dijaga dan dibersihkan	2	2	2	2	100%	2	6	300%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)			
	Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RIJ LLAJ	*1*		1	0	0%	0	0	0%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	1	1	0	0	0%	0	1	100%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan dijalan kabupaten/kota yang tersedia	1500		1500	1500	100%	1500	3000	200%
		Jumlah penambahan jaringan tiang dan lampu jalan dalam kota	11	0	15	13	87%	0	13	118%
		Jumlah jenis alat pengendalian dan pengamanan lalu lintas	0	1	0	0	0%	0	1	0%
		Jumlah lokasi parkir	0	16	0	0	0%	0	16	0%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	5	5	5	5	100%	5	15	300%
	Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C									
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen yang disusun	10	10	10	10	100%	10	30	300%
		Jumlah hari razia penertiban angkutan barang/orang	8	8	10	15	150%	15	38	475%
		Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	1					1	1	100%
	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota	Jumlah lokasi parkir tepi jalan umum	16	0	16	16	100%	16	32	200%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	16	0	16	16	100%	16	32	200%
		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupten/kota	12					1	1	8%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kartu bukti lulus uji elektronik	1500		4000	2000	50%	1500	3500	233%
		Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1					1	1	100%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	10	10	2	10	500%	10	30	300%
	Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota									
	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupten/kota	Jumlah survey	10		10	12	120%	10	22	220%
		Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	1					1	1	100%
	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah jnis fasilitas keselamatan lalu lintas			2	2	100%	2	4	0%
		Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	20					20		0%
		Volume marka lalu lintas yang terpasang	500					500		0%
	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pengawsan dan pengendalian lalu lintas jalan	3		3	3	100%	3	6	200%
		Jumlah tenaga bantuan lalu lintas	11		11	11	100%	11	22	200%
		Jumlah laporan pengawasan dan pengenalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untukjalan kabupaten/kota	1					1	1	100%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	2		2	2	100%	2	2	100%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan dijalan raya	0	3	0	0	0%	0	3	0%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota									
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antara kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Angkutan Mudik	2	0	1	1	0%	2	3	150%
		Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan truk	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Jumlah pangkalan truk yang dipelihara	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Jumlah portal TPR	2	2	0	0	0%	0	2	100%
		Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antara kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1					1	1	100%
		Jumlah tenaga pemungut retribusi	6	6	6	6	100%	6	18	300%

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19691112 198602 1 002

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

1) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target kinerja 600 orang kegiatan terealisasi sebanyak 530 orang kegiatan atau 94,48%. Faktor penyebab rendahnya capaian realisasi renja tahun 2022 karena rapat-rapat dilaksanakan sesuaikan dengan kebutuhan.

Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.484 orang kegiatan dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 550 orang kegiatan maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 270%.

2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja 11 unit terealisasi 3 unit atau 27%. Faktor penyebab rendahnya capaian realisasi renja tahun 2022 karena hanya beberapa usulan yang dapat diakomodir dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 19 unit dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian rentra tahun 2023 sebanyak 15 unit maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 127%.

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan :

1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan target kinerja 1 dokumen terealisasi 0 dokumen atau 0%. Faktor penyebab rendahnya capaian realisasi renja tahun 2022 karena dampak refocusing anggaran sehingga kegiatan ini ditunda untuk sementara waktu. Sehingga perkiraan realisasi capaian renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 nihil.

2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 15 unit terealisasi 13 unit atau 87%. Faktor penyebab rendahnya capaian realisasi renja tahun 2022 karena.....

Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 13 unit dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 11 unit maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 118%.

3) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan target kinerja 4000 set terealisasi sebanyak 2000 set atau 50%. Faktor penyebab rendahnya realisasi renja tahun 2022 karena dilakukan kembali penghitungan kebutuhan dan menyesuaikan dengan anggaran tersedia.

Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 3.500 set dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 1.500 set maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 223%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 15 laporan terealisasi 15 laporan atau 100%.

Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 30 laporan dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 15 laporan maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 200%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 14 bulan dan realisasi 14 bulan atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 30 laporan dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 15 laporan maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 200%.

84

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja 1 laporan dan realisasi 1 laporan atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2 laporan dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 1 laporan maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 200%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan target kinerja 17 laporan dan realisasi 17 laporan atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 34 laporan dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 17 laporan maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 200%.
- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target kinerja 1 laporan dan realisasi 1 laporan atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2 laporan dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 1 laporan maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 200%.

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 15 jenis dan terealisasi 15 jenis atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 45 jenis dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 15 jenis maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 300%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja 6 jenis dan terealisasi 6 jenis atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 17 jenis dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 5 jenis maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 340%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target kinerja 2 jenis dan terealisasi 2 jenis atau 100%. Perkiraan realisasi

capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 6 jenis dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 2 jenis maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 300%.

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dengan target kinerja 3 rekening dan terealisasi 3 rekening atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 6 rekening dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 3 jenis maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 200%.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 15 orang dan terealisasi 15 orang atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 30 orang dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 15 orang maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 200%.

4) Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja 11 unit dan terealisasi 11 unit atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 33 unit dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 11 unit maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 300%.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target kinerja 5 unit dan terealisasi 5 unit atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 14 unit dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 4 unit maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 350%.
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya dengan target kinerja 0 unit dan terealisasi 12 unit. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 27 unit dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian

renstra tahun 2023 sebanyak 15 unit maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 180%.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target kinerja 2 unit dan terealisasi 2 unit atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 6 unit dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 2 unit maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 300%.

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan :

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 1.500 titik dan terealisasi 1.500 titik atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 3.000 titik dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 1.500 titik maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 200%.
   - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan target kinerja 5 jenis dan terealisasi 5 jenis atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 15 jenis dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 5 jenis maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 300%.
2) Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C
   - Sub Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana terminal dengan target kinerja 10 dokumen dan terealisasi 10 dokumen atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 30 dokumen dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 10 dokumen maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 300%.
3) Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota dengan target kinerja 16 titik dan terealisasi 16 titik atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 32 titik dan jika dibandingkan dengan

target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 16 titik maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 200%.

4) Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan target kinerja 2 jenis dan terealisasi 2 jenis atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2 jenis dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 2 jenis maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 100%.
   - Sub Kegiatan Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota dengan target kinerja 3 kegiatan dan terealisasi 3 kegiatan atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 6 kegiatan dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 200%..
   - Sub Kegiatan Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota dengan target kinerja 2 laporan dan terealisasi 2 laporan atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2 laporan dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 2 laporan maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 100%.

5) Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
   - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antara kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan target kinerja 1 unit dan terealisasi 1 unit atau 100%. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 3 unit dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 2 unit maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 150%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

1) Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan target kinerja 1 unit dan terealisasi 2 unit atau 200%. Faktor pendukung tingginya realisasi kinerja tahun 2022 karena bertambahnya 1 unit kendaraan alat besar yakni mutasi asset dari Dinas PUPR. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 4 unit dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 1 unit maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 400%.

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan :

1) Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C

- Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal dengan target kinerja 10 hari dan terealisasi 15 hari atau 150%. Faktor pendukung tingginya realisasi kinerja tahun 2022 karena bertambahnya jumlah hari razia penertiban angkutan barang/orang. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 38 hari dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 8 hari maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 475%.

2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor dengan target kinerja 2 unit dan terealisasi 10 unit atau 500%. Faktor pendukung tingginya realisasi kinerja tahun 2022 karena perubahan target kinerja jumlah alat uji pada UPTD PKB yang dipelihara. Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 30 unit dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 10 unit maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 300%.

3) Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota

- Sub Kegiatan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupten/kota dengan target kinerja 10 kali dan terealisasi 12 kali

Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 22 kali dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian renstra tahun 2023 sebanyak 10 kali maka tingkat capaian realisasi target renstra tahun 2023 sebesar 220%.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang secara keseluruhan memenuhi capaian kinerja renstra.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran adalah meningkatkan kualitas penyusunan rencana kegiatan sesuai kebutuhan dan terukur serta akan dilaksanakankan optimalisasi kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang memaparkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan indikator Program Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

DINAS PERHUBUNGAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum			NA	NA	NA	NA	607,500	621,000	621,000	634,500	648,000	648,000	
2	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)			NA	NA	NA	NA	30	30	30	30	30	30	
3	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum													
	PNP			NA	NA	NA	NA	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
	Bus dan Barang			NA	NA	NA	NA	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
4	Angkutan Darat			NA	NA	NA	NA	110	110	110	110	110	110	
5	Ketersediaan terminal angkutan penumpang			NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	
6	Persentase perlengkapan fasilitas keselamatan			83.08	83.73	84.78	84.80	81.99	83.20	84.20	84.20	84.78	84.80	
7	Pemasangan rambu-rambu			NA	NA	NA	NA	680	680	680	688	690	690	
8	Persentase kendaran lolos uji keur			98.16	98.86	99.10	99.10	97.95	156.25	157.25	98.86	99.10	99.10	
9	Jumlah Angka Kecelakaan			33	30	28	28	30	46	14	30	28	10	
10	Persentase panjang jalan terlayani			33.95	33.95	33.95	33.95	27.02	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19691112 198602 1 002

Capaian kinerja pelayanan urusan perhubungan menunjukkan capaian realisasi cukup baik dimana dari tabel diatas ada beberapa indikator yang menjadi indicator prioritas dalam mendukung tujuan Dinas Perhubungan diantaranya :

1. Persentase Perlengkapan fasilitas keselamatan

   Realisasi capaian renstra tahun 2022 sebesar 84,20% dari target renstra sebesar 83,73% atau tingkat capaian sebesar 100,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 83,20% maka mengalami peningkatan capaian sebesar 100%. Untuk proyeksi tahun 2023 diharapkan lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh pemenuhan fasilitas keselamatan seperti rambu-rambu, traffic light, warning light, cermin tikung, pagar pengaman, halte.

2. Persentase Kendaraan Lolos Uji Keur

   Realisasi capaian renstra tahun 2022 sebesar 157,25% dari target renstra sebesar 98,86% atau tingkat capaian sebesar 159,06%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 156,25% maka mengalami peningkatan capaian sebesar 100%. Untuk proyeksi tahun 2023 diharapkan lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh pemenuhan fasilitas gedung dan alat uji kendaraan bermotor serta penguji yang berkompetensi.

3. Jumlah Angka Kecelakaan

   Realisasi capaian renstra tahun 2022 sebesar 14 dari target renstra sebesar 30 atau tingkat capaian sebesar 46,66%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 46 maka mengalami peningkatan capaian sebesar 69,56%. Untuk proyeksi tahun 2023 diharapkan lebih menurun dari tahun sebelumnya. Msih terjadinya kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pelanggaran lalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi aturan lalu lintas. Penurunan angka kecelakaan didukung oleh kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan pada jam sibuk dan keramaian.

4. Persentase Panjang Jalan Terlayani

   Realisasi capaian renstra tahun 2022 sebesar 33.95% dari target renstra sebesar 33.95% atau tingkat capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 33.95% maka tingkat capaian sebesar 100%. Untuk proyeksi tahun 2023 diharapkan lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan layanan didukung dengan beroperasinya angkutan kota dan bus sekolah pada 2 (dua) kecamatan di Kota Padang Panjang.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2022 juga dapat dilihat dari persentase capaian indikator kinerja sasaran daerah yang mendukung tercapainya sasaran meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berkualitas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	*2*	*3*
Indeks kualitas Infrastruktur Perhubungan	97,50%	96,62%

Dapat dilihat bahwa pemenuhan indikator kinerja sasaran daerah urusan perhubungan dengan target 97.50% dan capaian realisasi 96,62% dimana capaian ini diperoleh berdasarkan nilai suvey kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur perhubungan di Kota Padang Panjang.

Hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 26 unsur pelayanan yang ada, terdapat 24 unsur pelayanan yang berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik, 1 unsur berada pada nilai kinerja unsur Baik dan 1 unsur berada pada kinerja unsur Kurang Baik. Jika dilihat lebih detail unsur memperoleh nilai tertinggi terdapat 9 yang masing-masingnya memperoleh nilai rata-rata sama sebesar 4,000 (100), yaitu :

a. unsur pemanfaatan marka jalan di jalan kota Padang Panjang (Unsur ke-7),
b. unsur kesesuaian pemanfaatan marka jalan di kota Padang Panjang (Unsur ke-8),
c. unsur ketersediaan pelayanan uji kelayakan kendaraan di kota Padang Panjang (Unsur ke-14),
d. unsur manfaat layanan uji kelayakan kendaraan di kota Padang Panjang (Unsur ke-16),
e. unsur kesesuaian sarana dan prasarana infrastruktur layanan uji kelayakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah kota Padang Panjang (Unsur ke-17),
f. unsur kemanfaatan lampu penerangan jalan di kota Padang Panjang (Unsur ke-20,
g. unsur keberadaan petugas parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-24),
h. unsur fungsi petugas parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-25),
i. unsur kemahalan biaya retribusi parkir yang harus dibayar di kota Padang Panjang (Unsur ke-26).

Penilaian persepsi masyarakat terhadap penilaian 9 unsur tersebut yaitu sangat memuaskan, sehingga harus dipertahankan pada masa yang akan datang.

Sedangkan terdapat 2 unsur terendah dan berada pada kinerja unsur Baik dan Kurang Baik. Terdapat 1 unsur yang berada pada kinerja unsur Baik yaitu unsur kepedulian petugas dishub di area padat aktifitas publik di kota Padang Panjang (Unsur ke-13) memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,260 (81,50). Sedangkan 1 unsur lainnya berada pada kinerja unsur Kurang Baik yaitu unsur ketersediaan prasarana/lahan parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-22) memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,970 (74,25). Penilaian masyarakat terhadap 2 unsur terendah tersebut yaitu :

a. Lahan parkir yang ada di kota Padang Panjang belum mencukupi untuk masyarakat, terutama di pasar dan daerah pasar kuliner sehingga parkir banyak dilakukan dibahu jalan dan antri parkir.
b. Menurut sebagian besar masyarakat mengatakan bahwasannya petugas 24 dishub kurang membantu masyarakat terutama di Jl. Jendral Sudirman.

Oleh karenanya berdasarkan hasil olah data Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan infrastruktur Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, maka diperoleh nilai SKM layanan infrastruktur sebesar 96,62 termasuk dalam mutu A dan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik. (Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Traffict Light, Petugas, Uji KB, Lampu Jalan, dan Lahan Parkir).

.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Adapun isu-isu penting yang sangat mendasar sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang antara lain :

1. ***Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang***
   a. Belum optimalnya kualitas dan layanan angkutan umum sebagai sarana angkutan massa;
   b. Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas;
   c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan;
   d. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas;

e. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor;
f. Belum memadainya terminal angkutan penumpang dan pangkalan truk (rest area);
g. Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas;
h. Belum memadainya sarana dan prasarana perparkiran.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas perhubungan telah melakukan review terhadap rancangan RKPD tahun 2024 dengan tujuan menyesuaikan belanja dengan kebutuhan pada sub kegiatan sehingga terdapat kesesuaian indikator kinerja, target dan anggaran.

Proses review dilaksanakan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2024. Hal ini perlu dilakukan sebagai referensi penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang adakan ditetapkan.

Dalam review ini terdapat perbedaan antara rancangan awal RPKD dan analisis kebutuhan dimana hal ini terjadi karena perkiraan anggaran yang sudah disusun dalam Pra RKA tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan dan setelah dibahas bersama dengan tim Bappeda terdapat pengurangan plafon anggaran mengingat sumber dana yang tidak memadai.

Berikut tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

DINAS PERHUBUNGAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan**	**100%**	**6,522,959,100**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan**	**100%**	**8,858,383,950**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Padang Panjang**	**Persentase layanan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**5,410,006,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase layanan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**5,654,115,000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	5,410,006,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	5,654,115,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Padang Panjang**	**Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan**	**48 paket**	**36,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan**	60 Paket	**90,000,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 paket	36,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	90,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**163,914,500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**337,268,650**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	8,444,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 paket	8,530,000	

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	(Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 paket	45,470,100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	54,594,800	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24,143,850	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	250,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**90%**	**50,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**90%**	**1,514,678,000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	424,678,000	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	240,000,000	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	700,000,000	

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	75 Unit	150,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Padang Panjang**	**Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah**	**100%**	**478,230,800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**100%**	**478,230,800**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55,021,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	55,021,200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	423,209,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	423,209,600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Padang Panjang**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**384,807,800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**784,091,500**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	77,047,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	102,349,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	150,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	224,336,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Padang Panjang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	104,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	113,650,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	10,540,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	43,756,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	42,320,800	Rehap Sedang Berat Gedung Kantor		Jumlah Kantor yang direhap sedang berat	2 unit	250,000,000	
						Pemeliharaan peralatan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	50,000,000	

NO	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Padang Panjang**	**Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor**	**68%**	**4,702,692,350**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		Persentase layanan angkutan Darat	**0.0605%**	**7,682,169,500**	
			Persentase layanan angkutan Darat Rata rata	0.0605%				Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	68,00 %		
			Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	85.00%				Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0.003700		
			Persentase penerangan jalan umum (PJU)	87%							
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0.003700							
						Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen RIJ LLAJ**	**1**	**349,180,000**	
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	349,180,000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Padang Panjang**	**Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik**	**84,30 %**	**2,913,562,450**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik**	**84,30**	**3,684,584,150**	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Padang Panjang	umlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1500 unit	2,813,562,450	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1513unit	3,449,614,150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Padang Panjang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 unit	100,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 unit	234,970,000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Padang Panjang**	**Jumlah terminal Tipe C yang di kelola**	**1 unit**	**82,726,000**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**Jumlah terminal Tipe C yang di kelola**	**1 unit**	**121,836,000**	
	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Padang Panjang	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 dokumen	82,726,000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 unit	121,836,000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Padang Panjang**	**Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum**	**16 Titik**	**561,200,000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas**		**Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum**	**16 Titik**	**636,379,600**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	561,200,000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	636,379,600	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Padang Panjang**	**persentase kendaraan yang terlayani melakuka pengujian berkala**	**96.64%**	**102,000,000**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian**	**96.64%**	**709,500,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500 dokumen	30,000,000	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	300,000,000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 unit	72,000,000	peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 org	50,000,000	
						Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000	87,500,000	
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 unit (10 unit alat uji dan kalibrasi, 2 unit generator set dan kompresor)	272,000,000	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Padang Panjang**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu linta**	**4 kegiatan**	**664,254,800**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan**		**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu linta**	**4 kegiatan**	**1,291,338,300**	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Padang Panjang**	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	367,969,800	Penataan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	64,875,000	

89

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Padang Panjang**	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan	20,766,000	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas		Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 jenis	563,130,000	
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	**Padang Panjang**	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 dokumen	225,519,000	Uji Coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen Rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan kab/kota		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 dokumen	65,197,500	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Padang Panjang**	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 laporan	50,000,000	pengawasan dan pengendalian efektiftas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk JalanKabupaten /Kota	12 laporan	560,019,800	
						Forum lalu lintas angkutan jalan kab/kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan	38,116,000	
						Persetujuan Hasil Analisis Dampak LaLu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota		**Jumlah dokumen Andalalin**	**1 dokumen**	**190,738,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penetapan kebijakan tata kelola andalalin		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	1 dokumen	30,758,000	
						Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin		Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	105,475,000	
						Koordinasi dan sinkronisasi penilaan hasil andalalin		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Dokumen	29,825,000	
						Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Dokumen	24,680,000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Padang Panjang**	**Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang**	**1215 angka**	**378,949,100**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah**		**Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang**	**1215 angka**	**698,613,450**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	378,949,100	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antara kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	698,613,450	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

PEMERINTAH KOTA DINAS PERHUBUNGAN PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19691112 198602 1 002

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 serta hasil analisis kebutuhan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan, berikut uraiannya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Rancangan awal RKPD tahun 2024 dengan target capaian 100% dan pagu indikatif sebesar Rp. 6.522.959.100,00 setelah dianalisis sesuai kebutuhan target capaian 100% dan pagu indikatif meningkat menjadi Rp. 8.858.383.950,00. Dengan kegiatan sebagai berikut :

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 5.654.115.000,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 5.410.006.000,00. Faktor penyebab penambahan karena bertambahnya jumlah pegawai.

   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 36.000.000,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 90.000.000,00. Factor penyebab penambahan karena jumlah pegawai dan besaran satuan harga pakaian dinas harian.

   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 163.914.500,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 337.268.650,00. Factor penyebab penambahan karena pemenuhan kebutuhan rutin perlengkapan kantor dan frekuensi perjalanan dinas urusan perhubungan.

   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

      Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 1.514.678.000,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 50.000.000,00. Factor penyebab penambahan karena penambahan sub kegiatan dan pemenuhan kebutuhan sarana peralatan kantor, meubiler dan kendaraan dinas.

   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 1.514.678.000,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 50.000.000,00. Factor penyebab penambahan karena pemenuhan kebutuhan sarana peralatan kantor, meubiler dan kendaraan dinas.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan tidak terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 478.230.800,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 478.230.800,00.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 784.091.500,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 384.80.800,00. Factor penyebab penambahan karena pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas, rehab berat gedung kantor, pemeliharaan gedung dan peralatan kantor.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Rancangan awal RKPD tahun 2024 dengan 5 (lima) indicator dan pagu indikatif sebesar Rp. 4.702.692.350,00 setelah dianalisis sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dengan indicator program prioritas RPD maka indikator menjadi 3 dan pagu indikatif meningkat menjadi Rp. 7.682.169.500,00. Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 349.180.000,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 0,00. Factor penyebab penambahan karena pentingnya penyusunan dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 3.684.584.250,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 2.913.562.450,00. Factor penyebab penambahan karena pemenuhan peralatan dan bahan persediaan penerangan jalan umum serta pemeliharaan rambu-rambu bersuar dan tidak bersuar.

c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 121.836.000,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 82.726.000,00. Faktor penyebab penambahan karena pemenuhan dokumen penilaian WTN, razia penertiban angkutan barang/orang. Dan pengawasan terminal tipe C.

d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 636.379.600,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 561.200.000,00. Faktor penyebab penambahan karena pemenuhan upah tenaga pemungut retribusi parkir, pengawasan perparkiran dan sewa lahan parkir.

e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan kegiatan dan pagu indikatif sebesar Rp. 709.500.600,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 102.000.000,00. Faktor penyebab penambahan karena pemenuhan pengadaan alat uji, peningkatan SDM penguji berkompetensi, penyediaan kartu uji dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor.

f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan kegiatan dan pagu indikatif sebesar Rp. 1.291.338.300,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 664.254.800,00. Faktor penyebab penambahan karena pemenuhan jumlah survey, pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, forum lalu lintas.

g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak LaLu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota

Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan kegiatan dan pagu indikatif sebesar Rp. 190.738.000,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 0,00. Faktor penyebab penambahan kegiatan karena sangat dibutuhkan penetapan kebijakan tata kelola andalalin, peningkatan kapasitas penilai andalalin, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin serta pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin.

h. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Review terhadap rancangan awal RKPD serta hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 698.613.450,00 dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 378.949.100,00. Faktor penyebab penambahan karena pemenuhan upah pemungut retribusi, sewa angkutan mudik, pengawasan pangkalan truk, pemeliharaan halaman gedung kantor (jalur keluar masuk angkutan barang).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pemenuhan usulan para pemangku kepentingan Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui musrenbang dan pokir. Adapun usulan musrenbang dan pokir

tersebut sekaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang menjadi urusan Dinas Perhubungan.

Pada pembahasan musrenbang dan pokir terdapat beberapa usulan pemangku kepentingan, namun dalam pengusulan musrenbang urusan perhubungan ditunda untuk sementara waktu dikarenakan mendahulukan akomodir usulan musrenbang lainnya yang lebih prioritas sedangkan usulan pokir terkendala pada syarat-syarat administrasi yang belum lengkap sehingga perangkat daerah tidak bisa melakukan verifikasi dan validasi. Harapan kedepan dalam pengusulan pokir harus benar-benar memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum nasional bidang perhubungan adalah mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan menyediakan infrastuktur perlengkapan lalu lintas yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan tranportasi lalu lintas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang merupakan rangkuman program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 terencana dengan baik serta dapat mengakomodir usulan–usulan yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Kelurahan dan ditingkat Kecamatan yang sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan yakni "Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan", didukung dengan capaian sasaran "Peningkatan Kualitas Layanan Insfrastruktur Perhubungan.

Adapun yang menjadi indikator kinerja kunci berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 dan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai Permendagri 18 Tahun 2020, maka pada Dinas Perhubungan ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

Tabel . 3.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Penyelenggaran Urusan Perhubungan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Rumus Penghitungan*	Target 2024	*Sumber Data*
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	IK1 + IK2 IK 1 (Angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)	1	*(13x1)/13 + (0)*
2	Kinerja lalu Lintas kota	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	0.339	*2,713/8*

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, sebagai lembaga teknis daerah telah dapat menyusun Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, yang merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026.

Rumusan program dan kegiatan ini mendukung sasaran RPD Tahun 2024-2026 dan tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024 bidang urusan perhubungan yakni meningkatkan kualitas layanan infrastruktur.

Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) Program, 12 (tiga belas) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan ;

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
   a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
   b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
   d) Pemeliharaan peralatan mesin lainnya
   e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

7. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota
   b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

8. Pengelolaan terminal dan Pemeliharaan Tipe C
    a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
9. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
    a) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenanggan kab/kota
10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    a) Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor
    b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
11. Kegiatan pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota
    a) Penataan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota
    b) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas.
    c) Pengawasan dan pengendalian evektiftas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota
    d) Forum lalu lintas angkutan jalan kab/kota
12. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
    a) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antara kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA PADANG PANJANG

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					DINAS PERHUBUNGAN				11,225,651,450					10,494,908,550
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				11,225,651,450					10,494,908,550
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan		100 Persen	6,522,959,100			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 Persen	6,110,686,100
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	5,410,006,000			Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	5,013,792,100
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	714 orang/bulan	5,410,006,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 orang/bulan	5,013,792,100
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	36,000,000			Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	-
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 paket	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah		100 Persen	163,914,500			Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 Persen	293,530,000
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	8,444,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8,530,000
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	45,470,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20,000,000
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220,000,000
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**		**90 Persen**	**60,000,000**			**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**90 Persen**	**20,000,000**
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 unit (10 unit PC, 20 printer, Laptop 12 unit, mesin ptong rumput 2 unit)	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit (10 unit PC, 20 printer, Laptop 6 unit)	20,000,000
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100 Persen**	**478,230,800**			**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**394,144,000**
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	55,021,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	334,144,000
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	423,209,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60,000,000
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**100 Persen**	**384,807,800**			**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 Persen**	**389,220,000**
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	77,047,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	77,000,000
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	150,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	150,300,000
2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	104,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	104,600,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024								
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Belanja Pegawai Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	10,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	15,000,000
2 15 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	42,320,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	42,320,000
2 16 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase layanan angkutan darat**		**0.0605%**	**4,702,692,350**			**Persentase layanan angkutan darat**	**0.0582%**	**4,384,222,450**
		Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor		**68,00 Persen**				**Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor**	**69,6 Persen**	
		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan		**0,003700 angka**				**Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan**	**0,003681 angka**	
2 16 02 2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik**		**84,3 Persen**	**2,913,562,450**			**Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik**	**84,4 Persen**	**2,823,862,450**
2 15 02 2.02 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1513unit	2,813,562,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1533 unit	2,723,862,450
2 15 02 2.02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 unit	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 unit	100,000,000
2 15 02 2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah terminal Tipe C yang di kelola**		**1 unit**	**82,726,000**			**Jumlah terminal Tipe C yang di kelola**	**1 unit**	**80,000,000**
2 15 02 2.03 0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	82,726,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	80,000,000
2 15 02 2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum**		**16 titik**	**561,200,000**			**Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum**	**16 titik**	**462,960,000**
2 15 02 2.04 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	561,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	462,960,000
2 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala**		**96,64 Persen**	**102,000,000**			**persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala**	**97,00 Persen**	**125,000,000**
2 15 02 2.05 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3500	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000	25,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 15 02 2.05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 unit	100,000,000
2 15 02 2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**		**4 kegiatan**	**664,254,800**			**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**4 kegiatan**	**573,926,000**
2 15 02 2.06 0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan,	367,969,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	370,000,000
2 15 02 2.06 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	20,766,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	20,000,000
2 15 02 2.06 0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	225,519,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 dokumen	153,926,000
2 15 02 2.06 0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 laporan	30,000,000
2 15 02 2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang**		**1215 unit**	**378,949,100**			**Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang**	**1215 unit**	**318,474,000**
2 15 02 2.09 0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	378,949,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	318,474,000

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19691112 198602 1 002

Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mendukung urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar namun mendukung urusan perhubungan yang dimuat pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Perencanaan tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.225.651.450,00 dan perkiraan maju rencana tahun 2025 sebesar Rp. 10.494.908.550,00 yang terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.522.959.100,00 dan perkiraan maju rencana tahun 2025 sebesar Rp. 5.013.792.100,00.
2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.702.692.350,00 dan perkiraan maju rencana tahun 2025 sebesar Rp. 4.384.222.450,00.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 memuat Program dan Kegiatan beserta anggaran dana perangkat daerah tahun 2024. Hal ini merupakan korelasi yang tidak terpisahkan karena perwujudan dari rencana kerja adalah realisasi fisik dan keuangan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Periode Renstra OPD	Lokasi Output Kegiatan	Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah			Indikator (Rp.)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					DINAS PERHUBUNGAN					11,225,681,450						10,494,968,560	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					11,225,681,450						10,494,968,560	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan			100 Persen	6,522,959,100					100 Persen	6,110,686,100	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah			100 Persen	5,410,006,000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	100 Persen	5,013,792,100	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	714 orang/bulan	5,410,006,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	714 orang/bulan	5,013,792,100	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah			100 Persen	36,000,000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	100 Persen	-	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 paket	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	0 Paket	-	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah			100 Persen	163,914,500		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	ASN pada Dinas Perhubungan	100 Persen	293,530,000	Dinas Perhubungan

					Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Semua Kel/Desa				Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	45,470,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	4 Paket	45,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	12 Paket	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	12 Laporan	220,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**			**90 Persen**	**50,000,000**		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	**90 Persen**	**20,000,000**	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 unit (10 unit PC, 20 printer, Laptop 12 unit, mesin ptong rumput 2 unit)	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	36 unit (10 unit PC, 20 printer, Laptop 6 unit)	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**			**100 Persen**	**479,230,800**		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	**100 Persen**	**394,144,000**	Dinas Perhubungan

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Periode Renstra OPD	Lokasi Kegiatan	Capaian Kinerja	Pagu Indikasi (Rp.)	Sumber Dana						
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	55,021,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	36 Laporan	334,144,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	423,209,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	12 Laporan	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**			**100 Persen**	**384,807,600**		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	**100 Persen**	**389,220,000**	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	77,047,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	11 unit	77,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	150,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	5 unit	150,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	104,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	2 unit	104,600,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	10,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	15 unit	15,000,000	Dinas Perhubungan

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	42,320,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Dinas Perhubungan	2 unit	42,320,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase layanan angkutan darat**			**0.0605%**	**4,702,692,350**					**0.0582%**	-	
						Persentase Kepemilikan kaur kendaraan bermotor			**68,00 Persen**						**69,5 Persen**		
						Rasio panjang jalan pertumlah kendaraan			**0,003700 angka**						**0,003681 angka**		
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik			84,3 Persen	2,913,562,450		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	84,4 Persen	2,823,862,450	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1513unit	2,813,562,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1533 unit	2,723,862,450	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 unit	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	2 unit	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola			1 unit	82,726,000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 unit	80,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	82,726,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Perhubungan

					Kegiatan		OPD	Kegiatan	Kinerja									
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum			16 titik	561,200,000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	16 titik	462,960,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	561,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Laporan	462,960,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan yang tertayani melakukan pengujian berkala			98,64 Persen	102,000,000			Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	97,00 Persen	125,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3500	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1000	25,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	12 unit	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas			4 kegiatan	664,254,800		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	4 kegiatan	573,926,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan,	367,969,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Laporan	370,000,000	Dinas Perhubungan	

					Kegiatan	Keterangan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kegiatan	Kinerja									
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	20,766,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	2 Laporan	20,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	225,519,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	2 dokumen	153,926,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	12 laporan	30,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang**			**1215 unit**	**378,949,100**		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1215 unit	318,474,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	378,949,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Laporan	318,474,000	Dinas Perhubungan	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19691112 198602 1 002

Rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagaimana telah dijelas pada bab III, bahwa dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung sepenuhnya pembangunan dilingkup nasional maupun daerah. Dimana yang menjadi prioritas nasional adalah memperkuat insfrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sedangkan prioritas daerah adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini dimuat pada tujuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yakni meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perhubungan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang diawali rapat internal perangkat daerah, rapat forum antara Organisasi Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Musrenbang Kota Padang Panjang Tahun 2023, hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) disusun untuk Rencana Kerja Kota Padang Panjang yang didalamnya juga termasuk perencanaan penganggaran pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan pada tahun 2024. Rencana Kerja ini adalah tahun pertama dari RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026. Untuk pelaksanaan pembangunan dijabarkan dalam APBD setiap tahunnya. Dalam dokumen ini secara umum telah memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja, kegiatan disini masih diperlukan penyempurnaan guna peningkatan capaian kinerjanya.

Untuk anggaran tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang akan melaksanakan 2 (dua) program 12 Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, juga dengan melalui kerjasama dengan unit kerja lainnya atau pihak ketiga.

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

PEMERINTAH KOTA ★ DINAS PERHUBUNGAN ★ PADANG PANJANG

APRES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19112 198602 1 002

Rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagaimana telah dijelas pada bab III, bahwa dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung sepenuhnya pembangunan dilingkup nasional maupun daerah. Dimana yang menjadi prioritas nasional adalah memperkuat insfrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sedangkan prioritas daerah adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini dimuat pada tujuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yakni meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perhubungan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang diawali rapat internal perangkat daerah, rapat forum antara Organisasi Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Musrenbang Kota Padang Panjang Tahun 2023, hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) disusun untuk Rencana Kerja Kota Padang Panjang yang didalamnya juga termasuk perencanaan penganggaran pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan pada tahun 2024. Rencana Kerja ini adalah tahun pertama dari RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026. Untuk pelaksanaan pembangunan dijabarkan dalam APBD setiap tahunnya. Dalam dokumen ini secara umum telah memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja, kegiatan disini masih diperlukan penyempurnaan guna peningkatan capaian kinerjanya.

Untuk anggaran tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang akan melaksanakan 2 (dua) program 12 Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, juga dengan melalui kerjasama dengan unit kerja lainnya atau pihak ketiga.

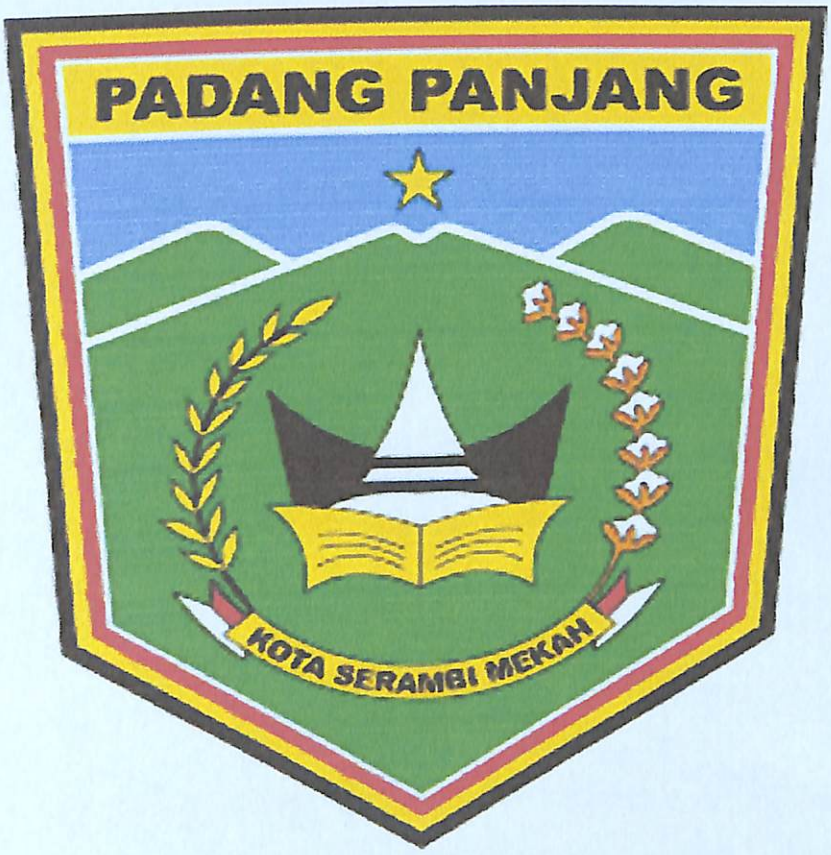
Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN

ARKES REFAGUS, S.Sos
Nip.19651112 198602 1002


PADANG PANJANG
KOTA SERAMBI MEKAH

PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PADANG PANJANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 16
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 18
2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20
BAB III TUJUAN, SASARAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 32
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 32
3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika 32
3.1.2 Badan Sandi dan Siber Negara 33
3.1.3 Badan Pusat Statistik 35
3.1.4 Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat 36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 38
3.3 Program dan Kegiatan 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 55
BAB V PENUTUP 72

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Kominfo merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Selanjutnya Renja ini akan menjadi pedoman sekaligus menjadi tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun 2024.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG,

Drs. AMPERA SH, M.Si.
NIP. 19680101 199803 1 010

DAFTAR ISI

)AFTAR ISI 1
)AB I PENDAHULUAN 2
.1 Latar Belakang 2
I.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4Sistematika Penulisan34
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 17
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD 18
2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 32
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 32
3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika 32
3.1.2 Badan Sandi dan Siber Negara 33
3.1.3 Badan Pusat Statistik 35
3.1.4 Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat 36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 38
3.3 Program dan Kegiatan 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 48
BAB V PENUTUP 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencananaan pembangunan nasional.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 138, disebutkan bahwa perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (Satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika didasari kepada :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
f. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

j. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

l. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

m. Peraturan Walikota Padang Panjang 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

n. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6):

o. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12):

p. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah. Disamping itu Renja juga digunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 ini antara lain untuk :

1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB IV : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menyelenggarakan 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar terkait urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Untuk melaksanakan masing masing urusan itu dialokasikan belanja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA setelah perubahan) sebesar Rp. 9.395.158.526,- dalam bentuk pelaksanaan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan selama tahun 2022. Adapun program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2022 secara fisik terealisasi sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.175.597.733,- atau mencapai 97,66%. Lebih lanjut, terkait dengan evaluasi pencapaian Renja Tahun 2022, Dapat dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 KOTA PADANG PANJANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X-XX-01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**100 %**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**100%**
X-XX-01-2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Capaian kinerja yang di susun***	***64 laporan***	**22**	**21**	**21**	***100%***	**21**	***64***	***100%***
X-XX-01-2.01-06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang di susun	64 laporan	22	21	21	***100%***	21	***64***	***100%***
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	1	1	1	***100%***	1	***3***	***100%***

1	2	3	4		5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X-XX-01-2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase layanan keuangan perangkat daerah***	***100***	***%***	***100***	***100***	***100***	***100%***	***100***	***100***	***100%***
X-XX-01-2.02-01	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan	42	bulan	14	14	14	***100%***	14	***42***	***100%***
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	orang	25	25	25	***100%***	25	***25***	***100%***
X-XX-01-2.02-05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun	3	laporan	1	1	1	***100%***	1	***3***	***100%***
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	1	1	1	***100%***	1	***3***	***100%***
X-XX-01-2.02-07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan dan semesteran yang di susun	54	laporan	18	18	18	***100%***	18	***54***	***100%***
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54	laporan	18	18	18	***100%***	18	***54***	***100%***
X-XX-01-2.02-08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis yang di susun	3	laporan	1	1	1	***100%***	1	***3***	***100%***
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	laporan	1	1	1	***100%***	1	***3***	***100%***
X-XX-01-2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran***	***100***	***%***	100	***100***	***100***	***100%***	***100***	***100***	***100%***
X-XX-01-2.06-01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan	4	jenis	4	4	4	***100%***	4	***4***	***100%***
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	4	4	4	***100%***	4	***4***	***100%***

1	2	3	4		5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X-XX-01-2 06-04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan	7	jenis	7	7	7	100%	7	7	100%
		Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat	2	jenis	2	2	2	100%	2	2	100%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	jenis	0	9	9	100%	9	9	100%
X-XX-01-2 06-05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3	Jenis	3	3	3	100%	3	3	100%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Jenis	0	3	3	100%	3	3	100%
X-XX-01-2 06-09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah	380	ok	130	125	125	100%	125	380	100%
		Jumlah makan minum rapat yang disediakan	6,000	ok	2000	2,000	2,000	100%	2,000	6,000	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
X-XX-01-2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah***	***100***	**%**	100	***100***	***100***	100%	***100***	***100***	100%
X-XX-01-2 08-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang di bayarkan	3	Rekening	3	3	3	100%	3	3	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	1	1	1	100%	1	3	100%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X-XX-01-2 08-04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan	3 Jenis	3	3	3	100%	3	3	100%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	8 orang	8	8	8	100%	8	8	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
X-XX-01-2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah***	**100 %**	100	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**100%**
X-XX-01-2 09-01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7	7	7	**100%**	7	**7**	**100%**
X-XX-01-2 09-02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7	7	7	**100%**	7	**7**	**100%**
X-XX-01-2 09-09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1	1	1	**100%**	1	**1**	**100%**
X-XX-01-2 09-10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Jenis	7	7	7	**100%**	7	**7**	**100%**
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Masyarakat yang menjadi sasasaran penyebaran informasi publik**	**50 %**	**37.6**	**45**	**42**	**93%**	**50**	**50**	**100%**
2-16-02-2.01	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Rata-rata kunjungan pada laman resmi kominfo Padang Panjang***	***85,000 %***	***40,000***	***80,000***	***243,846***	***305%***	***80,000***	***85,000***	***100%***

1	2	3	4		5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2-16-02-2 01-04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten videotron	2400	Konten	1455	750	990	***132%***	800	2,400	***100%***
		Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik	24	OPD	18	22	23	***105%***	24	24	***100%***
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	5	oang	5	5	5	***100%***	5	5	***100%***
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3	laporan	1	1	1	***100%***	1	3	***100%***
2-16-02-2 01-05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah	5	Jenis	5	5	5	***100%***	5	5	***100%***
		Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	2,700	rilis	1236	900	1491	***166%***	1000	3,727	***138%***
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3	laporan	1	1	1	***100%***	1	3	***100%***
2-16-02-2 01-07	Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah	5	Jenis	5	5	5	***100%***	5	15	***300%***
		Jumlah pertemuan jumpa pers	16	kali	0	8	8	***100%***	8	16	***100%***
		Jumlah Layanan Hubungan Media	3	laporan	0	1	1	***100%***	1	2	***67%***
2-16-02-2 01-12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang aktif	6	Kelompok	0	2	2	***100%***	2	4	***67%***
		Jumlah konten positif	40	konten	0	20	20	***100%***	20	40	100%
		Jumlah media tradisional yang dibina	3	Kelompok	2	1	1	***100%***	1	4	133%
		Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	2	kali	0	1	1	***100%***	1	2	100%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 laporan	1	1	1	***100%***	1	3	100%
2/16/2003	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks Implementasi tata kelola SPBE**	**2.15**		**2.1**	**2.1**	**100%**	**2.1**	**2.12**	**99%**
		Indeks Implementasi Layanan SPBE	**3.55**		**3.55**	**3.55**	**100%**	**3.55**	**3.55**	**100%**
2-16-03-2.02	***Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi***	***20 Layanan***	0	***16***	***16***	***100%***	***18***	***18***	***90%***
2-16-03-2.02-07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	20 Layanan	0	16	16	100%	18	20	100%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	7 orang	0	7	7	100%	7	14	67%
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	20 Layanan	0	16	16	100%	18	20	100%
2-16-03-2.02-10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	7 Jenis	0	7	7	100%	7	7	100%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	14 orang	0	14	14	100%	14	14	100%
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2/20/2002	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2-20-02-2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan***	***8 Dokumen***	0	**2**	**2**	***100%***	**3**	***8***	***100%***
2-20-02-2.01-01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	8 Dokumen	0	2	2	100%	3	8	***100%***
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 laporan	0	1	1	100%	1	3	***100%***
2-20-02-2.01-02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah pelatihan statistik sektoral yang diadakan	2 kegiatan	0	0	0	0%	1	2	***100%***
		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	48 orang	0	0	0	0%	24	48	***100%***
2/21/2002	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Sistem Elektronik/Layanan SPBE yang Telah Menerapkan tanda tangan Digital**	**100%**	**67%**	**89%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2-21-02-2.01	***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***jumlah pelatihan***	***3 ok***	***1***	***1***	***1***	***100%***	***1***	***3***	***100%***
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8= 7/6**	**9**	**10= (5+7+9)**	**11= (10/4)**

2-21-02-2 01-02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	24	ok	0	24	24	100%		24	100%
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
2-21-02-2 01-03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelatihan	2	kegiatan		0	0	0%	1	1	100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2	laporan		0	0	0%	1	1	100%

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa dari 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan selama tahun 2022 hanya 1 (satu) program yang realisasinya sedikit dibawah target yakni Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian 93%. Hal ini dikarenakan ada sedikit penyesuaian pada perhitungan indikator Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dimana penyusunan program dan kegiatan diarahkan dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yakni urusan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun 2022 sesuai dengan RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Kominfo 2018-2023 adalah cukup baik dimana ada beberapa capaian yang sudah melebihi target. Lebih lanjut terkait dengan pemenuhan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	(n) 2024	(thn n+1) 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
1.	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,25	2,6			2,81	2,9	3	3,1	
2	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik			93%	94%			99,92%	100%	100%	100%	
3.	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi			83%	100%			100%	100%	100%	100%	
4.	Nilai IKM Kominfo			86	87			80,98	87	88	89	

Dari 4 (empat) indikator yang merupakan sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika, 3 (tiga) diantaranya sudah teralisasi sesuai dengan target, hanya 1 (satu) indikator yang masih belum terealisasi sesuai dengan target pada tahun 2023 yakni terkait dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan infrastruktur kominfo. Untuk Indikator ini, capaian kinerjanya baru sebesar 93%, hal ini disebabkan oleh kendala teknis yang disebabkan pergantian penyedia layanan internet pada tahun 2022 dimana proses migrasi ini berdampak pada pengelolaan akses internet dan penyediaan wifi ruang publik.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untukmeningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa isu strategis Dinas Kominfo Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1 Optimalisasi penyelenggaraan SPBE, dalam rangka percepatan transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas, dan
2 Peningkatan Data Statistik Sektoral yang berkualitas dalam rangka penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)

2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 telah berupaya menyaring dan menelaah usulan-usulan dari masyarakat yang diajukan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.

Usulan-usulan yang disampaikan masyarakat sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan maupun pelaksanaan tahun berikutnya.

Tabel 2.3

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Padang Panjang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Mengacu pada Renstra 2024-2063, dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan rencana kegiatan dan analisis kebutuhan kemudian dimunculkan sejumlah program dan kegiatan beserta penganggarannya. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 terdapat 5 (lima) program dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan Pagu Indikatif Rp. 7.286.236.600. Sementara berdasarkan analisis kebutuhannya masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 8.947.787.850. Lebih lanjut terkait dengan review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD TA 2023
Kota Padang Panjang

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 16 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**100%**	**3,469,722,436**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**100%**	**3,576.807.100**	
2 16 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***2.977.989.000***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***3.238.670.000***	
2 16 01 2.02 01	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/ bulan	2,977.989.000	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/ bulan	3.238.670.000	Masih terdapat kekurangan anggaran gaji sebesar Rp.258 681.000
2 16 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***203.141.000***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***338.137.100***	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	4 Paket	8,147,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	4 Paket	8,141.000	

			disediakan					*disediakan*			
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 Paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 Paket	
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaa n yang disediakan	3 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	10.000.000	
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat yang disediakan	154 Laporan 1300 Ok	150.005.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat yang disediakan	240 Laporan 2000 Ok	285,000,000	Masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 135.000.000
2 16 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***298,878,400***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***298,878,400***	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,s umber daya air dan listrik	3 Laporan	110,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,su mber daya air dan listrik yang	3 Laporan	110,000,000	

			yang disediakan					*disediakan*			
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 Laporan 8 Orang	185.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 Laporan 8 Orang	185.678.400	
2 16 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***143.608.800***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***143.608.700***	
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	87.168.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	87.168.700	

2 16 01 2.09 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Padang Panjang*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*30.000.000*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Padang Panjang*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	30.000.000	
2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	26.440.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	26,440.000	
2 16 02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**	**43%**	**1,751,184,600**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**	**43%**	**2.505.033.550**	
2 16 02 2.01	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***		***jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)***	***27.000***	***1.321.391.300***	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***		***27.000***		***2.505.033.550***	
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	1 Dokumen	269.257.150	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	1 Dokumen	269.304.200	

			Jumlah konten videotron	*850 Konten*				*Jumlah konten videotron*	*850 Konten*		
			Jumlah PPID pelaksana yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	5 OPD 5 Orang				Jumlah PPID pelaksana yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	5 OPD 5 Orang		
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	1 Dokumen 1000 Release	498.886.650	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	1 Dokumen 1000 Release	415.986.650	

2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Padang Panjang	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah Jumlah layanan hubungan media Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah Jumlah pertemuan jumpa pers	5 jenis 5 Layanan 2 Edisi 8 Kali	527.976.250	Layanan Hubungan Media	Padang Panjang	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah Jumlah layanan hubungan media Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah Jumlah pertemuan jumpa pers	5 jenis 5 Layanan 2 Edisi 8 Kali	1.525.167.250	Masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 997.191.000
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Padang Panjang	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan Jumlah KIM yang aktif Jumlah konten positif	1 Dokumen 2 Kelompok 20 Konten	25.271.250	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Padang Panjang	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan Jumlah KIM yang aktif Jumlah konten positif	1 Dokumen 2 Kelompok 20 Konten	25.271.250	

			Jumlah media tradisional yang dibina Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1 Kelompok 1 Kegiatan				Jumlah media tradisional yang dibina Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1 Kelompok 1 Kegiatan		
2 16 03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		**Indeks implementasi tata kelola SPBE**	**3.55**	**2.252.556.500**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		**Indeks Implementasi tata kelola SPBE**	**3.55**	**2,823,967,200**	
2 16 03 2.02	***Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***		***Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan***	***4 aplikasi***	***2.252.556.500***	***Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***		***Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan***	***4 aplikasi***	***2.823,967,200***	
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Padang Panjang	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	4 aplikasi	331,113,600	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Padang Panjang	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	4 aplikasi	331,113,600	

			Jumlah Dok hasil Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen				Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen		
			Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	7 Orang				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	7 Orang		
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	1 Dokumen 7 Jenis 14 Orang	1.908.802.900	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	1 Dokumen 7 Jenis 14 Orang	2.108.802.900	

2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah	100%	30.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah	100%	30.020.000	
			Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
2 20 02 2.01	*Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*		***Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan***	***3 dokumen***	***30.000.000***	***Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***		***Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan***	***3 dokumen***	***30.020.000***	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Padang Panjang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	3 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Padang Panjang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	3 Dokumen	30.020.000	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN		**indeks keamanan informasi**	**375**	**11,950,000**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK		**indeks keamanan informasi**	**375**	**11,960,000**	

	INFORMASI					PENGAMANAN INFORMASI				
2 21 02 2.01	***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***		***Jumlah Pelatihan Persandian yang dilaksanaka n***	***1 kegiatan***	***11,950,000***	***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***		***Jumlah Pelatihan Persandian yang dilaksanakan***	***1 kegiatan***	***11,960,000***
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Padang Panjang	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintaha n daerah kabupaten/ko ta berbasis elektronik dan non elektronik Jumlah pelatihan	1 Laporan 1 Kegiatan	11,950,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Padang Panjang	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	11,960,000
TOTAL					**7.286.233.050**	**Total**				**8.947.787.850**

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 7.286.233.050 sementara berdasarkan hasil analisis kebutuhan diperlukan anggaran sebesar Rp. 8.947.787.850, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia dalam rancangan RKPD tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun rincian masing masing kebutuhan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   Masih terdapat kekurangan anggaran untuk memenuhi gaji/tunjangan ASN (25 ASN) yang diperkirakan sebesar Rp. 3.236.670.000 atau kurang sebesar Rp.258.681.000 dari pagu RKPD.
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
   Untuk anggaran yang tersedia baru bisa memenuhi belanja makan minum rapat untuk 1.300 ok dari target renstra sebesar 2.000 ok. Sementara untuk perjalanan dinas baru teranggarkan untuk 144 oh perjalanan dinas dalam daerah dan 30 oh perjalanan dinas luar daerah. Jika dibandingkan dengan kondisi anggaran 2023 masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp.135.561.250 untuk sub kegiatan ini
3. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
   Sub kegiatan ini berisikan kebutuhan anggaran untuk belanja untuk kerjasama media dalam rangka penyebaran informasi pembangunan darah melalui pariwara/publikasi media. Pada RKPD anggaran untuk sub kegiatan ini baru tersedia Rp.527.976.250 sedangkan berdasarkan analisa kebutuhan dibutuhkan anggaran sebesar Rp.1.527.167.250 atau masih perlu dianggarkan sebesar Rp.997.191.000.
4. Sub kegiatan Pengelolaan e Government Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
   Pada sub kegiatan ini masih terdapat kekurangan anggaran untuk belanja internet yang baru dianggarkan untuk 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 200.000.000,-.

Berdasarkan uraian di atas, diperkirakan masih ada kebutuhan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 1.661.551.250 yang belum tersedia dalam Rancangan RKPD 2024.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam hal perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang haruslah merujuk pada telaahan sasaran dan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN dan BPS agar memperoleh dukungan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2019-2024, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2019-2024 adalah 'Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong'. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah tujuan Kementerian Kominfo, antara lain :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Adapun sasaran dari tujuan tersebut antara lain adalah :

1. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau

3. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
4. Meningkatnya konektivitas layanan pos
5. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
6. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
7. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
8. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
9. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public
11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.1.2 Badan Sandi dan Siber Negara

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat kerasdan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

9. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
13. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
16. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
17. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
18. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota dilingkungan provinsi;
19. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
20. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. Pengamanan informasi elektronik;
22. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

24. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

3.1.3 Badan Pusat Statistik

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, adalah "Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua". Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di sampingitu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalammenyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik.. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik.

Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian ,fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

3.1.4 Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
   a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
   b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;
   c. dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;

2. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui:
   a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
   b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
   c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
   d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.

3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
   a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
   b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
   c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
   d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
   e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
   f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
   g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
   h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
   i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
   j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
   a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat

mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024 mengacu RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 pada tujuan kedua **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel"** dan sasaran kelima **"Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah"** . Selanjutnya berdasarkan tujuan dan sasaran RPD tersebut dirumuskanlah Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tujuan	:	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Sasaran 1	:	Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas
Sasaran 2	:	Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)

Selanjutnya sebagai ukuran keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran, dirumuskanlah indikator kinerja yang akan digunakan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Indeks SPBE	nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	3,00
		Meningkatkan implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	Nilai SPBE yang didapatkan dari tingkat kematangan pengelolaan layanan publik dan layanan administrasi pemerintah daerah (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	2,60
		Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan(kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	Nilai capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.(berdasarkan hasil evaluasi BPS dengan skala indeks 1-5)	2,80

Sumber data Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2023

Selain Indikator Kinerja Utama sebagai dijelaskan di atas, juga terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai Permendagri 18 Tahun 2020.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output (Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Kunci yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang meliputi 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang diselenggarakannya, dengan target capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

(Sesuai dengan urusan pemerintahan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014)

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	TARGET TAHUN 2024
1	**Urusan Komunikasi dan Informatika**		
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	100%

	yang disediakan dinas kominfo	---------- x 100% Jumlah OPD	
	b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintregasi ---------- x 100% Jumlah layanan public	100%
	c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten /kota ---------- x 100% Jumlah penduduk	44%
2	**Urusan Statistik**		
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ---------- x 100% Jumlah OPD	100%
	b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah ---------- x 100%	100%
3	**Urusan Persandian**		
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ---------- x 100%	71%

		Jumlah area penilaian	
4	**Transparansi dan Partisipasi Publik**		
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ---------- x 100% Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	100%
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ---------- x 100% Total dokumen yang telah dirinci	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, sebagai lembaga teknis daerah telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang meliputi program dan kegiatan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, yang merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang meliputi 5 (lima) program dengan dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,298,236,600					6,983,423,335
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,256,256,600					6,941,473,335
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		100 Persen	3,682,422,500			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100 Persen	3,572,710,535

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**1 6**	**0 1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**		**100 persen**	**2,977,989,000**			**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2,859,323,385**
2	1 6	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 Orang/bulan	2,977,989,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	2,859,323,385
2	**1 6**	**0 1**	**2. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**12,000,000**			**persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**-**
2	1 6	0 1	2. 05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Paket	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	
2	**1 6**	**0 1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 persen**	**203,146,400**			**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**291,298,350**
2	1 6	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	8,141,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8,141,000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	16	01	2 06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	34,999,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	21,103,900
2	16	01	2 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12,053,450
2	16	01	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	150,005,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	250,000,000
2	**16**	**01**	**2. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**		**100 persen**	**50,000,000**			**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100 Persen**	**20,000,000**
2	16	01	2. 07	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000
2	**16**	**01**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**		**100 Persen**	**295,678,400**			**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**258,480,000**

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	110,000,000
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	185,678,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	148,480,000
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**100 Persen**	**143,608,700**			**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 Persen**	**143,608,800**
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	87,168,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	87,168,800
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 Unit	26,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	26,440,000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
2	1 6	0 1	2 09	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000
2	**1 6**	**0 2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**		**44 Persen**	**1,321,391,300**			**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**	**44,5 Persen**	**1,214,166,300**
	2 1 6	**0 2**	**2. 01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)**		**27.000followers**	**1,321,391,300**			**jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)**	**28000followers**	**1,214,166,300**
	2 1 6	0 2	2. 01	00 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	415,986,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja jasa Tenaga Peliput dan Belanja Modal Kamera dan Lensa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	451,690,400
						Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial		1000 rilis				Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	1100 rilis	

(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	16	02	201	0006		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	269,304,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Modal Peralatan Komputer, Peralatan Studio dan Lisensi Aplikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	215,580,900
							Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)		850 konten				Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)	875 konten	
							Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik		5 OPD				Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	10 OPD	
2	16	02	201	0007		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Layanan	610,829,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Media Cetak, Media Online, Radio dan TV	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	513,200,000
							Jumlah pertemuan jumpa pers		8 kali				Jumlah pertemuan jumpa pers	8 kali	
							Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah		2 edisi				Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	2 edisi	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1 6	0 2	2 01	00 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25,271,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	33,695,000
						Jumlah web KIM		2 website				Jumlah web KIM	2 website	
						Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan		1 pelatihan				Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1 pelatihan	
2	**1 6**	**0 3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks domain tata kelola SPBE**		**3,60 Indeks**	**2,252,442,800**			**Indeks domain tata kelola SPBE**	**3,70 Indeks**	**2,154,596,500**
2	**1 6**	**0 3**	**2. 02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan**		**4 aplikasi**	**2,252,442,800**			**Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan**	**4 aplikasi**	**2,154,596,500**
						Tingkat Kematangan Layanan SPBE		4 level				**Tingkat Kematangan Layanan SPBE**	**4 level**	
						Tingkat Kematangan Manajemen SPBE		3 level				**Tingkat Kematangan Manajemen SPBE**	**3 level**	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1 6	0 3	2. 02	00 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	343,623,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Masterplan Smart City 2. Pengembangan Aplikasi e-TPP, e-Office, Info Pangan dan Satu Data	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	277,953,600
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		4 aplikasi				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 aplikasi	
2	1 6	0 3	2. 02	00 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,908,819,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembayaran Internet Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1,876,642,900
						Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola		7 jenis				Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	7 jenis	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	2 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				30,020,000					30,000,000
2	2 0	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas		35 Persen	30,020,000			Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	70 Persen	30,000,000
2	2 0	0 2	2. 01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan		3 dokumen	30,020,000			Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokumen	30,000,000
						Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral		80 Persen				Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	90 Persen	
2	2 0	0 2	2 01	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	30,000,000
						Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan		3 dokumen				Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokumen	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**2 1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**11,960,000**					**11,950,000**
2	**2 1**	**0 2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**indeks KAMI**		**456 indeks**	**11,960,000**			**indeks KAMI**	**500 indeks**	**11,950,000**
	2	**2 1**	**0 2**	**2. 01**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan**		**1 pelatihan**	**11,960,000**			**jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan**	**1 pelatihan**	**11,950,000**
						Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi		**II level**				**Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi**	**III level**	
	2	2 1	0 2	2. 01	00 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	11,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	11,950,000
						Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan		1 pelatihan				Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	1 pelatihan	

Berdasarkan tabel di atas, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,**
   a. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   b. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,** dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya.
   c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
      i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
      ii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
   d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
      i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
   e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:**
      i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan 3 (tiga) sub kegiatan antara lain :
      i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
      ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
      iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
   a. **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan 4 sub kegiatan, antara lain :
      i. Pengelolaan Media Komunikasi.
      ii. Pelayanan Informasi Publik.
      iii. Layanan Hubungan Media.
      iv. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.
3. **Program Aplikasi Informatika** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
   a. **Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
      i. Penatalaksanaan dan pengawasan e government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
      ii. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah.
4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
   a. **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
      i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

5. **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu
   a. **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
      i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,298,236,600					6,983,423,335
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,256,256,600					6,941,473,335
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		100 Persen	3,682,422,500			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100 Persen	3,572,710,535

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**1 6**	**0 1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**		**100 persen**	**2,977,989,000**			**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2,859,323,385**
2	1 6	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 Orang/bulan	2,977,989,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	2,859,323,385
2	**1 6**	**0 1**	**2. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**12,000,000**			**persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**-**
2	1 6	0 1	2. 05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Paket	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	
2	**1 6**	**0 1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 persen**	**203,146,400**			**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**291,298,350**
2	1 6	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	8,141,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8,141,000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1 6	0 1	2. 06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	34,999,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	21,103,900
2	1 6	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12,053,450
2	1 6	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	150,005,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	250,000,000
2	**1 6**	**0 1**	**2. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**		**100 persen**	**50,000,000**			**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100 Persen**	**20,000,000**
2	1 6	0 1	2. 07	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000
2	**1 6**	**0 1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**		**100 Persen**	**295,678,400**			**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**258,480,000**

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1 6	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	110,000,000
2	1 6	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	185,678,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	148,480,000
2	**1 6**	**0 1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**100 Persen**	**143,608,700**			**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 Persen**	**143,608,800**
2	1 6	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	87,168,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	87,168,800
2	1 6	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 Unit	26,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	26,440,000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**		**44 Persen**	**1,321,391,300**			**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**	**44,5 Persen**	**1,214,166,300**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)**		**27.000followers**	**1,321,391,300**			**jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)**	**28000followers**	**1,214,166,300**
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	415,986,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja jasa Tenaga Peliput dan Belanja Modal Kamera dan Lensa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	451,690,400
						Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial		1000 rilis				Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	1100 rilis	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1 6	0 2	2. 01	00 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	269,304,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Modal Peralatan Komputer, Peralatan Studio dan Lisensi Aplikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	215,580,900
						Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)		850 konten				Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)	875 konten	
						Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik		5 OPD				Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	10 OPD	
2	1 6	0 2	2. 01	00 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Layanan	610,829,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Media Cetak, Media Online, Radio dan TV	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	513,200,000
						Jumlah pertemuan jumpa pers		8 kali				Jumlah pertemuan jumpa pers	8 kali	
						Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah		2 edisi				Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	2 edisi	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1 6	0 2	2. 01	00 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendisemina sikan Informasi Program atau Kebijakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25,271,250	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendisemina sikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	33,695,000
						Jumlah web KIM		2 website				Jumlah web KIM	2 website	
						Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan		1 pelatihan				Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1 pelatihan	
2	**1 6**	**0 3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks domain tata kelola SPBE**		**3,60 Indeks**	**2,252,442,800**			**Indeks domain tata kelola SPBE**	**3,70 Indeks**	**2,154,596,500**
2	**1 6**	**0 3**	**2. 02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintaha n Berbasis Elektronik yang Dikembangk an**		**4 aplikasi**	**2,252,442,800**			**Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintaha n Berbasis Elektronik yang Dikembangk an**	**4 aplikasi**	**2,154,596,500**
						Tingkat Kematangan Layanan SPBE		4 level				**Tingkat Kematangan Layanan SPBE**	**4 level**	
						Tingkat Kematangan Manajemen SPBE		3 level				**Tingkat Kematangan Manajemen SPBE**	**3 level**	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1 6	0 3	2. 02	00 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	343,623,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Masterplan Smart City 2. Pengembangan Aplikasi e-TPP, e-Office, Info Pangan dan Satu Data	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	277,953,600
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		4 aplikasi				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 aplikasi	
2	1 6	0 3	2. 02	00 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,908,819,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembayaran Internet Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1,876,642,900
						Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola		7 jenis				Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	7 jenis	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**30,020,000**					**30,000,000**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas**		**35 Persen**	**30,020,000**			**Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas**	**70 Persen**	**30,000,000**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan**		**3 dokumen**	**30,020,000**			**Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan**	**3 dokumen**	**30,000,000**
						Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral		**80 Persen**				**Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral**	**90 Persen**	
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	30,000,000
						Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan		3 dokumen				Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokumen	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**2 1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**11,960,000**					**11,950,000**
2	**2 1**	**0 2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**indeks KAMI**		**456 indeks**	**11,960,000**			**indeks KAMI**	**500 indeks**	**11,950,000**
	2	**2 1**	**0 2**	**2. 01**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan**		**1 pelatihan**	**11,960,000**			**jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan**	**1 pelatihan**	**11,950,000**
						Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi		**II level**				**Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi**	**III level**	
	2	2 1	0 2	2. 01	00 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	11,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	11,950,000
						Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan		1 pelatihan				Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	1 pelatihan	

Berdasarkan tabel di atas, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,**
   a. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   b. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,** dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya.
   c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
      i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
      ii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
   d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
      i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
   e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:**
      i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan 3 (tiga) sub kegiatan antara lain :
      i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
      ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
      iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
   a. **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan 4 sub kegiatan, antara lain :
      i. Pengelolaan Media Komunikasi.
      ii. Pelayanan Informasi Publik.
      iii. Layanan Hubungan Media.
      iv. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.
3. **Program Aplikasi Informatika** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
   a. **Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
      i. Penatalaksanaan dan pengawasan e government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
      ii. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah.
4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
   a. **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
      i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

5. **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu
   a. **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
      i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menyusun Rencana Kerja (Renja) yang meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 yang meliputi 5 (lima) program dengan dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.298.236.600						-	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.256.256.600						6.941.473.335	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika			100 Persen	3.682.422.500					100 Persen	3.572.710.535	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah			100 persen	2.977.989.000					100 persen	2.859.323.385	

2	16	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	350 Orang/ bulan	2.977.989.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggar aan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggar aan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	350 Orang/bul an	2.859.323.385	
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**100 Persen**	**12.000.000**					**100 Persen**	**-**	
2	16	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	25 Paket	12.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggar aan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggar aan pemerintahan daerah yang	OPD	0 Paket		

														BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100 persen**	**203.146.400**					**100 Persen**	**291.298.350**	
2	16	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Paket	8.141.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	4 Paket	8.141.000	
2	16	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Paket	34.999.650					4 Paket	21.103.900	
2	16	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	12 Paket	10.000.000					12 Paket	12.053.450	
2	16	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua	24 Laporan	150.005.750					24 Laporan	250.000.000	

								Kel/Desa											
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan			100 persen	50.000.000						100 Persen	20.000.000	
2	16	01	2.07	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	29 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	1 Unit	20.000.000	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	295.678.400						100 Persen	258.480.000	

2	16	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		- Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	36 Laporan	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD	36 Laporan	110.000.000	
2	16	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		- Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	12 Laporan	185.678.400			Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12 Laporan	148.480.000	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**			**100 Persen**	**143.608.700**					**100 Persen**	**143.608.800**	
2	16	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	7 Unit	87.168.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,	OPD	7 Unit	87.168.800	

2	16	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 Unit	26.440.000		Publik	akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		54 Unit	26.440.000	
2	16	01	2.09	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000					1 Unit	30.000.000	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**			**44 Persen**	**1.321.391.300**					**44,5 Persen**	**1.214.166.300**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)**			**27.000 followers**	**1.321.391.300**					**28000 followers**	**1.214.166.300**	
2	16	02	2.01	00 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	415.986.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif	Masyarakat	1 Dokumen	451.690.400	
						Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media			1000 rilis						1100 rilis		

						sosial								dan Kolaboratif					
2	16	02	2.01	00 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Dokumen	269.304.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat	1 Dokumen	215.580.900
						Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)			850 konten							875 konten	
						Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik			5 OPD							10 OPD	
2	16	02	2.01	00 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	5 Layanan	610.829.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja	Masyarakat	5 Layanan	513.200.000
						Jumlah pertemuan jumpa pers			8 kali							8 kali	

						Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah			2 edisi				penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2 edisi		
2	16	02	2.01	00 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.271.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat	1 Dokumen	33.695.000
						Jumlah web KIM Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan			2 website 1 pelatihan						2 website 1 pelatihan	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks domain tata kelola SPBE**			**3,60 Indeks**	**2.252.442.800**					**3,70 Indeks**	**2.154.596.500**
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan**			**4 aplikasi**	**2.252.442.800**					**4 aplikasi**	**2.154.596.500**
						Tingkat Kematangan Layanan SPBE			**4 level**						**4 level**	

						Tingkat Kematangan Manajemen SPBE			3 level						3 level			
2	16	03	2.02	00 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	343.623.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat	1 Dokumen	277.953.600
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			4 aplikasi						4 aplikasi		
2	16	03	2.02	00 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.908.819.200					1 Dokumen	1.876.642.900
						Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola			7 jenis						7 jenis		
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**30.020.000**							**30.000.000**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas**			**35 Persen**	**30.020.000**					**70 Persen**		**30.000.000**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan**			**3 dokumen**	**30.020.000**					**3 dokumen**		**30.000.000**
						Persentase Ketersediaan Data			**80**						**90**		

						Statistik Sektoral			Persen							Persen		
2	20	02	2.01	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.020.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat	1 Dokumen	30.000.000
						Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan			3 dokumen									
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					11.960.000							11.950.000
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks KAMI			456 indeks	11.960.000						500 indeks	11.950.000
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan			1 pelatihan	11.960.000						1 pelatihan	11.950.000
						Tingkat Kesiapan			II level							III level	

					Keamanan Informasi														
2	21	02	2.01	00 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Laporan	11.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Masyarakat	1 Laporan	11.950.000	
						Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan			1 pelatihan						1 pelatihan		
												Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				

Selanjutnya rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagaimana tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**, Indikator kinerja untuk program ini adalah persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi sebesar 100%. Program ini dirinci dalam 5 (lima) bentuk kegiatan, antara lain sebagai berikut.
   a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja persentase layanan keuangan perangkat daerah sebanyak 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
      i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 350 orang/bulan.
   b. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,** dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
      i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan sebanyak 25 paket.
   c. **Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
      i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 4 paket.
      ii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 6 paket.
      iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 4 paket

iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD sebanyak 24 laporan.

d. **Pengadaan Barang Milik Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan sebanyak 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan sebanyak 29 unit.

e. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah sebesar 100%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain:

i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 36 laporan.

ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.

f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :

i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan dinas yang di pelihara sebanyak 7 unit (3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2).

ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 (satu) unit.

iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 54 (lima puluh empat) unit.

2. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dengan target sebesar 44%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

   a. **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja jumlah follower pada laman resmi Kominfo Padang Panjang (instagram) sebanyak 27.000 follower. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, antara lain :

      i. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial sebanyak 1000 (seribu) rilis dan jumlah dokumen hasil pengelolaan media komunikasi publik sebanyak 1 dokumen.

      ii. Pelayanan Informasi Publik dengan indikator kinerja jumlah konten informasi publik (pps dan videotron) sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) konten, Jumlah PPID pelaksana yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik sebanyak 5 (lima) OPD dan jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik sebanyak 1 dokumen.

      iii. Layanan Hubungan Media dengan indikator kinerja jumlah layanan hubungan media sebanyak 5 (lima) layanan, Jumlah pertemuan jumpa pers sebanyak 8 (delapan) kali , dan Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah sebanyak 2 (dua) edisi dan jumlah dokumen hasil pelaksanaan layanan hubungan media sebanyak 1 dokumen.

iv. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan indikator kinerja Jumlah web KIM sebanyak 2 (dua) KIM, Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan sebayak 1 (satu) kegiatan dan jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan program/kebijakan.

3. **Program Aplikasi Informatika** dengan indikator kinerja berupa indeks domain tata kelola SPBE sebesar 3,60. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
   a. **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan sebanyak 4 (empat) aplikasi. Tingkat kematangan layanan SPBE level 4, dan tingkat kematangan manajemen SPBE level 3. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
      i. Penatalaksanaan dan pengawasan e government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan sebanyak 4 (empat) aplikasi, jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan pengawasan e government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) dokumen.
      ii. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola sebanyak 7 (tujuh) jenis dan jumlah dokumen hasil Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen.

4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan indikator persentase data statistik sektoral yang berkualitas sebanyak 35 %. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen, persentase ketersediaan data statistic sektoral sebanyak 80%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen dan jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebanyak 1 dokumen.

5. **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** dengan indikator indeks keamanan informasi (keamanan informasi) sebesar 456 indeks. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

a. **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang diadakan yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang diadakan yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan dan jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sebanyak 1 dokumen.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah. Disamping itu Renja juga digunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun Anggaran 2024.

Pada Tahun Anggaran tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang akan melaksanakan 5 (lima) program dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dalam melaksanakan tugas, menjadi acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

Drs. AMPERA, SH,M.Si
NIP.19680101 199803 1 010